



**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020 - 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Imam Bonjol 1F Semarang, Kode Pos 50141
Telp. 024-3519904, Fax 024-3519186 Email. bpbd_jateng@yahoo.com
www.bpbd.jatengprov.go.id



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa bencana tsunami merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- b. bahwa beberapa wilayah Kabupaten di Jawa Tengah, terutama yang berada di pesisir selatan pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia rentan terhadap adanya bencana tsunami, oleh karena itu perlu disusun rencana kontinjensi bencana tsunami;
- c. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Pertauran Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI PROVINSI JAWATENGGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayahpascabencana.
9. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
10. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
12. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan Kontinjensi atau yang belum tentu tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan rencana kontinjensi bencana tsunami yaitu sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat bencana tsunami.
- (2) Tujuan rencana kontinjensi bencana tsunami adalah:
 - a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana tsunami secara maksimal bagi Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan dunia usaha serta masyarakat di tingkat Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana tsunami saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. terwujudnya komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di tingkat Daerah untuk penanganan darurat bencana tsunami;
 - d. sebagai instrument koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penanganan bencana Tsunami.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. sifat Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami;
- b. penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami;
- c. Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami;
- d. evaluasi Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami.

BAB IV SIFAT RENCANA KONTINJENSI

Pasal 4

- (1) Sifat Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami meliputi:
 - a. partisipatoris;
 - b. dinamis.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami yang bersifat partisipatoris, bahwa dalam pelaksanaan Kontinjensi Bencana Tsunami melibatkan semua pihak.
- (3) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami yang bersifat dinamis, bahwa dalam pelaksanaan Kontinjensi Bencana Tsunami selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB V PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami mendasarkan pada potensi tsunami di Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami di Daerah meliputi 4 (empat) wilayah administrasi yaitu:
 - a. Kabupaten Wonogiri;
 - b. Kabupaten Purworejo;
 - c. Kabupaten Kebumen; dan
 - d. Kabupaten Cilacap.

BAB VI RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI

Pasal 6

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami merupakan arahan bagi Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan dunia usaha serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bencana tsunami.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABVII PELAKSANAAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi bencana tsunami di wilayah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap, Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diaktifasi menjadi rencana operasi tanggap darurat.

BAB VIII EVALUASI RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI

Pasal 8

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **24 Pebruari 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd.

GANJAR PRANOWO

Diundangkandi Semarang
pada tanggal **24 Pebruari 2020**

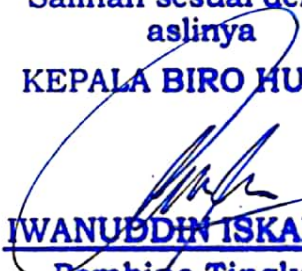
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
Asisten Administrasi

Ttd.
HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 8

**Salinan sesuai dengan
aslinya**

KEPALA BIRO HUKUM


IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Tingkat I

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa upaya-upaya penanggulangan bencana menghendaki keterlibatan aktif berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Untuk daerah-daerah rawan bencana terutama dengan dampak bencana yang luas diperlukan keterpaduan dan kerjasama solid dari segenap pemangku kepentingan tersebut.

Bahwa garis pantai selatan Jawa yang berjarak kurang lebih 150 – 200 km dari titik pertemuan lempeng Australia dan lempeng Eurasia dimana lempeng tersebut berpotensi menjadi pusat Gempa Bumi (episentrum) dan memicu terjadinya Tsunami. Dari hasil digitasi diketahui bahwa panjang garis pantai selatan Provinsi Jawa Tengah mencapai 289,07 km, artinya warga yang bermukim dan beraktivitas di sepanjang garis pantai tersebut rentan terhadap bahaya Gempa Bumi dan Tsunami. Setidaknya warga yang tinggal di pesisir selatan akan dampak langsung bencana Tsunami, yakni warga di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri. Kondisi tersebut sudah seharusnya dijadikan dasar bagi warga dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk lebih aktif membangun dan mengembangkan usaha-usaha pengurangan risiko bencana Gempa Bumi dan Tsunami.

Untuk menghadapi ancaman Gempa Bumi dan Tsunami tersebut, maka Pemerintah di empat Kabupaten yang berada di pesisir selatan Jawa Tengah menyusun dokumen rencana kontinjensi dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten masing-masing bersama pemangku kepentingan yang lain untuk menyelenggarakan kegiatan saat pra bencana maupun penanganan darurat bencana.

Dengan telah tersusunnya dokumen rencana kontinjensi di empat Kabupaten tersebut, teridentifikasi berbagai kesenjangan yang harus dapat diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penyusunan rencana kontinjensi di tingkat Provinsi.

Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai acuan bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana Tsunami di Provinsi Jawa Tengah secara lebih terarah, terpadu, terkoordinasi dan efektif.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen rencana kontinjensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman penanganan darurat bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Jawa Tengah agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, serta efisien terutama sebagai dasar mobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mengambil peran dalam kondisi darurat.
2. Sebagai salah satu rujukan (referensi) dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan penguatan kapasitas kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Dokumen Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat bagi para pemangku kepentingan.

Cakupan luasan ancaman bencana Gempa Bumi dan Tsunami dalam rencana kontinjensi ini dibatasi oleh batas administrasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 4 (empat) kabupaten (Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri). Sebagian wilayah terdampak gempa bumi dan tsunami, sementara sebagian lainnya hanya terdampak gempa bumi saja.

D. Proses Penyusunan

Rencana kontinjensi merupakan suatu proses perencanaan kedepan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.

Proses perencanaan itu melibatkan perwakilan dari unsur OPD/lembaga, masyarakat dan lembaga sosial masyarakat, serta dunia usaha, yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan kontinjensi ini merupakan prasyarat bagi tanggap darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan kontinjensi ini, banyak waktu akan terbuang dalam beberapa hari pertama menanggapi keadaan darurat Gempa Bumi dan Tsunami. Perencanaan kontinjensi ini membangun kapasitas sebuah organisasi penanganan darurat bencana dan harus menjadi dasar bagi rencana operasi penanganan darurat bencana.

Adapun tahapan penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

- a. Rapat pendahuluan BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan langkah dan kesiapan penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi.
- b. Workshop sosialisasi penyusunan rencana kontinjensi Tsunami yang dikoordinir oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di 4 (empat) Kabupaten di Jawa Tengah yang terdampak Tsunami yaitu Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri. Adapun substansi sosialisasi sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi definisi, prinsip, proses penyusunan rencana kontinjensi.
 - 2) Sosialisasi potensi Tsunami oleh Kepala Stasiun Geofisika Kelas III Banjarnegara.
 - 3) Mengidentifikasi para pemangku kepentingan, potensi sumberdaya dan inventarisasi kebutuhan data.

2. Tahap pelaksanaan

- a. Review dokumen rencana kontinjensi Tsunami Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri bersama pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam penanggulangan bencana.
- b. Menentukan skenario kejadian Tsunami yang akan diantisipasi.

- c. Pengembangan skenario dan asumsi dampaknya terhadap aspek kependudukan, sarana dan prasarana, aspek sosial ekonomi dan lingkungan.
 - d. Penetapan tujuan dan strategi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
 - e. Perencanaan Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) untuk menetapkan rencana kerja dan identifikasi kegiatan masing-masing bidang operasi.
 - f. Koordinasi dan sinkronisasi antar bidang.
 - g. Geladi ruang (*Table-Top Exercise*) transformasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi.
 - h. Penyusunan draft dokumen rencana kontinjensi tsunami.
3. Tahap Tindak Lanjut
 - a. Penyempurnaan Draft Rencana Kontinjensi Tsunami
 - b. Proses legalisasi oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

E. Gambaran Umum Wilayah



Gambar 1.1.Wilayah Potensi Terdampak Tsunami di Prov. Jateng

Provinsi Jawa Tengah, terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota. Wilayah tersebut terdiri dari 573 kecamatan dan 8.559 desa/kelurahan. Berdasarkan posisi geografisnya Jawa Tengah memiliki batas-batas: Utara – Laut Jawa; Selatan – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia; Barat – Provinsi Jawa Barat; Timur – Provinsi Jawa

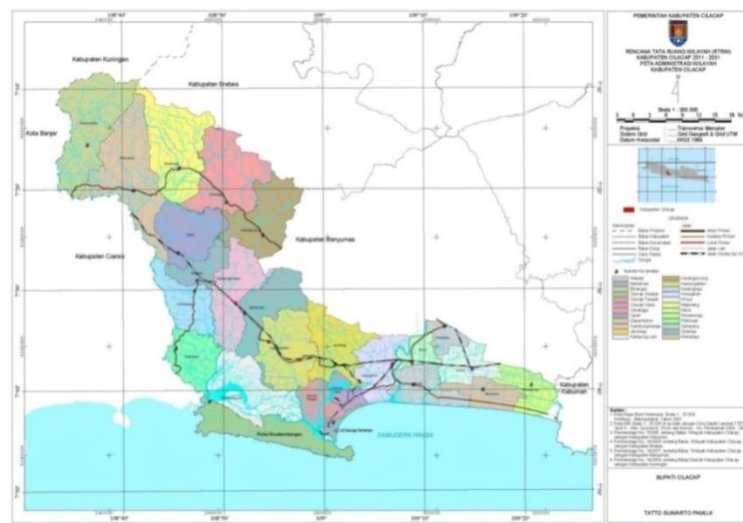
Timur. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 34.257.865 km². Populasi jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah laki-laki sejumlah 16.988.093, perempuan sejumlah 17.269.772, dengan jumlah keseluruhan 34.257.865.

Di Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 kabupaten yang berada di pesisir selatan yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonogiri.

1. Kabupaten Cilacap
a. Wilayah Administrasi

Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak pada posisi antara 109,2 Bujur Timur dan 7,45 Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Cilacap adalah 2,142,59 km² yang terdiri dari $\pm 2/5$ daerah dataran dan $3/5$ daerah pegunungan.

Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi ke dalam 24 kecamatan yang terdiri dari 269 desa dan 15 kelurahan. Dari dua puluh empat kecamatan di Kabupaten Cilacap, kecamatan terjauh adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan jarak ± 107 km dari pusat kota, dan kecamatan terdekat dari Kabupaten Cilacap adalah Kecamatan Cilacap Selatan dengan jarak dari pusat kota ± 0 km. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap telah terjangkau angkutan umum. Berikut ini peta administrasi Kabupaten Cilacap.



Gambar 1.2. Peta Administrasi Kabupaten Cilacap Jawa Tengah

b. Keadaan Rupa Bumi (Topografi)

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Cilacap bila dilihat dari arah Barat laut merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Subang (1.210 meter dpl) yang berada di Kecamatan Dayeuhluhur. Selanjutnya ke arah Tenggara terbagi menjadi dua kawasan bentang alam, di bagian Utara berupa

pegunungan dan bagian Selatan berupa dataran miring landai ke arah Barat daya – Selatan, memiliki elevasi kurang dari 100 meter dpl dan berbatasan dengan pantai Segara Anakan. Bagian paling Timur berupa dataran dan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Nusakambangan memanjang dari Barat ke Timur, membatasi Segara Anakan dan Samudera Hindia, pulau tersebut memiliki bentang alam pegunungan namun tidak begitu tinggi (kurang dari 100 meter dpl).

c. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Cilacap, saat ini merupakan hasil proses pembentukan tanah masa lampau. Proses pembentukan tanah ini dipengaruhi antara lain oleh keadaan iklim, topografi, bahan induk, waktu serta proses pelapukan dan kimia dimana tanah tersebut berada.

Berdasarkan tingkat perkembangan jenis tanah yang ada, di beberapa Kecamatan di Kabupaten Cilacap dibedakan atas tanah yang belum lanjut perkembangannya seperti latosol, andosol dan mediteran. Tanah aluvial umumnya menyebar di daerah dataran rendah, yaitu wilayah sebelah selatan yang merupakan zone endapan. Endapan aluvial yang sudah tua dan menampakkan akibat pengaruh iklim dan vegetasi tidak termasuk aluvial. Kalau melihat genese tanahnya, tanah aluvial kurang dipengaruhi iklim dan vegetasi, tetapi yang paling nampak pengaruhnya pada ciri dan sifat tanahnya ialah bahan induk dan topografi sebagai akibat waktu terbentuknya masih muda. Tanah aluvial dipengaruhi langsung oleh sumber bahan asal, sehingga kesuburannya pun ditentukan seperti bahan asalnya. Litosol merupakan tanah yang umumnya terdapat di lereng-lereng atau kaki bukit dengan ciri mempunyai solum (ketebalan tanah) dangkal (kurang dari 45 cm) di atas batuan keras atau tampak tanah sebagai batuan padat yang padu. Tanah litosol harus diusahakan agar dipercepat pembentukan tanah, antara lain penghutanan.

d. Penduduk

Penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2016 berjumlah 1.785.971 jiwa dengan komposisi 895.201 penduduk laki-laki dan 890.770 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 1.034,82 km² maka kepadatan penduduk setiap km² sebesar 835. Laju pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 0,31 persen.

Wilayah Kecamatan Cilacap Selatan merupakan wilayah terpadat, dengan tingkat kepadatan 8.639 jiwa setiap kilometer

persegi kemudian Kecamatan Cilacap Tengah dengan tingkat kepadatan 3.812 jiwa setiap kilometer persegi. Dengan demikian pola penyebaran penduduk di Kabupaten Cilacap pada daerah-daerah yang aktifitas ekonominya tinggi, sarana dan prasarana memadai dan kondisi sosial ekonominya lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang aktifitas ekonominya relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi masih terbatas, yaitu di Kecamatan Kampunglaut dengan tingkat kepadatan 118 jiwa setiap kilometer persegi dan Kecamatan Dayeuhluhur dengan tingkat kepadatan 269 jiwa setiap kilometer persegi

Tabel 1.1. Jumlah Desa dan Luas Kecamatan, dan Jumlah Penduduk
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk
1	2	3	4	5
1.	Dayeuhluhur	14	185,06	49.830
2.	Wanareja	16	189,73	89.739
3.	Majenang	17	138,56	128.856
4.	Cimanggu	15	167,44	97.122
5.	Karangpucung	14	115.00	73.958
6.	Cipari	11	121,47	63.172
7.	Sidareja	10	54,95	57.704
8.	Kedungreja	11	71,43	81.345
9.	Patimuan	7	75,30	46.478
10.	Gandrungmangu	14	143,39	106.190
11.	Bantrasari	8	95,54	69.970
12.	Kawunganten	12	117,43	81.435
13.	Kampunglaut	4	146,14	17.263
14.	Jeruklegi	11	96,80	66.471
15.	Kesugihan	16	82,31	97.904
16.	Adipala	16	61,19	79.025
17.	Maos	10	28,05	48.987
18.	Sampang	10	27,30	37.816
19.	Kroya	17	58,83	104.648
20.	Binangun	17	51,42	66.670
21.	Nusawungu	17	61,26	78.178
22.	Cilacap Selatan	5	9,11	78.697
23.	Cilacap Tengah	5	22,15	84.441
24.	Cilacap Utara	5	18,84	71.072

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	2	3	4	5
	Jumlah	284	2.138,50	1.785.971

Sumber: Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2017

Komposisi penduduk Kabupaten Cilacap menurut kelompok umur, menunjukkan kelompok umur yang berusia muda (0 – 14 tahun) sebesar 460.057 jiwa atau 25,75persen, yang berusia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 1.182.891 jiwa atau 66,20 persen dan yang berusia tua (> 65 tahun) sebesar 143.023 jiwa atau 8,05persen. Dengan demikian maka angka beban tanggungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Cilacap sebesar 54,10. Kelompok penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan rincian menurut kelompok umur dan jenis kelamin, menunjukkan penduduk laki-laki maupun perempuan proporsi terbesar berada pada kelompok umur 15 – 64 tahun.

2. KabupatenKebumen

a. Wilayah Administrasi

Mempunyai luas wilayah sebesar 128.111,50 ha atau 1.281,115 km2, secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan.Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur.

Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan.



Gambar 1.3. Peta Administrasi Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

b. Keadaan Rupa Bumi (Topografi)

Secara topografis, wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan juga terdapat wilayah

pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 - 997,5 dpal. Kemiringan tanahnya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan.

Tabel 1.2. Topografi Kabupaten Kebumen

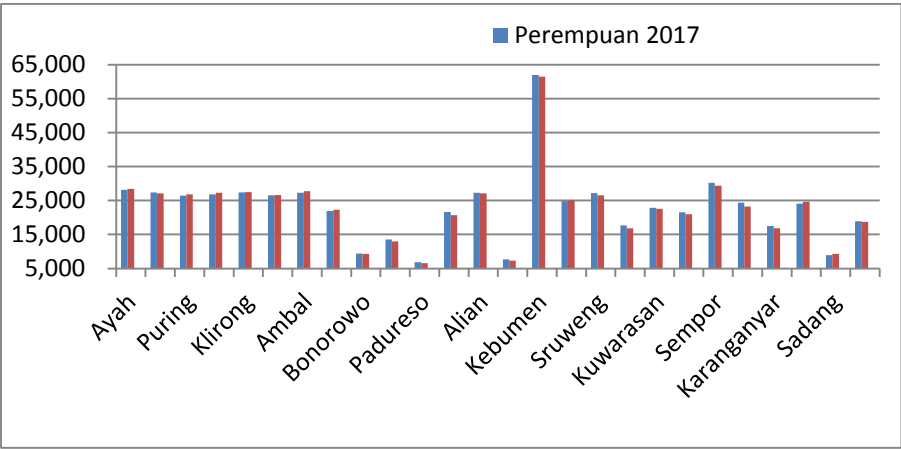
No.	Topografi	% Luas	Sebaran Lokasi
1	2	3	4
1.	0- 2% (datar)	52,26%	Wilayah Tengah dan pesisir Selatan
2.	2-15% (bergelombang)	4,64%	Wilayah Tengah
3.	15-40% (curam)	17,11%	Wilayah Utara
4.	>40% (sangat curam)	25,99%	Wilayah bagian Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Ayah

c. Jenis Tanah

Kabupaten Kebumen bercorak agraris dengan penggunaan lahan yang dominan sebagai lahan persawahan, baik sebagai sawah irigasi teknis maupun tadah hujan. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada Tahun 2017 luas lahan produktif pertanian tercatat 69.301 ha atau 54,09%.

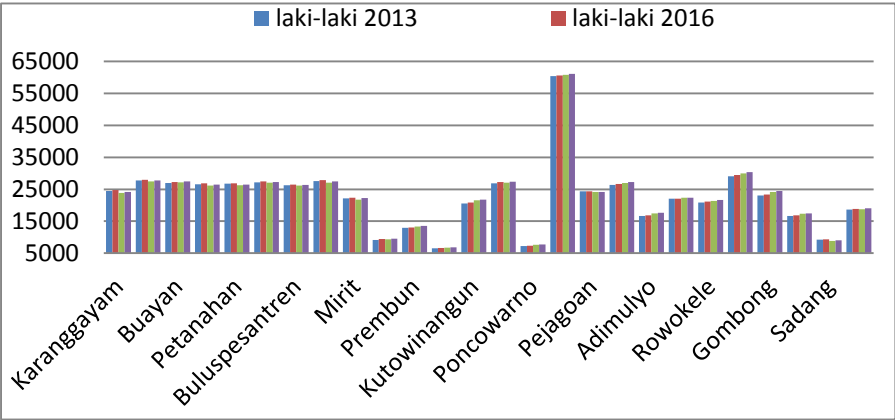
d. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2017 berdasarkan perhitungan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar 1.362.524 jiwa dengan rincian 693.618 laki-laki dan 668.906 penduduk perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 403.585 KK. Grafik rincian jumlah penduduk pada gambar 1.4. Angka pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan cukup tajam. Jumlah penduduk dan pertumbuhannya dari tahun 2013-2016 digambarkan dalam gambar 1.4.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2016

Gambar 1.4.Grafik Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Kebumen Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2017

Gambar 1.5.Grafik Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk KabupatenKebumen Tahun 2013 – 2016

Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tajam ternyata tidak diikuti dengan peningkatan angka ketergantungan yang signifikan. Angka ketergantungan pada Tahun 2017 yaitu 57,08 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 57,08 penduduk usia tidak produktif. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu 56,82 terjadi peningkatan yang tidak signifikan. Data Penduduk Usia Produktif dan Angka ketergantungan Tahun 2015-2017 secara lengkap dapat dilihat pada tabel1.3.

Tabel 1.3. Penduduk Usia Produktif dan Angka ketergantungan
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017

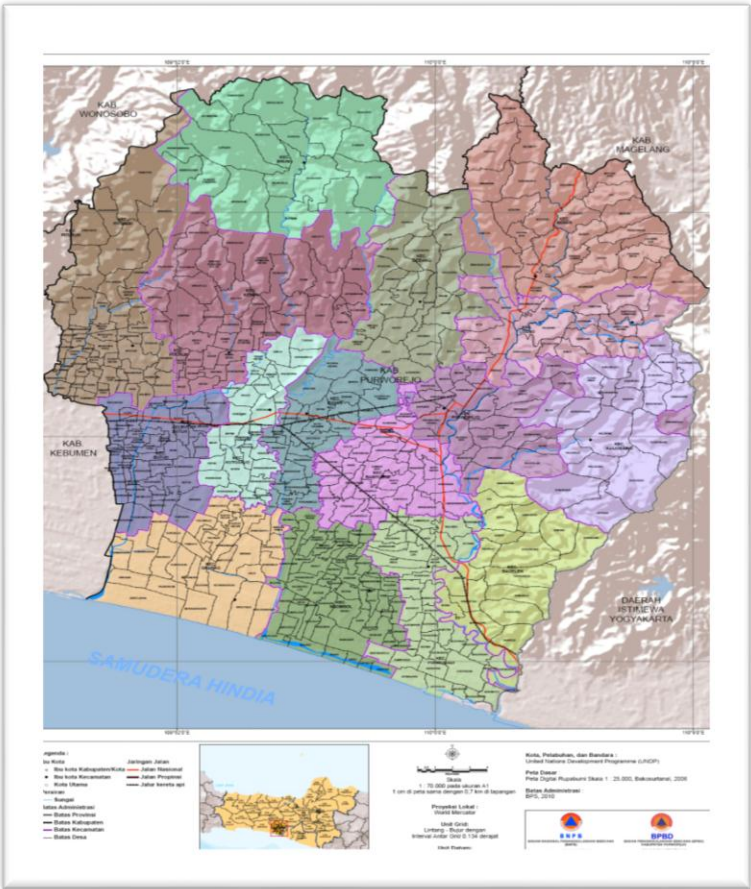
No	Uraian	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	Penduduk Usia Produktif	534.066	535.097	764.471
2	Penduduk Usia tidak produktif	92.044	95.929	122.717
3	Angka Ketergantungan	75.898	77.837	304.819

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2017

3. Kabupaten Purworejo
a. Wilayah Administrasi

Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak pada posisi antara 109⁰ 47' 28" - 110⁰ 8' 20" Bujur Timur dan 7⁰ 32' – 7⁰ 54" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.034,82 km² yang terdiri dari ± 2/5 daerah dataran dan 3/5 daerah.

Secara administratif Kabupaten Purworejo terbagi ke dalam 16 kecamatan yang terdiri dari 469 desa dan 25 kelurahan. Berikut ini peta administrasi Kabupaten Purworejo.



Gambar 1.5. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah

b. Keadaan Rupa Bumi (Topografi)

Bagian selatan Kabupaten Purworejo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0–25 meter di atas permukaan air laut dan bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25–1.050 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lereng atau kelerengan di Kabupaten Purworejo dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Kemiringan 0–2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo.
- 2) Kemiringan 2–15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen.
- 3) Kemiringan 15–40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo.
- 4) Kemiringan >40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.

c. Jenis Tanah

Kabupaten Purworejo terdiri dari tanah konsosiasi alluvial hidromorf; konsosiasi alluvial kelabu; Asosiasi gley humus dan alluvial kelabu; kompleks latosol coklat tua, latosol coklat kemerahan dan litosol; Asosiasi latosol coklat kemerahan dan latosol coklat tua; kompleks latosol merah kuning, latosol coklat tua dan litosol; konsosiasi regosol coklat; konsosiasi regosol kelabu. Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter sampai 325 meter di atas permukaan laut.

d. Penduduk

Penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 berjumlah 712.686 jiwa dengan komposisi 49,32 persen penduduk laki-laki dan 50,68 persen penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 1.034,82 km² maka kepadatan penduduk setiap km² sebesar 689. Laju pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 0,32 persen.

Wilayah Kecamatan Purworejo masih merupakan wilayah terpadat, dengan tingkat kepadatan 1,612 jiwa setiap kilometer persegi kemudian Kecamatan Kutoarjo dengan tingkat kepadatan 1,586 jiwa setiap kilometer persegi. Dengan demikian pola penyebaran penduduk di Kabupaten Purworejo pada daerah-daerah yang aktifitas ekonominya tinggi, sarana dan prasarana memadai dan kondisi sosial ekonominya lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang aktifitas ekonominya relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi masih terbatas, yaitu di Kecamatan Kaligesing dengan tingkat kepadatan 399 jiwa setiap kilometer

persegi dan Kecamatan Bruno dengan tingkat kepadatan 404,87 jiwa setiap kilometer persegi

Tabel 1.4. Jumlah Desa dan Luas Kecamatan, dan Jumlah Penduduk Tahun 2016

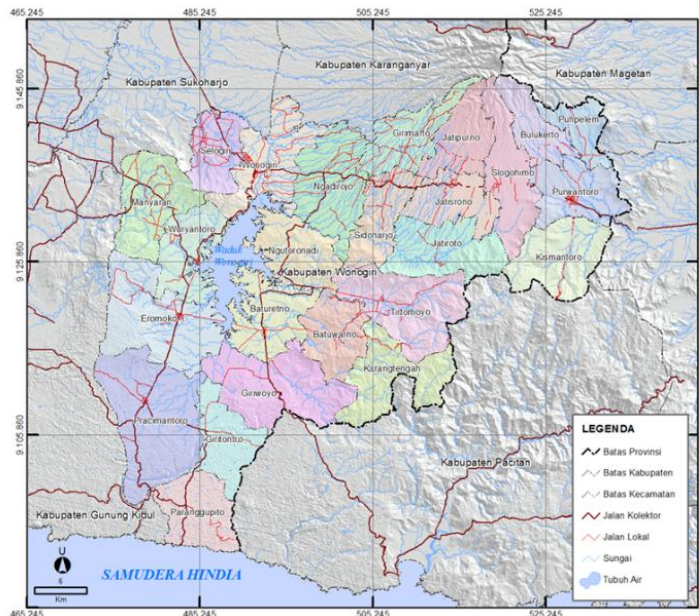
No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	2	3	4	5
1	Grabag	32	64,92	43.691
2	Ngombol	57	55,27	31.541
3	Purwodadi	40	53,96	37.338
4	Bagelen	17	63,76	29.420
5	Kaligesing	21	74,73	29.829
6	Purworejo	25	52,72	84.966
7	Banyuurip	27	45,09	40.981
8	Bayan	26	43,21	46.774
9	Kutoarjo	27	37,59	59.618
10	Butuh	41	46,08	39.749
11	Pituruh	49	77,42	46.799
12	Kemiri	40	92,05	51.865
13	Bruno	18	108,43	44.346
14	Gebang	25	71,86	40.817
15	Loano	21	53,65	35.401
16	Bener	28	94,08	49.551
	Jumlah	494	1.034,82	712.686

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2017

Komposisi penduduk Kabupaten Purworejo menurut kelompok umur, menunjukkan kelompok umur yang berusia muda (0–14 tahun) sebesar 165,964 jiwa atau 23,29 persen, yang berusia produktif (15–64 tahun) sebesar 462,475 jiwa atau 64,89 persen dan yang berusia tua (> 65 tahun) sebesar 84,247 jiwa atau 11,82 persen. Dengan demikian maka angka beban tanggungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Purworejo sebesar 54,10. Kelompok penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan rincian menurut kelompok umur dan jenis kelamin, menunjukkan penduduk laki-laki maupun perempuan proporsi terbesar berada pada kelompok umur 15–64 tahun.

4. Kabupaten Wonogiri
a. Wilayah Administrasi

Secara Geografis wilayah Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Letak Kabupaten Wonogiri sendiri terletak di 7°32'-8°15' Lintang Selatan dan 110°41'-111° Bujur Timur.



Gambar 1.6. Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah

Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan 294 desa/kel, terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan. Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kec. Pracimantoro sebanyak 18 desa / kelurahan, sedangkan paling sedikit adalah Kec. Karangtengah dengan 5 desa/kelurahan. Ada 3 kecamatan yang tidak memiliki kelurahan yaitu Kecamatan Baturetno, Karangtengah dan Paranggupito. Luas Kabupaten Wonogiri pada tahun 2014 tercatat 182.236,02 ha, dengan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil dan Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas.

b. Keadaan Rupa Bumi (Topografi)

Kabupaten Wonogiri memiliki luasan 182.236,02 Ha dengan kondisi topografi yang bervariasi mulai datar, landai, perbukitan bergelombang rendah hingga perbukitan bergelombang kuat, serta bergunung. Ketinggian permukaan berdasarkan data DEM (*Digital Elevation Model*) berada pada rentang 0 sampai 1.900 mdpl. Ketinggian permukaan dengan nilai 0 yang dimaksud adalah bagian permukaan tanah yang berada di pantai dengan tinggi sekitar permukaan air laut rata-rata. Sedangkan ketinggian maksimal

merupakan bagian wilayah Kabupaten Wonogiri yang memiliki topografi bergunung yaitu yang berada di lereng Gunung Lawu.

Kemiringan lereng menunjukkan curam atau tidaknya perbedaan ketinggian dari satu titik dengan titik permukaan yang lain di sekitarnya. Bahasan sederhananya adalah kemiringan lereng merupakan perbandingan antara jarak dua titik secara horizontal dengan beda tingginya. Daerah dengan beda tinggi yang cukup besar ditambah dengan jarak kedua titik yang dekat akan menghasilkan kemiringan lereng yang curam.

Kabupaten Wonogiri memiliki kelas kemiringan lereng yang cukup variatif. Berdasarkan 5 kelas kemiringan lereng, kelas kemiringan lereng dengan cakupan area terluas ada pada kelas kemiringan lereng $>8 - 16^\circ$ dilanjutkan dengan kelas kemiringan lainnya yang memiliki luasan tidak jauh berbeda. Jika dilihat pada peta kemiringan lereng, bentuk topografi curam berada pada lereng Gunung Lawu di sebelah utara dan di bagian punggung perbukitan selatan di timur dan barat Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri.

c. Jenis Tanah

Karakteristik tanah di wilayah Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh proses terbentuk, jenis, dan struktur batuan yang ada. Proses pembentukan tanah yang berasal dari proses pelapukan batuan membutuhkan waktu sangat lama. Jenis material dasar dan proses yang bekerja baik secara endogen maupun eksogen mempengaruhi jenis tanah yang dihasilkan. Termasuk pada perlapisan tanah di bagian hilir sungai yang pada umumnya berjenis tanah alluvium dari proses sedimentasi dan transportasi material sungai dari hulu. Jenis tanah di bagian lereng perbukitan yang curam dan igir yang runcing menandakan bahwa karakteristik tanah di bagian tersebut banyak terkikis oleh air hujan, namun batuan dasarnya cukup keras sehingga akan membentuk lereng berpola "V". Pada jenis igir yang membulat sifat tanah lebih mudah tererosi dan memiliki kekerasan batuan yang relatif seragam.

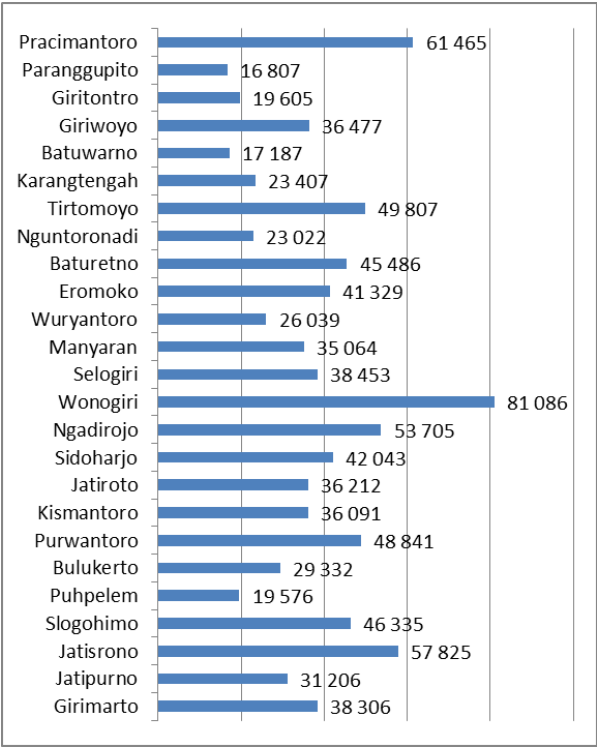
Sebaran jenis tanah di Kabupaten Wonogiri terdiri dari 6 jenis tanah yaitu Aluvial, Andosol, Latosol, Litosol, Mediteran, dan Podsolik. Jenis tanah paling luas yaitu Latosol berada di bagian utara Kabupaten Wonogiri dekat dengan lereng Gunung Lawu. Kemudian jenis tanah Litosol yang berada di bagian barat dan timur Kabupaten Wonogiri dengan morfologi perbukitan bergelombang kuat / terjal. Kemudian jenis tanah Aluvial dan

Mediteran yang berada di bagian selatan Kabupaten Wonogiri dengan morfologi lereng datar hingga landai. Sisanya adalah tanah Andosol dan Podsolik yang tersebar di bagian timur dan barat Kabupaten Wonogiri

d. Penduduk

Penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 954.706 jiwa yang terdiri atas 464.004 jiwa penduduk laki-laki dan 490.702 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Wonogiri mengalami pertumbuhan sebesar 0,29 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 94,56. mengartikan bahwa pada tahun 2015 untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Wonogiri terdapat 94 penduduk laki-laki. Besaran *sex ratio* yang lebih kecil dari 100 ini berhubungan dengan pola migrasi penduduk Kabupaten Wonogiri sebagai pengirim migran, dimana penduduk laki-laki lebih banyak yang merantau ke luar wilayah. Ukuran jumlah penduduk pada tahun tertentu akan lebih bermakna bila dihubungkan dengan luas wilayahnya. Perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah menggambarkan kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Faktor kesuburan tanah, daerah, iklim, topografi, sumber air, dan perhubungan atau transportasi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri tahun 2017 mencapai 524 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 25 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jatisrono dengan kepadatan sebesar 1.156 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Paranggupito sebesar 260 jiwa/km². Dilihat dari umur penduduk, banyaknya penduduk produktif (umur 15-64 tahun) di suatu wilayah sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut. Rasio ketergantungan menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64) terhadap kelompok usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Besar kecilnya rasio ketergantungan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar rasio ketergantungan maka semakin sedikit penduduk usia produktif yang berpartisipasi dalam pembangunan.



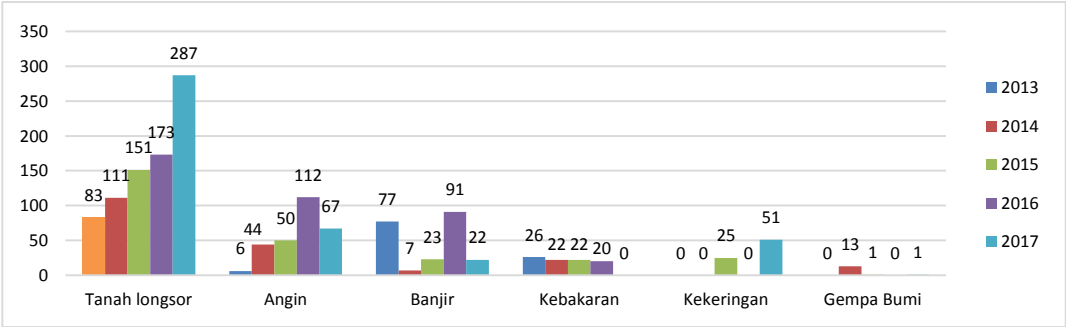
Sumber: Wonogiri Dalam Angka 2018

Gambar 1.7. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2017 (jiwa/km²)

F. Potensi Kejadian Bencana

1. Kabupaten Cilacap

Data kejadian bencana di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian dari rentang tahun data. Data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan bisa dilihat pada Gambar 1.8 di bawah ini.



Sumber: BPBD Kabupaten Cilacap

Gambar 1.8. Grafik Kejadian Bencana di Kabupaten Cilacap Tahun 2013-2017

Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa terdapat kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2013 – 2017 yaitu:

- a. Bencana dengan kecenderungan kejadiannya menurun terjadi pada bencana kebakaran.

- b. Bencana dengan kecenderungan kejadiannya fluktuatif adalah bencana angin, banjir, kekeringan dan gempa bumi.
- c. Bencana dengan kecenderungan kejadiannya meningkat adalah bencana longsor.

2. Kabupaten Kebumen

Akibat dari proses geologi, perubahan tata guna lahan dan cuaca, wilayah Kabupaten Kebumen rawan terhadap berbagai bencana alam, yaitu: gempa bumi, tsunami, gerakan tanah (tanah longsor), banjir, kekeringan dan bencana lainnya. Kabupaten Kebumen yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa berbatasan langsung dengan Lautan Hindia, memiliki garis pantai sepanjang 58 Km dari perhitungan menggunakan software map info. Hal tersebut menyebabkan wilayah pantai Kabupaten Kebumen memiliki kemungkinan diterjang bencana Tsunami, karena di sepanjang lepas pantai Kabupaten Kebumen terletak di zona tumbukan (zona subduksi) antara Lempeng Samudera Hindia-Australia dan Lempeng Benua Eurasia yang sangat aktif. Zona tumbukan ini berfungsi sebagai sumber gempa bumi di laut. Gempa bumi yang bersumber dari zona subduksi tersebut berpotensi membangkitkan terjadinya Tsunami apabila berkekuatan besar, kedalaman dangkal, mekanisme sesar/patahan naik dan terjadi dislokasi morfologi bawah laut.

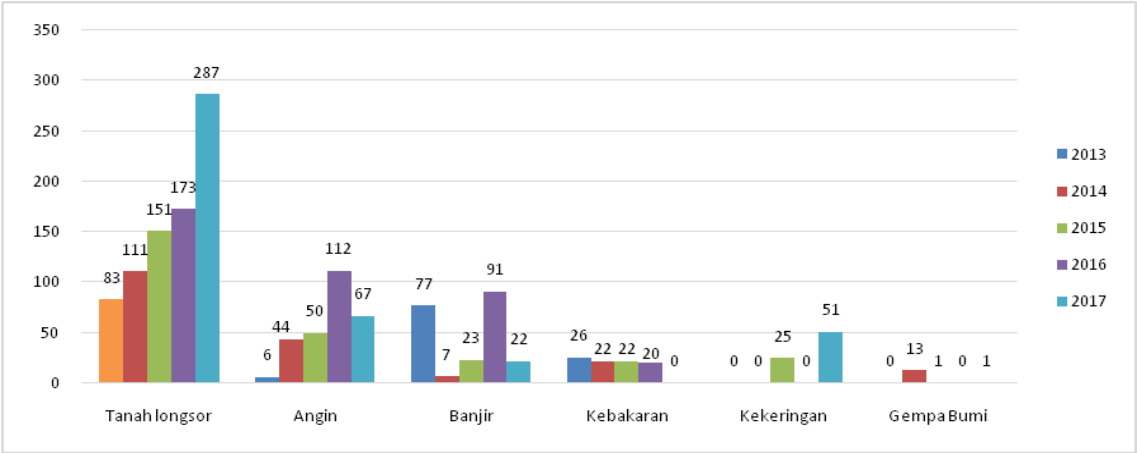
Peristiwa gempa bumi dan Tsunami yang terjadi di Pantai Pangandaran pada tanggal 17 Juli 2006 berdampak pada Kabupaten Kebumen, yang menyebabkan kerusakan cukup parah seperti hancurnya kapal-kapal, perahu fiber (jukung) milik nelayan, tambak-tambak milik petani, serta bangunan dan rumah tinggal warga yang khususnya berada di pesisir pantai selatan. Selain itu juga banyaknya korban baik harta benda maupun korban jiwa serta luka-luka hal ini disebabkan dengan rusaknya beberapa jaringan komunikasi dan jaringan listrik sehingga menghambat informasi mengenai kondisi di seluruh daerah bencana.

Melihat kondisi geografis di atas, Kabupaten Kebumen menjadi daerah berpotensi terhadap bencana Tsunami. Berdasarkan Peta Rawan Tsunami di wilayah Kabupaten Kebumen terdapat 41 desa, 33 desa terdampak langsung 8 desa terkena dampak tidak langsung, yang tersebar di 8 Kecamatan.

3. Kabupaten Purworejo

Data kejadian bencana di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian tahun data. Data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan

kejadian secara keseluruhan bisa dilihat pada Gambar1.9. di bawah ini.



Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo

Gambar 1.9. Grafik Kejadian Bencana di Kabupaten Purworejo
Tahun 2013-2017

Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa terdapat kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Purworejo dalam rentang waktu tahun 2013–2017 yaitu:

- a. Bencana dengan kecenderungan kejadiannya menurun terjadi pada bencana kebakaran.
- b. Bencana dengan kecenderungan kejadiannya fluktuatif adalah bencana angin, banjir, kekeringan dan gempa bumi.
- c. Bencana dengan kecenderungan kejadiannya meningkat adalah bencana longsor.

4. Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan data rekap BPBD Kabupaten Wonogiri dari tahun 2014 hingga tahun 2017, total kerugian bencana di Kabupaten Wonogiri mencapai Rp 19.223.264.000, dengan total kerugian tertinggi yaitu pada tahun 2016 sejumlah Rp 7.558.300.000.

Tabel 1.5. Total Kerugian Bencana di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2014 - 2017

Tahun	Total Kerugian
1	2
2014	Rp 3.638.139.000
2015	Rp 6.694.525.000
2016	Rp 7.558.300.000
2017	Rp 1.332.300.000
Grand Total	Rp 19.223.264.000

Sumber: BPBD Wonogiri, 2017

Pada tahun 2017 sendiri sampai bulan September sudah tercatat 46 kejadian tanah longsor dan 17 kejadian banjir. Sedangkan tahun 2016 lalu tercatat 119 bencana tanah longsor dan 21 kejadian banjir.

Tabel 1.6. Kejadian Bencana di Wonogiri Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis Kejadian				
		Tanah Longsor	Banjir	Angin Topan	Kebakaran	Tanah Bergerak
1	2	3	4	5	6	7
1	Wonogiri	3	1	4	4	0
2	Selogiri	2	2	6	7	0
3	Ngadirojo	1	0	3	1	0
4	Nguntoronadi	1	4	1	0	0
5	Sidoharjo	6	2	1	0	0
6	Girimarto	1	0	0	1	0
7	Jatiroto	7	0	0	1	0
8	Jatipurno	3	0	0	0	1
9	Jatisrono	3	1	1	0	0
10	Slogohimo	5	0	0	0	1
11	Purwanto	3	1	4	0	0
12	Bulukerto	6	0	1	1	0
13	Kismantoro	13	0	1	0	0
14	Puhpelem	1	0	0	0	0
15	Baturetno	0	0	2	1	0
16	Tirtomoyo	11	6	1	0	0
17	Karangtengah	6	0	0	0	0
18	Batuwarno	9	0	0	0	0
19	Giriwoyo	6	0	4	1	0
20	Giritontro	0	2	0	1	0
21	Paranggupito	2	0	0	0	0
22	Pracimantoro	0	12	1	1	0
23	Eromoko	6	4	2	2	0
24	Wuryantoro	0	0	2	2	0
25	Manyaran	4	0	1	0	0
J U M L A H		99	35	35	23	2

Sumber: BPBD Wonogiri 2018

Tabel 1.7. Kejadian Bencana di Wonogiri Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Kejadian				
		Tanah Longsor	Banjir	Angin Topan	Kebakaran	Tanah Bergerak
1	2	3	4	5	6	7
1	Wonogiri	3	0	11	4	1
2	Selogiri	3	2	2	0	0
3	Ngadirojo	0	0	1	0	0
4	Nguntoronadi	0	1	6	0	0
5	Sidoharjo	2	0	4	1	1
6	Girimarto	5	0	1	0	0
7	Jatiroto	6	0	3	0	0
8	Jatipurno	1	0	0	0	0
9	Jatisrono	12	2	6	1	0
10	Slogohimo	7	0	1	2	1
11	Purwantoro	4	1	3	0	3
12	Bulukerto	5	0	1	0	0
13	Kismantoro	22	3	1	0	1
14	Puhpelem	7	0	1	0	0
15	Baturetno	1	1	5	2	0
16	Tirtomoyo	8	1	1	3	0
17	Karangtengah	9	0	1	0	0
18	Batuwarno	5	0	2	0	1
19	Giriwoyo	4	3	9	1	1
20	Giritontro	0	1	0	0	0
21	Paranggupito	2	1	0	0	1
22	Pracimantoro	0	2	5	2	0
23	Eromoko	4	1	1	4	0
24	Wuryantoro	0	1	1	1	0
25	Manyaran	9	1	2	0	1
J U M L A H		119	21	68	21	11

Sumber: BPBD Wonogiri, 2017

G. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lampiran F tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Pasal 109 ayat 3);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penanganan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
20. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Pemerintah di Daerah;

21. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas Bantuan TNI Dalam Menanggulangi Bencana Alam, Pengungsian dan Bantuan Kemanusiaan;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 14 Tahun 2014 Tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
27. Peraturan Kepala Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

BAB II

PENILAIAN BAHAYA

DAN PENENTUAN KEJADIAN

A. Penilaian Bahaya

Identifikasi bahaya/ancaman diperoleh dari Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), data sejarah kejadian bencana, atau hasil kajian para pakar tentang potensi bencana di suatu daerah. Analisa bahaya/ancaman dilakukan untuk menentukan indeks bahaya/ancaman dari masing-masing wilayah, dari hasil analisa tersebut dapat diperkirakan seberapa besaran luas bahaya yang akan terjadi di suatu daerah.

Pada Rencana Kontinjensi Tsunami ini, hasil kajian para pakar lebih menjadi rujukan utama dalam penilaian bahaya yang akan dikembangkan menjadi penentuan kejadian dan pengembangan skenario.

Dengan mengambil rujukan dari buku Peta Sumber Dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017, yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gempa Nasional, memberikan penjelasan:

Zona subduksi Jawa dengan banyak segmen (Tabel 2.1), memiliki frekuensi dan magnitudo kegempaan yang secara signifikan lebih rendah jika dibandingkan dengan Sumatra. Meskipun demikian, terdapat beberapa gempa besar juga pernah terjadi di lepas pantai selatan Jawa, terutama di sepanjang *megathrust* (Newcomb and McCann, 1987). Dari sekian banyak gempa yang terjadi di subduksi Jawa, tidak ada yang mencapai 8 M. Selain Tsunami skala kecil yang terjadi pada tahun 1994 (Abercrombie et.al., 2001) dan tahun 2006 (Ammon et.al., 2006; Fujii and Satake, 2006) tidak ada rekaman sejarah terjadinya Tsunami besar di zona subduksi Jawa. Diperkirakan pergerakan relatif lempeng di zona subduksi Jawa diakomodasi terutama oleh pergerakan aseismik tanpa adanya penumpukan energi. Hipotesis ini didukung oleh fakta bahwa umur lempeng yang menunjam di bawah Jawa relatif lebih tua (120-130.Ma) sehingga menjadi lebih dingin dan berat. Sebagai akibatnya, sudut penunjaman menjadi lebih besar sehingga lempeng samudera yang menunjam tidak bersinggungan secara kuat dengan lempeng Eurasia di atasnya. Hal ini juga didukung oleh banyaknya sesar normal di daerah *fore-arc* yang mengindikasikan dominasi *slab-pull force* dibandingkan dengan *slab-push force* di daerah ini (Abercrombie et.al, 2001).

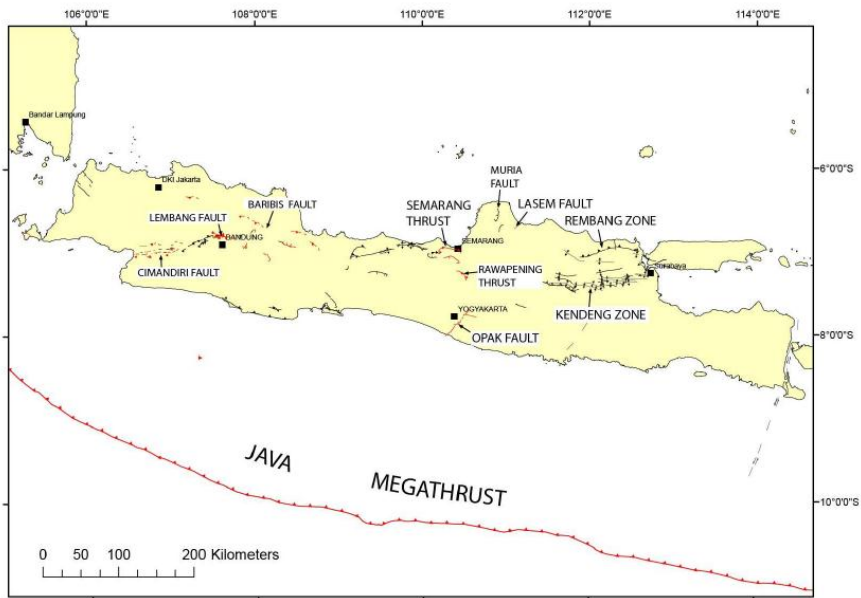
Meskipun demikian, kejadian gempa besar pada tahun 1994 dan 2006 menunjukkan bahwa zona subduksi Jawa tidak sepenuhnya

aseismik dan masih menyimpan potensi kegempaan. Adanya periode seismisitas yang lama bisa jadi mengindikasikan adanya *locked patches* yang terisolasi di daerah batas lempeng. *Locked patches* yang terisolasi ini ketika akhirnya lepas akan menghasilkan gempa bermagnitudo besar. Keberadaan *locked patches* ini bisa jadi disebabkan adanya subduksi *seamount* (Abercrombie et.al., 2000).

Menurut Kanamori (2008) secara umum pada zona subduksi tempat lempeng yang menunjam memiliki permukaan yang kasar dan tua, daerah *coupled/locked zone* bisa berada di dalam zona yang sempit di daerah dekat dengan *trench* di batas deformasi paling depan dari sistem subduksi. Gempa subduksi Jawa tahun 1994 dan 2006 terjadi di daerah yang sempit (beberapa puluh km dari palung) sehingga besar kemungkinan bahwa gempa ini terjadi karena adanya *isolated locked-zone* di batas subduksi Jawa. Besar kemungkinan bahwa potensi kegempaan zona subduksi di Jawa mengikuti pola ini, yaitu gempa yang akan datang kemungkinan terjadi di daerah yang terdapat adanya *seismicgap* (zona dengan seismisitas rendah) di sepanjang zona seismik yang sempit.

Tabel 2.1. Zona Subduksi Jawa

Index	Structure name	Segment	Dip	L
1	2	3	4	5
M8	Java Megathrust	Jawa Barat (JB)	USGS Slab 1.0 Model	280
M9	Java Megathrust	Jawa Tengah (JT)		280
M10	Java Megathrust	Jawa Timur (JTM)		280
M6-7	Java Megathrust	Enggano-SS		540
M6-7-8	Java Megathrust	Enggano-SS-JB		820
M8-9-10	Java Megathrust	JT-JTM		560
M6-7-8-9-10	Java Megathrust	SS-JB-JT-JTM		1130
M11	Java Megathrust	Bali		460
M12	Java Megathrust	NTB		430
M13	Java Megathrust	NTT		540



Gambar 2.1 *Megathrust Jawa*

Sisi selatan Provinsi Jawa Tengah berhadapan dengan Samudera Hindia yang sekaligus menjadi pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, sehingga bencana gempa dan Tsunami yang terjadi akibat pelepasan energi seperti yang sudah dijelaskan diatas dapat berimbas pada pantai dan daratan Provinsi Jawa Tengah.

Penilaian ancaman/bahaya dari beberapa jenis ancaman/bahaya dapat juga dilakukan dengan memberikan nilai berdasarkan probabilitas (P) ancaman kejadian dan dampak yang ditimbulkan. Penentuan skala probabilitas berdasarkan pada prediksi waktu kemungkinan terjadinya suatu bencana di saat penilaian bahaya dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai 4, begitu juga dengan dampak kerugian. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.2. Skala Probabilitas

Skala	Keterangan
1	2
Skala 1	Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu diatas 5 tahun kedepan.
Skala 2	Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu 1-5 tahun kedepan.
Skala 3	Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu 6 bulan-1 tahun kedepan.
Skala 4	Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu sampai dengan 6 bulan kedepan.

Tabel 2.3 Skala Dampak Kerugian

Skala	Keterangan
1	2
Skala 1	Ringan (10-30% wilayah hancur)
Skala 2	Sedang (30-50% wilayah hancur)

Skala 3	Parah (50-80% wilayah hancur)
Skala 4	Sangat Parah (80-99% wilayah hancur)

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana
BNPB

Mendasarkan pada Rencana Kontinjensi Tsunami tahun 2018 Kabupaten Cilacap (hal 14), Kebumen (hal 20), Purworejo (hal 23), Wonogiri (hal 29) menunjukkan bahwa gempa dan tsunami masuk dalam skala probabilitas dan dampak yang tinggi.

B. Penentuan Kejadian

Mendasarkan pada hasil penilaian bahaya dapat diketahui bahwa bencana Tsunami, tanah longsor, banjir dan angin kencang/angin puting beliung merupakan bencana utama di Provinsi Jawa Tengah. Sementara Gempa Bumi dan Tsunami merupakan ancaman bencana dengan potensi dampak terbesar, termasuk potensi banyaknya jumlah korban. Hal inilah yang menjadi pertimbangan perlunya melakukan pemutakhiran Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami.

BAB III

PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN

DAN SKENARIO DAMPAK BENCANA

A. Pengembangan Skenario Kejadian Bencana

Berdasarkan kajian risiko bencana gempa dan tsunami yang dilakukan oleh Pusat Studi Gempa Nasional sebagaimana dipaparkan di atas dan sosialisasi dari BMKG Stasiun Geofisika Kelas III Banjarnegara, pada tanggal 26 Februari 2018 di Mexolie Hotel Kebumen, skenario kejadian Gempa Bumi dan Tsunami untuk perencanaan kontinjensi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Kronologis Kejadian Gempa dan Tsunami

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
1	Kekuatan gempa sebagai pemicu	M 8.8
2	Lokasi	10.23 S-110.39 E
3	Kedalaman	17 km
4	Jarak	a. Kabupaten Cilacap 311.60 km dari pesisir selatan Kabupaten Cilacap b. Kabupaten Kebumen -/+ 268 km dari pesisir selatan Kabupaten Kebumen c. Kabupaten Purworejo 269.79 km dari pesisir selatan Kabupaten Purworejo d. Kabupaten Wonogiri 229.36 km dari pesisir selatan Kabupaten Wonogiri
5	Gelombang Tsunami	1. Kabupaten Cilacap Mencapai pantai pesisir selatan Kabupaten Cilacap dalam 36 menit dengan ketinggian 8.5 meter 2. Kabupaten Kebumen Mencapai pantai pesisir selatan Kabupaten Kebumen dalam -/+ 30 menit denganketinggian -/+ 12 meter 3. Kabupaten Purworejo Mencapai pantai pesisir selatan Kabupaten Purworejo dalam 32 menit dengan ketinggian 17.1 meter 4. Kabupaten Wonogiri Mencapai pantai pesisir selatan Kabupaten

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
		Wonogiri dalam 24 menit dengan ketinggian 31,03 meter
6	Waktu kejadian Gempa Bumi dan Tsunami	dd,mm,yy pukul 10.00 WIB
7	Potensi luas genangan	409.73 km ²
8	Durasi waktu Tsunami	±1 jam
9	Dampak kejadian Gempa Bumi dan Tsunami	Korban jiwa (meninggal, luka, trauma), hancurnya sarana prasarana akibat Gempa Bumi dan Tsunami di daerah pantai. Di dataran yang lebih tinggi hanya terdampak akibat Gempa Bumi saja.

B. Skenario Dampak

1. Dampak Aspek Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan salah satu aspek yang akan terdampak apabila terjadi gempa dan Tsunami. Setidaknya ada 134 desa di 23 kecamatan di sepanjang pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah akan terkena dampak langsung Gempa Bumi dan Tsunami, sementara 32 Kecamatan lainnya juga akan terkena dampak gempa walaupun tidak terkena dampak Tsunami. Berikut ini daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berisiko terkena bencana gempa dan atau Tsunami sebagaimana terangkum dalam tabel.

a. Kabupaten Cilacap

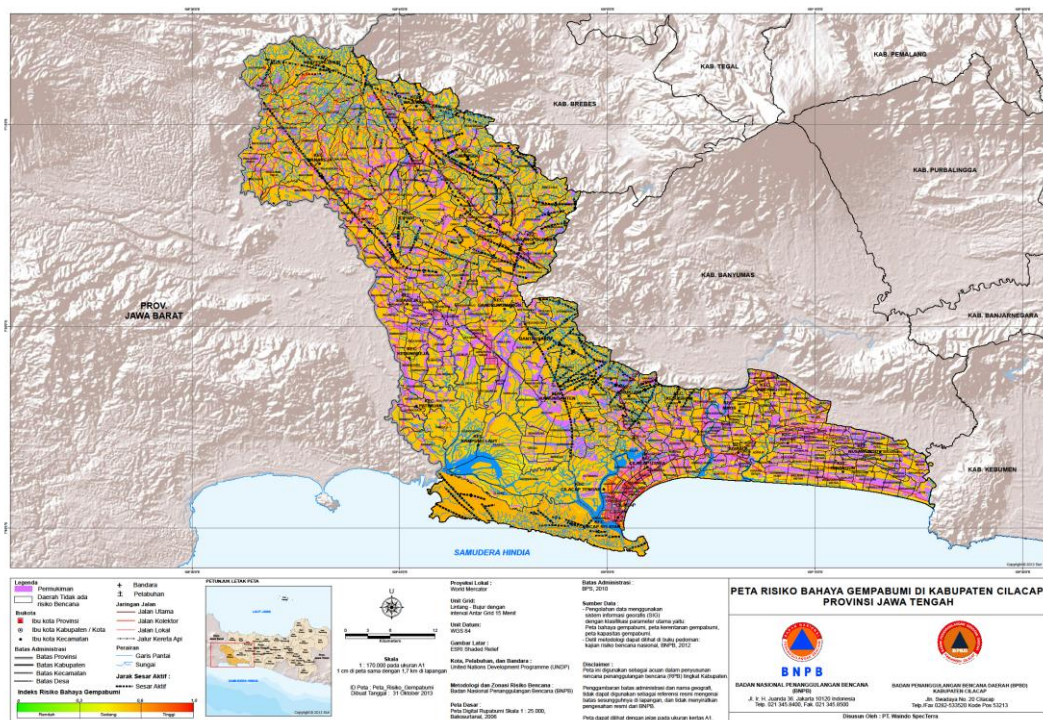
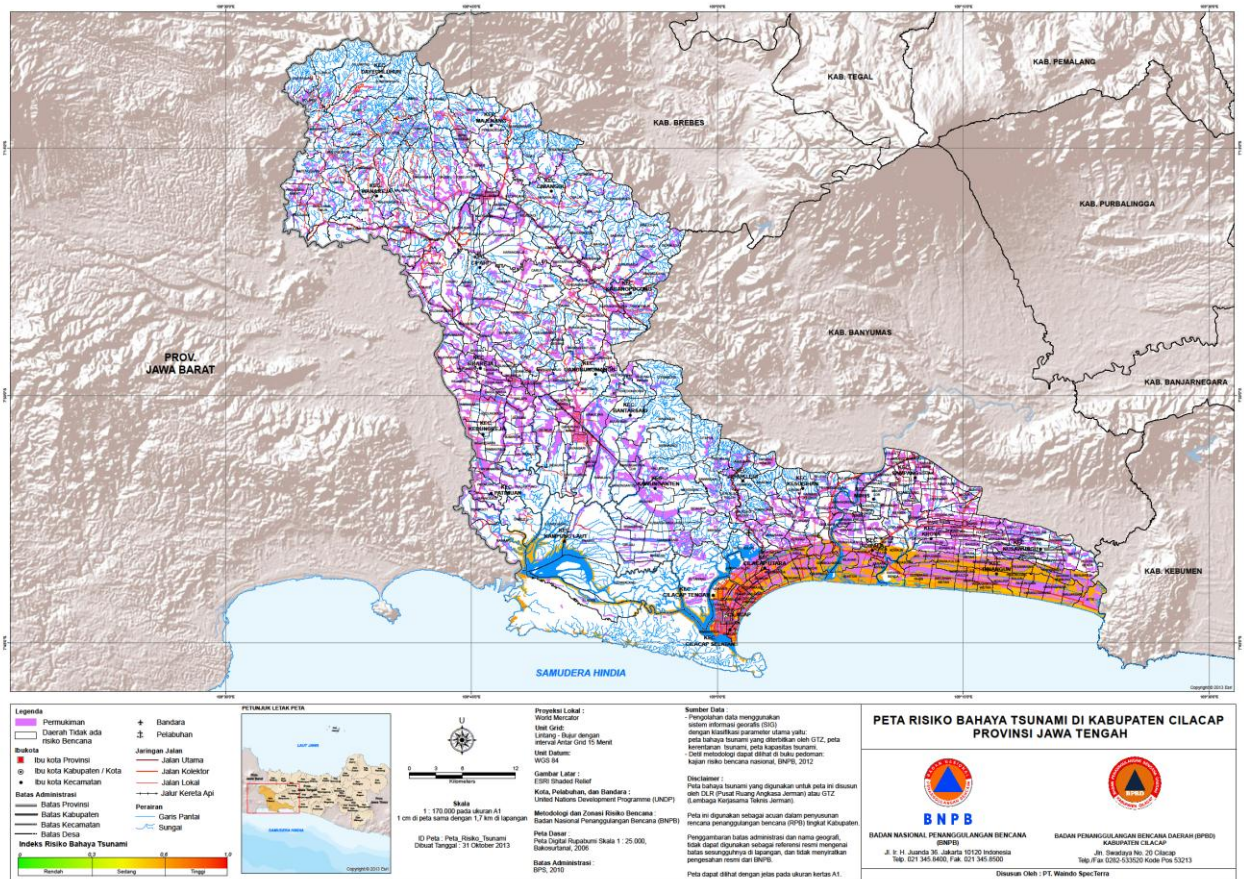
Tabel 3.2. Asumsi Dampak Tsunami dan Gempa Bumi Pada Aspek Kependudukan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			Perkiraan Penambahan Penduduk di Siang Hari		Jumlah Total Penduduk di Siang Hari	Jiwa Terancam		Meninggal		Hilang		Pindah/ Tetap di Rumah		Pengungsi	Keadaan Pengungsi				
																	Luka Ringan		Luka Berat		Non Perawatan
		Laki-laki	Perempuan	Total	%	Jmlh		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah		%	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Patimuan	23,167	23,311	46,478		-	46,478	100%	46,478	7%	3,253	4%	1,859	0%	-	41,365	7%	3,253	2%	827	37,285
2	Kawunganten	40,063	41,372	81,435		-	81,435	50%	40,718	4%	1,629	2%	814	50%	40,718	38,274	4%	1,629	2%	765	35,880
3	Kampunglaut	8,849	8,414	17,263		-	17,263	50%	8,632	4%	345	2%	173	50%	8,632	8,114	4%	345	2%	162	7,606
4	Jeruklegi	33,731	32,740	66,471		-	66,471	80%	53,177	5%	2,659	2%	1,064	20%	13,294	49,454	5%	2,659	2%	989	45,806
5	Kesugihan	49,248	48,656	97,904		-	97,904	50%	48,952	3%	1,469	2%	979	50%	48,952	46,504	3%	1,469	2%	930	44,106
6	Adipala	39,605	39,420	79,025		-	79,025	50%	39,513	3%	1,185	2%	790	50%	39,513	37,537	3%	1,185	2%	751	35,601
7	Binangun	33,770	32,900	66,670		-	66,670	50%	33,335	3%	1,000	2%	667	50%	33,335	31,668	3%	1,000	2%	633	30,035
8	Nusawungu	39,391	38,787	78,178		-	78,178	30%	23,453	2%	469	1%	235	70%	54,725	22,750	2%	469	2%	455	21,826
9	Cilacap Selatan	37,715	38,982	76,697		-	76,697	90%	69,027	6%	4,142	3%	2,071	10%	7,670	62,815	6%	4,142	2%	1,256	57,417
10	Cilacap Tengah	42,337	42,104	84,441		-	84,441	100%	84,441	7%	5,911	4%	3,378	0%	-	75,152	7%	5,911	2%	1,503	67,739
11	Cilacap Utara	36,376	34,696	71,072		-	71,072	100%	71,072	7%	4,975	4%	2,843	0%	-	63,254	7%	4,975	2%	1,265	57,014
Jumlah Total		384,252	381,382	765,634		0	765,634		518,797		27,037		14,871		246,837	476,889		27,037		9,538	440,314

Tabel 3.3. Asumsi Jumlah Pengungsi Laki-Laki, Perempuan, Bumil, Busui, Bayi, Balita, dll

No	Kecamatan	Jumlah Pengun gsi	Laki- Laki	Perempuan				Bumil		Busui		Bayi		Balita		10-14 Tahun		15-19 Tahun		Lansia		Cacat	
				WUS		Non WUS																	
				%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Patimuan	46,478	23,167	48%	11,189	52%	12,122		-		-	2%	930	5%	2,324	8%	3,718	8%	3,718	16%	7,436	0.1%	46
2	Kawunganten	81,435	40,063	48%	19,859	52%	21,513		-		-	2%	1,629	5%	4,072	8%	6,515	8%	6,515	16%	13,030	0.1%	81
3	Kampunglaut	17,263	8,849	48%	4,039	52%	4,375		-		-	2%	345	5%	863	8%	1,381	8%	1,381	16%	2,762	0.1%	17
4	Jeruklegi	66,471	33,731	48%	15,715	52%	17,025		-		-	2%	1,329	5%	3,324	8%	5,318	8%	5,318	16%	10,635	0.1%	66
5	Kesugihan	97,904	49,248	48%	23,355	52%	25,301		-		-	2%	1,958	5%	4,895	8%	7,832	8%	7,832	16%	15,665	0.1%	98
6	Adipala	79,025	39,605	48%	18,922	52%	20,498		-		-	2%	1,581	5%	3,951	8%	6,322	8%	6,322	16%	12,644	0.1%	79
7	Binangun	66,670	33,770	48%	15,792	52%	17,108		-		-	2%	1,333	5%	3,334	8%	5,334	8%	5,334	16%	10,667	0.1%	67
8	Nusawungu	78,178	39,391	48%	18,618	52%	20,169		-		-	2%	1,564	5%	3,909	8%	6,254	8%	6,254	16%	12,508	0.1%	78
9	Cilacap Selatan	76,697	37,715	48%	18,711	52%	20,271		-		-	2%	1,534	5%	3,835	8%	6,136	8%	6,136	16%	12,272	0.1%	77
10	Cilacap Tengah	84,441	42,337	48%	20,210	52%	21,894		-		-	2%	1,689	5%	4,222	8%	6,755	8%	6,755	16%	13,511	0.1%	84
11	Cilacap Utara	71,072	36,376	48%	16,654	52%	18,042		-		-	2%	1,421	5%	3,554	8%	5,686	8%	5,686	16%	11,372	0.1%	71
Jumlah Total		765,634	384,252		183,063		198,319		-		-		15,313		38,282		61,251		61,251		122,501		766

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2017 (diolah)



b. Kabupaten Kebumen

Tabel 3.4. Asumsi Dampak Pada Aspek Kependudukan Bencana Tsunami di Kabupaten Kebumen

NO	KECAMATAN/KELURAHAN		JML PENDUDUK	TERANCAM		LUKA- LUKA	SAKIT	MENGUNGGI	MENINGGAL	KELOMPOK RENTAN								
	KECAMATAN	DESA		JAWA	%	JAWA	JAWA	JAWA	JAWA	BALITA		ANAK-ANAK		ORANG TUA		IBU HAMIL	DISABILE	
						5%	10%	50%	1%	L	P	L	P	L	P		L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	AYAH	Candirenggo	5.930	650	9	32	64	320	6									
2	AYAH	Ayah	1.812	1.030	57	51	103	515	10	23	36	93	73	6	7			
3	AYAH	Argopani	3.963	688	17	35	69	344	6	56	70	72	82	4	5			
4	AYAH	Karangduwur	4.845	317	7	15	31	158	3	157	165	321	306	167	158			
5	AYAH	Sraih	3.374							154	134	218	180	96	109			
6	AYAH	Pasir	3.165	317	10	15	31	158	3	17	15	25	24	17	13			
7	BUAYAN	Jadri	3.610	1.001	28	25	50	500	10	32	36	39	34	18	20			
8	BUAYAN	Karangbelong	2.683	99	4	5	10	50	1	7	2	21	15	4	5		1	
9	PURING	Tambakmuljo	5.994	5.994	100	299	598	2.990	60	223	205	604	608	113	108			
10	PURING	Surenjan	4.317	4.317	100	216	431	2.155	43	62	75	390	375	19	21			
11	PURING	Wahyorejo	4.482	4.482	100	224	448	2.240	44	45	43	107	81	24	26			
12	PURING	Sidoharjo	1.448	1.448	100	72	145	724	14	56	55	157	124	59	62			
13	PETANAHAN	Karangreja	4.734	4.403	93	220	440	2.201	44	240	232	511	493	99	100		65	
14	PETANAHAN	Karanggedung	2.668	3.533	132	176	353	1.766	26	75	76	360	376	50	51		30	
15	PETANAHAN	Tegalretno	2.191	254	12	12	25	127	2	7	9	23	24	4	7		3	
16	KLERONG	Jogesima	3.533	1.500	42	75	150	750	15	127	139	258	243	50	39	23	4	
17	KLERONG	Tanggulangin	3.648	2.648	27	132	264	1.324	26	103	109	337	392	78	76	26	1	
18	BULUSPESANTREN	Ayamputih	5.409	5.409	100	270	541	2.704	54	125	132	149	167	110	112		67	
19	BULUSPESANTREN	Setrajeneer	2.217	5.745	259	287	574	2.872	57	107	110	201	200	39	34			
20	BULUSPESANTREN	Bescong	5.745	5.745	100	287	574	2.872	57	346	310	467	527	8	172		4	
21	AM BAL	Ertak	2.065	1.549	75	103	206	1.032	20	67	60	196	167	39	36			
22	AMBAL	Kencayajayan	1.593	750	47	37	75	375	7	29	30	66	53	13	10		18	
23	AMBAL	Ambahraeni	4.475	1.611	36	223	447	2.237	44	80	85	138	170	77	79		85	
24	AMBAL	Petangkusan	2.055	1.278	62	28	56	279	6	36		115	30	21	18		3	
25	AMBAL	Kalben	2.734	607	22	24	50	253	5	28	30	31	36	10	6		6	
26	AMBAL	Sumberjati	1.935	871	45	97	193	967	19	30	65	75	80	15	24	4		
27	MIRIT	Miritpetikusan	1.771	1.327	75	66	133	663	13	44	46	200	199	28	26		50	
28	MIRIT	Tlogodepek	2.880	2.310	80	115	231	1.155	23	90	73	217	202	42	45		22	
29	MIRIT	Miris	2.015							63	53	142	128	51	53			
30	MIRIT	Tlogopragoto	2.244							60	59	158	142	36	41			
31	MIRIT	Lembupurno	4.188							157	130	307	277	125	127			
32	MIRIT	Wismartan	2.100	318	15	16	31	159	3	17	15	48	39	2	3			
33	MIRIT	Rosa	1.915	203	10	96	191	957	19	67	81	162	146	24	39		57	
JUMLAH			107.728	60.404	1.765	3.253	6.514	32.847	640	2.750	2.660	6.168	5.993	1.448	1.632	53	416	40

c. Kabupaten Purworejo

Tabel 3.5. Asumsi Dampak Tsunami Pada Aspek Kependudukan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Perkiraan Penambahan Penduduk di Siang Hari		Jumlah Total Penduduk di Siang Hari	Jiwa Terancam		Meninggal		Hilang		Pindah/ Tetap di Rumah		Pengungsi	Keadaan Pengungsi				
			%	Jumlah		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah		Luka Ringan	Luka Berat		Non Perawatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kec. Grabag																			
1	Kertojoyan	745		-	745	100%	745	7%	52	4%	30	0%	-	663	7%	52	2%	13	598
2	Ukirsari	904		-	904	50%	452	4%	18	2%	9	50%	452	425	4%	18	2%	8	398
3	Pasaranom	1,841		-	1,841	50%	921	4%	37	2%	18	50%	921	865	4%	37	2%	17	811
4	Munggangsari	1,407		-	1,407	80%	1,126	5%	56	2%	23	20%	281	1,047	5%	56	2%	21	970
5	Ketawangrejo	3,660		-	3,660	50%	1,830	3%	55	2%	37	50%	1,830	1,739	3%	55	2%	35	1,649
6	Patutrejo	2,112		-	2,112	50%	1,056	3%	32	2%	21	50%	1,056	1,003	3%	32	2%	20	951
7	Harjobinangun	2,354		-	2,354	50%	1,177	3%	35	2%	24	50%	1,177	1,118	3%	35	2%	22	1,060
8	Sumberagung	2,320		-	2,320	30%	696	2%	14	1%	7	70%	1,624	675	2%	14	2%	14	648
Jumlah		15,343	-	-	15,343		8,002		299		168		7,341	7,535		299		151	7,085
Kec. Ngombol																			
1	Keburuhan	891		-	891	90%	802	6%	48	3%	24	10%	89	730	6%	48	2%	15	667
2	Depok Rejo	424		-	424	100%	424	7%	30	4%	17	0%	-	377	7%	30	2%	8	340
3	Malang	678		-	678	100%	678	7%	47	4%	27	0%	-	603	7%	47	2%	12	544
4	Pagak	637		-	637	95%	605	6%	36	3%	18	5%	32	551	6%	36	2%	11	503
5	Wero	422		-	422	85%	359	4%	14	3%	11	15%	63	334	4%	14	2%	7	313
6	Kupul Sari	607		-	607	20%	121	1%	1	1%	1	80%	486	119	1%	1	2%	2	115
7	Kesidan	547		-	547	50%	274	4%	11	2%	5	50%	274	257	4%	11	2%	5	241
8	Pejagran	614		-	614	60%	368	4%	15	3%	11	40%	246	343	4%	15	2%	7	321
9	Wonosari	1,654		-	1,654	70%	1,158	5%	58	3%	35	30%	496	1,065	5%	58	2%	21	986
10	Wonosri	1,087		-	1,087	100%	1,087	7%	76	4%	43	0%	-	967	7%	76	2%	19	872
11	Rasukan	340		-	340	100%	340	7%	24	4%	14	0%	-	303	7%	24	2%	6	273
12	Laban	406		-	406	100%	406	7%	28	4%	16	0%	-	361	7%	28	2%	7	326
13	Wasiat	1,169		-	1,169	70%	818	5%	41	3%	25	30%	351	753	5%	41	2%	15	697
14	Ngombol	746		-	746	80%	597	5%	30	3%	18	20%	149	549	5%	30	2%	11	508
15	Tunjungan	602		-	602	95%	572	6%	34	3%	17	5%	30	520	6%	34	2%	10	476
16	Ringgit	645		-	645	50%	323	4%	13	2%	6	50%	323	303	4%	13	2%	6	284
17	Karangtalun	447		-	447	60%	268	4%	11	3%	8	40%	179	249	4%	11	2%	5	234
18	Briyan	388		-	388	40%	155	3%	5	2%	3	60%	233	147	3%	5	2%	3	140

Tabel 3.6. Asumsi Jumlah Pengungsi Laki-laki, Perempuan, Bumil, Busui, Bayi, Balita, dll Pada Bencana Tsunami

No	Kecamatan	Jumlah Pengungsi	Laki-Laki		Perempuan				Bumil		Busui		Bayi		Balita		10-14 Tahun		15-19 Tahun		Lansia		Cacat	
					WUS		Non WUS																	
			%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Grabag	7,535	50%	3,731	24%	1,808	26%	1,997		-		-	2%	151	7%	527	8%	3542	8%	3,431	18%	7,989	1%	75
2	Ngombol	9,251	50%	4,599	24%	2,220	26%	2,452		-		-	2%	185	8%	740	8%	2429	7%	2,246	19%	6,033	1%	93
3	Purwodadi	10,790	50%	5,353	24%	2,590	26%	2,859		-		-	2%	216	7%	755	8%	3,020	8%	2,936	18%	6,555	1%	108
Jumlah Total		27,576		13,683		6,618		7,307	-	-	-	-	0	552		2,023		8,991		8,613		20,577		276

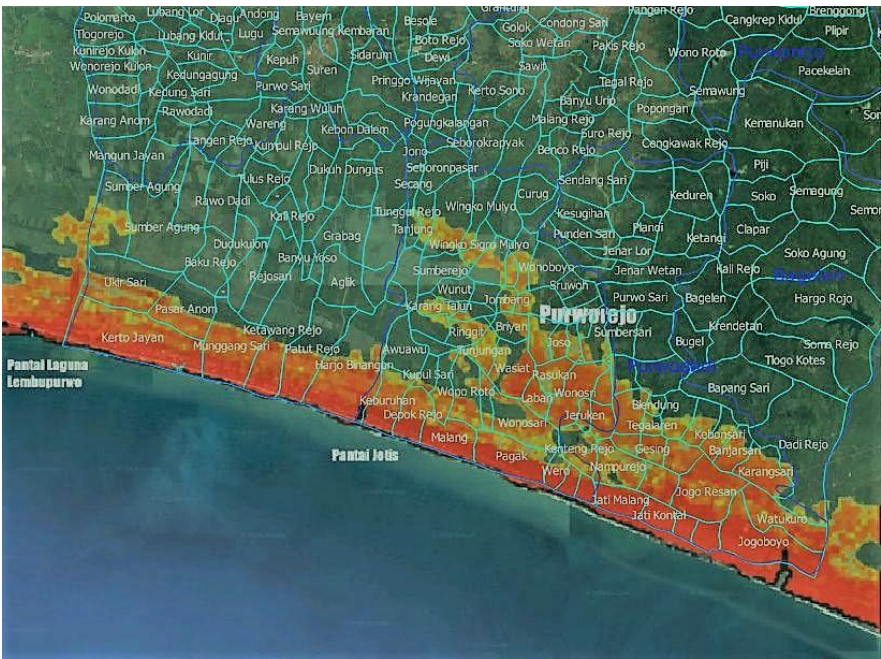
Tabel 3.7. Asumsi Dampak Gempa Pada Aspek Kependudukan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Perkiraan Penambahan Penduduk di Siang Hari		Jumlah Total Penduduk di Siang Hari	Jiwa Terancam		Meninggal		Hilang		Tetap Tinggal di Rumah		Pengungsi	Keadaan Pengungsi				
															Luka Ringan		Luka Berat		Non Perawatan
			%	Jumlah		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah		%	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Grabag	35,689	0%	-	35,689	100%	35,689	4%	1,428	0%	-	75%	26,767	7,495	10%	749	7%	525	6,221
2	Ngombol	21,432	0%	-	21,432	100%	21,432	4%	857	0%	-	75%	16,074	4,501	10%	450	7%	315	3,736
3	Purwodadi	25,352	0%	-	25,352	100%	25,352	4%	1,014	0%	-	75%	19,014	5,324	10%	532	7%	373	4,419
4	Bagelen	29,420	0%	-	29,420	100%	29,420	4%	1,177	0%	-	75%	22,065	6,178	10%	618	7%	432	5,128
5	Kaligesing	29,829	0%	-	29,829	100%	29,829	4%	1,193	0%	-	75%	22,372	6,264	10%	626	7%	438	5,199
6	Purworejo	84,966	0%	-	84,966	100%	84,966	4%	3,399	0%	-	75%	63,725	17,843	10%	1,784	7%	1,249	14,810
7	Banyuurip	40,981	0%	-	40,981	100%	40,981	4%	1,639	0%	-	75%	30,736	8,606	10%	861	7%	602	7,143
8	Bayan	46,774	0%	-	46,774	100%	46,774	4%	1,871	0%	-	75%	35,081	9,823	10%	982	7%	688	8,153
9	Kutoarjo	59,618	0%	-	59,618	100%	59,618	4%	2,385	0%	-	75%	44,714	12,520	10%	1,252	7%	876	10,391
10	Butuh	39,749	0%	-	39,749	100%	39,749	3%	1,192	0%	-	75%	29,812	8,745	10%	874	7%	612	7,258
11	Pituruh	46,799	0%	-	46,799	100%	46,799	3%	1,404	0%	-	75%	35,099	10,296	10%	1,030	7%	721	8,545
12	Kemiri	51,865	0%	-	51,865	100%	51,865	3%	1,556	0%	-	75%	38,899	11,410	10%	1,141	7%	799	9,471
13	Bruno	44,346	0%	-	44,346	100%	44,346	3%	1,330	0%	-	75%	33,260	9,756	10%	976	7%	683	8,098
14	Gebang	40,817	0%	-	40,817	100%	40,817	3%	1,225	0%	-	75%	30,613	8,980	10%	898	7%	629	7,453
15	Loano	35,401	0%	-	35,401	100%	35,401	3%	1,062	0%	-	75%	26,551	7,788	10%	779	7%	545	6,464
16	Bener	49,551	0%	-	49,551	100%	49,551	3%	1,487	0%	-	75%	37,163	10,901	10%	1,090	7%	763	9,048
Jumlah		682,589	-	-	682,589		682,589		24,218	-	-		511,942	146,429		14,643		10,250	121,536

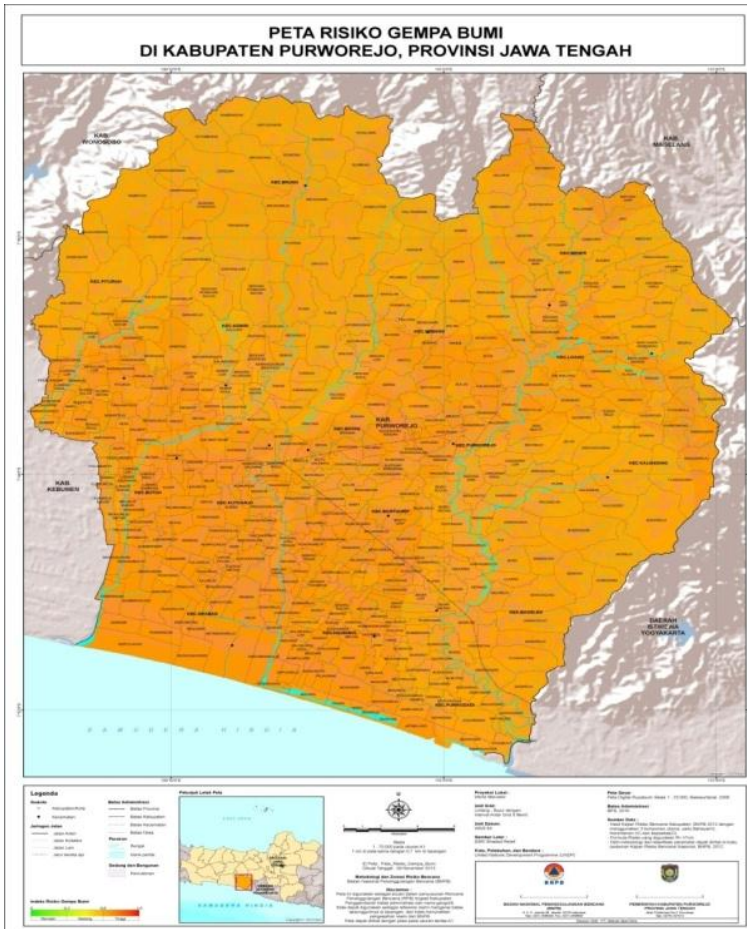
Tabel 3.8. Asumsi Jumlah Pengungsi Laki-laki, Perempuan, Bumil, Busui, Bayi, Balita, dll

No	Kecamatan	Jumlah Pengungsi	Laki-Laki		Perempuan				Bumil		Busui		Bayi		Balita		10-14 Tahun		15-19 Tahun		Lansia		Cacat	
					WUS		Non WUS																	
			%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Grabag	7,495	50%	3,711	24%	1,799	26%	1,986		-		-	2%	150	5%	375	8%	3542	8%	3,431	18%	7,989	1%	75
2	Ngombol	4,501	50%	2,237	24%	1,080	26%	1,193		-		-	2%	90	6%	270	8%	2429	7%	2,246	19%	6,033	1%	45
3	Purwodadi	5,324	50%	2,641	24%	1,278	26%	1,411		-		-	2%	106	5%	266	8%	3,020	8%	2,936	18%	6,555	1%	53
4	Bagelen	6,178	49%	3,041	24%	1,481	27%	1,670		-		-	2%	124	4%	247	7%	2,177	7%	2,170	21%	6,128	0.5%	31
5	Kaligesing	6,264	50%	3,108	24%	1,472	26%	1,660		-		-	2%	125	5%	313	7%	2,207	6%	1,876	18%	5,475	0.5%	31
6	Purworejo	17,843	49%	8,724	24%	4,277	27%	4,823		-		-	2%	357	5%	892	8%	6,473	10%	8,239	13%	11,311	0.5%	89
7	Banyuwirip	8,606	49%	4,211	24%	2,063	27%	2,326		-		-	2%	172	5%	430	8%	3,337	8%	3,387	17%	7,025	0.5%	43
8	Bayan	9,823	49%	4,794	24%	2,355	27%	2,655		-		-	2%	196	5%	491	8%	3,847	8%	3,747	16%	7,713	0.5%	49
9	Kutoarjo	12,520	50%	6,213	23%	2,942	27%	3,318		-		-	2%	250	5%	626	8%	4,909	8%	4,976	16%	9,367	0.5%	63
10	Butuh	8,745	49%	4,279	24%	2,096	27%	2,364		-		-	2%	175	5%	437	8%	3,221	8%	3,002	19%	7,704	0.5%	44
11	Pituruh	10,296	49%	5,060	24%	2,468	27%	2,783		-		-	2%	206	5%	515	9%	4,132	8%	3,887	13%	5,866	0.5%	51
12	Kemiri	11,410	50%	5,650	23%	2,681	27%	3,081		-		-	1%	114	3%	342	8%	4,145	7%	3,755	16%	8,456	0.5%	57
13	Bruno	9,756	50%	4,854	23%	2,293	27%	2,585		-		-	3%	293	6%	585	10%	4,442	7%	3,299	12%	5,167	0.5%	49
14	Gebang	8,980	49%	4,423	24%	2,152	27%	2,427		-		-	2%	180	5%	449	10%	3,978	10%	4,249	11%	4,678	0.5%	45
15	Loano	7,788	50%	3,872	23%	1,830	27%	2,103		-		-	2%	156	5%	389	8%	2,902	8%	2,968	15%	5,308	0.5%	39
16	Bener	10,901	49%	5,381	24%	2,613	27%	2,947		-		-	2%	218	6%	654	9%	4,298	7%	3,664	11%	5,476	0.5%	55
Jumlah Total		146,429		72,198		34,880		39,331	-	-	-	-		2,912		7,283		59,059		57,832		110,251		819

Sumber : Peta BMKG dan Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2017 diolah (2018)



Gambar 3.4. Peta Risiko Tsunami Kabupaten Purworejo



Gambar 3.5. Peta Risiko Gempa Bumi Kabupaten Purworejo

d. Kabupaten Wonogiri

Tabel 3.9. Asumsi Dampak Tsunami Pada Aspek Kependudukan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Perkiraan Penambahan Penduduk di Siang Hari		Jumlah Total Penduduk di Siang Hari	Jiwa Terancam		Meninggal		Hilang		Pindah/Tetap di Rumah		Pengungsi	Keadaan Pengungsi				
			%	Jumlah		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	Luka Ringan			Luka Berat		Non Perawatan		
												%	Jumlah		%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PARANGGUPITO	2353		60	2413		60		0		10		0			10		10	0
2	GUDANGHARJO	1489		5	1494		6		0		6		0			0		0	0
3	GUNTURHARJO	2993		70	3063		100		18		23		0			10		9	0
4	GENDAYAKAN	1845		5	1 849		0		0		0		0			0		0	0
5	SAMBIHARJO	1869		4	1873		0		0		0		0			0		0	0
6	KETOS	2126		5	2 131		0		0		0		0			0		0	0
7	SONGBLEDEG	2258		6	2 264		0		0		0		0			0		0	0
8	JOHUNUT	1874		5	1 879		0		0		0		0			0		0	0
	JUMLAH	16807		160	8843		166		18		39		0			20		19	0

Tabel 3.10. Asumsi Jumlah Pengungsi Laki-laki, Perempuan, Bumil, Busui, Bayi, Balita, dll Pada Bencana Tsunami

No	Kecamatan	Jumlah Pengungsi	Laki-laki		Perempuan				Bumil		Busui		Bayi		Balita		6 - 9 Tahun		10 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		19 - 59 Tahun		Lansia		Cacat	
					WUS		Non WUS																					
			%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21			22	23	24	25
1	PARANGGUPITO	57		27		23		7		2		3		3		5		3		4		11		20		15		1
	JUMLAH	57		27		23		7		2		3		3		5		3		4		11		20		15		1

Tabel 3.11. Asumsi Dampak Gempa Pada Aspek Kependudukan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Perkiraan Penambahan Penduduk di Siang Hari		Jumlah Total Penduduk di Siang Hari	Jiwa Terancam		Meninggal		Hilang		Pindah/Tetap di Rumah		Pengungsi	Keadaan Pengungsi				
			%	Jumlah		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah		%	Jumlah	%	Jumlah	Non Perawatan
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Paranggupito	16807		160	16967		10113		153		2521,1		6701	8404	9,2	769	16,5	1384	6251
2	Giritontro	19605		25	19630		5431		28		0		14171	9803	1,4	141	2,6	254	9408
3	Giriwoyo	36477		21	36498		4671		26		0		31801	18239	0,7	128	1,3	230	17881
4	Pracimantoro	61465		112	61577		4354		26		0		57197	30732	0,4	128	0,8	231	30373
5	Baturetno	45486		57	45543		3252		10		0		42281	22741	0,2	51	0,4	92	22598
6	Eromoko	41329		26	41355		3215		10		0		38130	20664	0,2	51	0,4	92	20521
7	Manyaran	35064		18	35082		1442		3		0		33637	17532	0,1	13	0,1	23	17496
	JUMLAH	256233		419	256652		32478		256		2521,1		223918	128115		1281		2306	124528

Tabel 3.12. Asumsi Jumlah Pengungsi Laki-laki, Perempuan, Bumil, Busui, Bayi, Balita, dll

No	Kecamatan	Jumlah Pengungsi	Laki-laki		Perempuan				Bumil		Busui		Bayi		Balita		10 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		Lansia		Cacat	
					WUS		Non WUS																	
			%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Paranggupito	8404	47%	3969		2218		2217		333		444		444		370		609		611		2561		214
2	Giritontro	9803	47%	4571		2616		2616		392		523		523		431		711		713		2987		312
3	Giriwoyo	18239	47%	8652		4794		4793		719		959		959		803		1322		1326		5557		457
4	Pracimantoro	30732	47%	14597		8068		8067		1210		1614		1614		1352		2228		2234		9364		898
5	Baturetno	22741	48%	11011		5865		5865		880		1173		1173		1001		1649		1653		6929		527
6	Eromoko	20664	48%	9907		5379		5378		807		1076		1076		909		1498		1502		6296		438
7	Manyaran	17532	48%	8483		4525		4524		679		905		905		771		1271		1275		5342		357
	JUMLAH	128115		61190		33465		33460		5020		6694		6694		5637		9288		9314		39036		3203

Sumber : Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2017 diolah (2018)



Gambar 3.6. Peta Risiko Gempa Bumi Kabupaten Wonogiri

2. Dampak Aspek Sarana dan Prasarana

Selain berdampak pada aspek kependudukan, bencana gempa dan Tsunami besar kemungkinan juga akan mengakibatkan kerusakan pada sarana prasarana yang berakibat pada terganggunya fungsi layanan yang biasanya digunakan masyarakat. Jumlah serta tingkat kerusakan sarana prasarana serta lamanya gangguan yang terjadi bisa diperkirakan pada tabel berikut.

Tabel 3.13.Dampak Bencana Tsunami pada Sarana Prasarana

No	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
1	2	3	4	5
A	Sarana dan Prasarana			
1	Jaringan listrik	53	66	5
2	Air (sumur, sumber air lain)	784	1.927	30-90
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan	327	357	7
	- Jembatan	30	127	30
	- Bandara	-	-	-
	- Pelabuhan	4	4	30
	- Terminal	2	2	7
4	Sarana komunikasi			
	- BTS	32	34	7
	- Jaringan telepon, dll	10	17	14
5	Rumah sakit	3	4	7
6	Puskesmas	6	11	7
B	Fasilitas Umum			

No	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
1	2	3	4	5
1	Sekolah - TK/PAUD - SD - SMP - SMA	14 8 8 7	23 89 13 7	90 90 90 90
2	Kantor pemerintahan	53	78	90
3	Pos Angkatan Laut	-	2	90
4	SPBU	10	19	-
5	Tempat Ibadah	300	2.538	90
6	Tempat Pelelangan Ikan	-	11	90
7	Lain – lain (Pertamina, Telkom, Holcim, PLTU, PLN, PDAM, Perbankan)	-	42	90

3. Dampak Aspek Sosial Ekonomi

Berikut uraian perkiraan dampak bencana Tsunami pada aspek ekonomi.

Tabel 3.14. Dampak Bencana Tsunami pada Aspek Ekonomi.

No	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi (Hari)
		Ringan	Berat	
1	2	3	4	5
1	Pasar tradisional	11unit	41 unit	30
2	Warung	24 unit	338 unit	30
3	Perahu/Kapal	1.390 unit	1.479 unit	30
4	Lahan Sawah	165 ha	5.671 ha	30
5	Tegalan/kebun	306 ha	9.866,13 ha	30
6	Tambak	166 ha	1.060 ha	30
7	Tempat Pelelangan Ikan	-	11 buah	30
8	Ternak	7.153 ekor	24.292 ekor	30
9	Industri	-	10 unit	30
10	Tempat Wisata (Pantai)	-	21 tempat	30

4. Dampak Aspek Lingkungan

Berikut uraian perkiraan dampak bencana Tsunami pada aspek lingkungan.

Tabel 3.15. Dampak Bencana Tsunami pada Aspek lingkungan

No	Jenis	Tingkat Kerusakan		Lama Gangguan Fungsi (Bulan)
		Berat	Ringan	
1	2	3	4	5
1	Pencemaran (air, udara,...dll) - Tumpahan Minyak - Tumpahan Batu Bara - Kebocoran Gas - Sumber Air	-	15 hektar 15 hektar 5 unit 4 sungai	3
2	Sawah, ladang, kebun	-	5.654,03 ha	3
3	Tambak	-	162 ha	5
4	Hutan Mangrove Hutan Alam Hutan Payau	-	46 ha 290 ha 30 km	5

BAB IV
PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN
DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT

A. Tujuan

Dalam rangka penanganan korban yang ditimbulkan oleh bencana Gempa Bumi dan Tsunami, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan tanggap darurat bencana, sebagai berikut:

1. Menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana
3. Terlindunginya kelompok rentan (lansia, ibu hamil, anak-anak, difable, dll)
4. Fungsi sarana dan prasarana vital dapat dipulihkan kembali.

B. Kebijakan

Melakukan penanganan darurat bencana Gempa Bumi dan Tsunami secara menyeluruh dan terintegrasi, dengan cakupan layanan meliputi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat korban bencana serta pemulihan fungsi sarana dan prasarana penting dengan memprioritaskan kelompok-kelompok rentan dan memperhatikan aspek aksesibilitasnya sejak hari kejadian sampai dengan 30 hari kemudian.

C. Strategi Tanggap Darurat

Adapun untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan beberapa strategi, yaitu:

1. Penetapan masa tanggap darurat selama 30 hari dengan Keputusan Gubernur.
2. Melakukan peran komunikasi, koordinasi, kolaborasi secara vertikal, horizontal, internal dan eksternal, dengan aktivitas sebagai berikut:
 - a. Pos Pendamping didirikan di Kabupaten Banyumas atau Purbalingga apabila kabupaten terdampak masih mampu melakukan penanganan darurat, dan mengambil-alih/mendirikan Pos Komando di Kabupaten Banyumas atau Purbalingga apabila Kabupaten terdampak tidak mampu lagi melaksanakan penanganan darurat.
 - b. Menyusun struktur organisasi Penanganan Darurat Bencana (PDB)
 - c. Koordinasi dan komunikasi aktif
 - d. Menyediakan akses informasi masyarakat dan media
 - e. Memberikan laporan perkembangan secara periodik

3. Mengoordinir penanganan korban terluka, meninggal dunia, dan hilang dengan melakukan pelayanan pencarian dan penyelamatan, dengan aktivitas sebagai berikut:
 - a. Pencarian
 - b. Penyelamatan
 - c. Perawatan (Pertolongan Pertama)
 - d. Evakuasi
4. Mengoordinir penanganan korban selamat (pengungsi) dengan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), termasuk kesehatan, psikososial, dan pendidikan, dengan aktivitas sebagai berikut:
 - a. Pendirian/penentuan *shelter*/penampungan darurat
 - b. Pendirian Dapur Umum
 - c. Pengelolaan logistik
 - d. Pelayanan kesehatan dan psikososial
 - e. Pendidikan darurat (sekolah darurat)
 - f. Mendirikan tempat peribadatan darurat
5. Mengoordinir Pemulihan fungsi sarana dan prasarana umum yang vital. Meliputi aktivitas sebagai berikut:
 - a. Pemulihan akses listrik
 - b. Pemulihan akses air bersih
 - c. Pemulihan akses jalan
 - d. Pembangunan jembatan darurat
 - e. Pemulihan akses telekomunikasi
6. Memastikan keamanan seluruh masyarakat dan keamanan asset, dengan aktivitas melakukan patroli keamanan yang melibatkan seluruh potensi yang ada.
7. Memastikan wargamasyarakat terdampak bencana terbebas dari kemungkinan biaya yang ditimbulkan dari pelayanan-pelayanan tersebut di atas.
8. Memobilisasi seluruh OPD, institusi pemerintah dan swasta, tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.

BAB V
PERENCANAAN SISTIM KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA

A. Penentuan Pos Komando, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul dan Tempat Pengungsian

1. Penentuan Pos Komando

a. Situasi

Apabila terjadi Tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan M 8.8, dengan luas landaan mencapai 409.73 km², setelah dilakukan kaji cepat, maka Kepala Daerah akan menetapkan status penanganan darurat bencana yang diikuti dengan pembentukan struktur organisasi sistim komando penanganan darurat bencana tsunami, yang terdiri dari Posko PDB Kabupaten, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB. Hal tersebut diikuti dengan berdirinya Pos Pendamping di tingkat Provinsi.

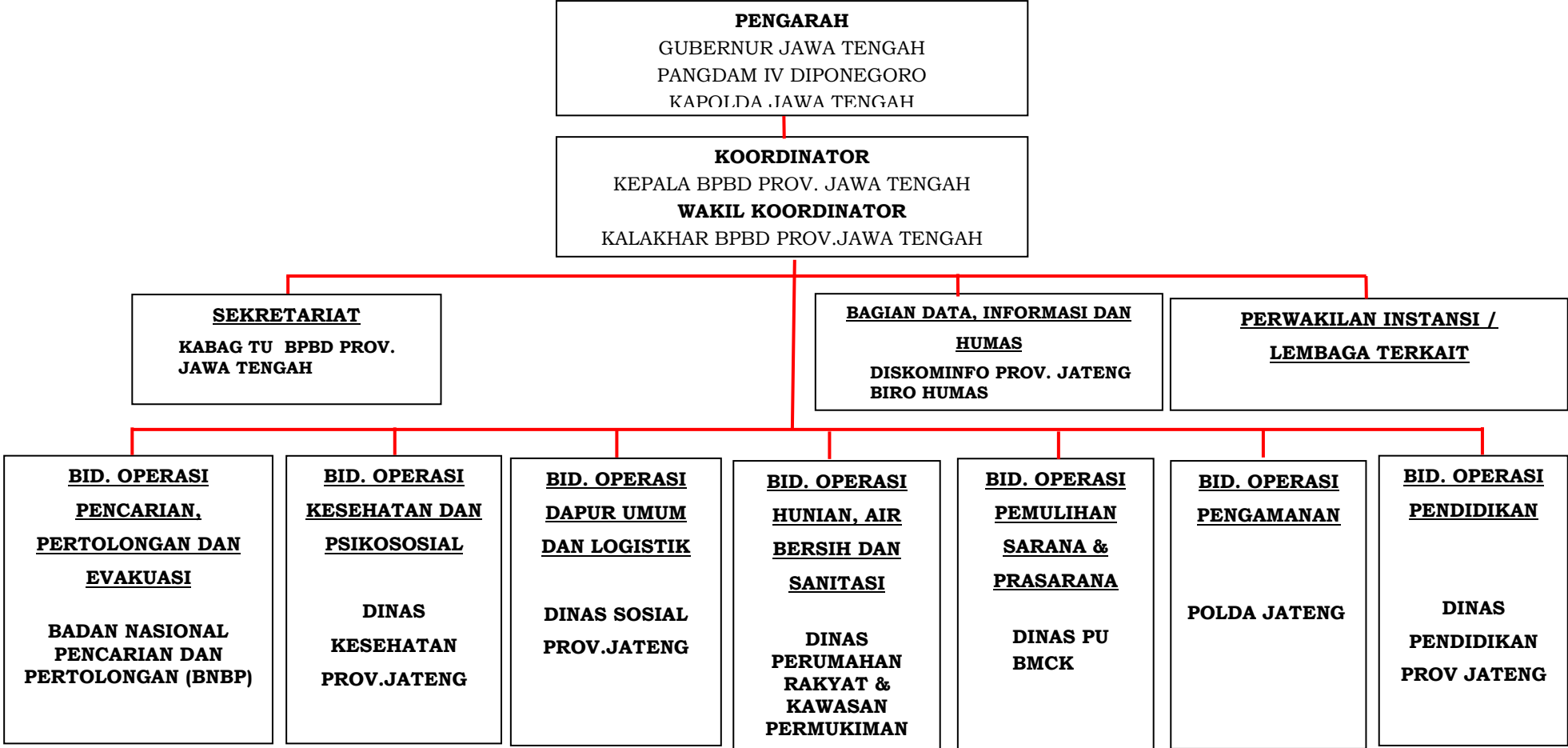
Namun apabila Pemerintah Kabupaten tidak mampu menangani keadaan darurat bencana dengan sumber daya yang tersedia, maka Kepala Daerah/Bupati akan mengajukan peningkatan status darurat bencana menjadi status darurat provinsi. Dalam situasi ini, Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten akan menjalankan fungsinya sebagai Pos Lapangan PDB sementara Pos Pendamping di Tingkat Provinsi akan beralih fungsi menjadi Pos Komando.

b. Struktur Pos Pendamping dan Pos Komando

Berikut ini struktur pos komando penanganan darurat bencana dan pos pendamping penanganan darurat bencana menurut Perka BNPB No. 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, sebagaimana gambar 5.1.

1) Pos Pendamping

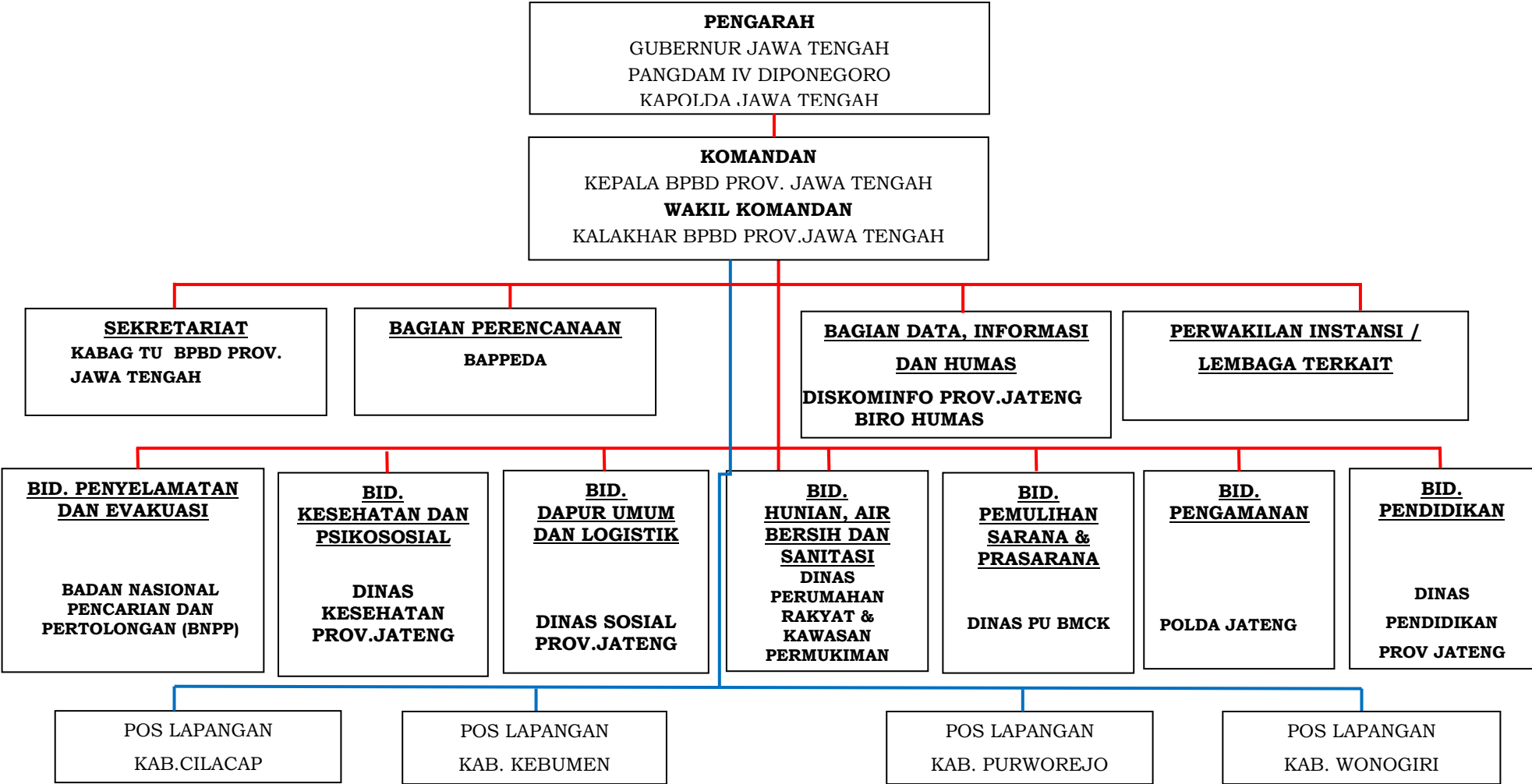
**STRUKTUR ORGANISASI POS PENDAMPINGPENANGANAN DARURAT
BENCANA TSUNAMI PROVINSI JAWA TENGAH**



Gambar 5.1. Struktur Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

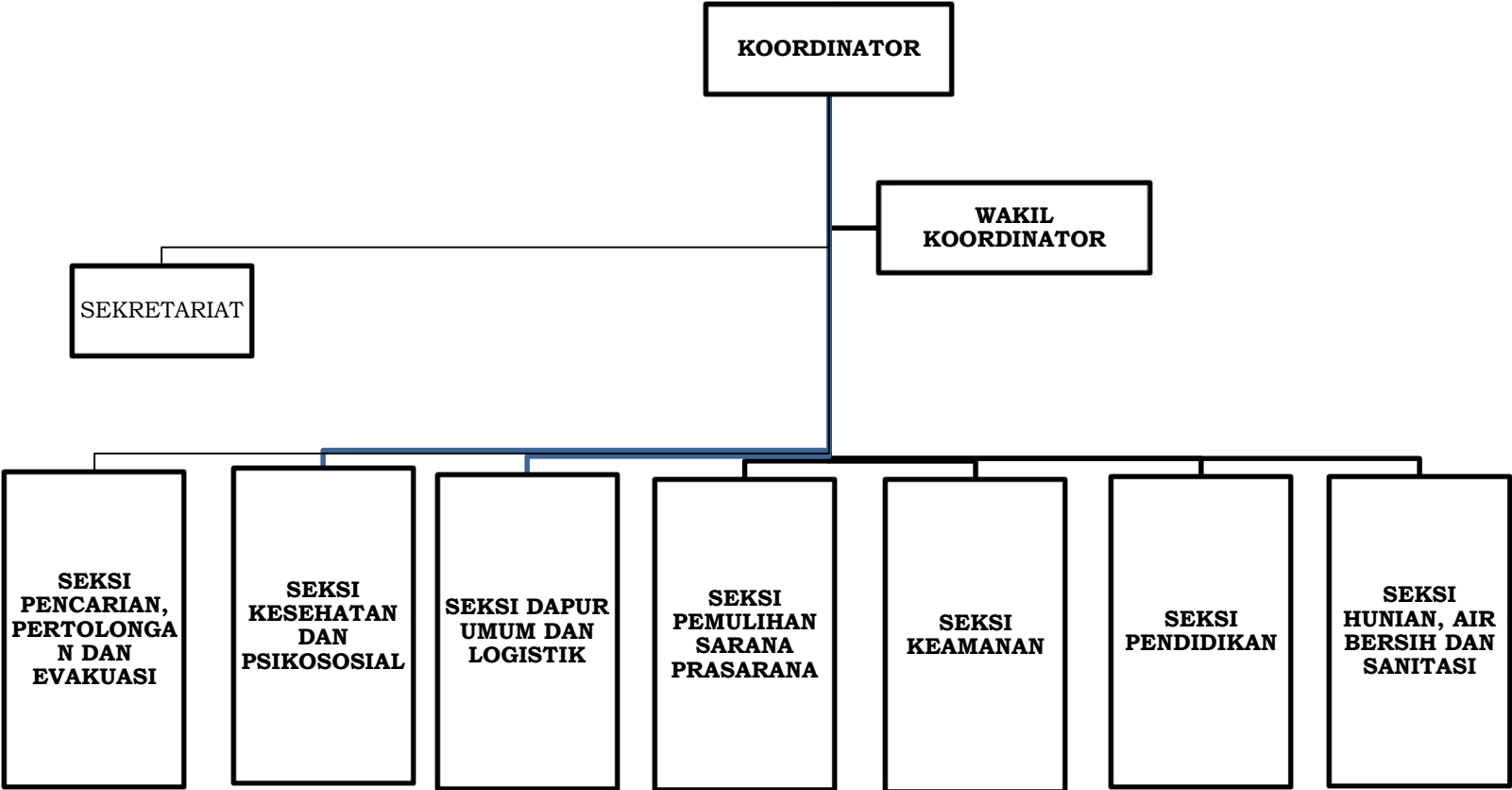
2) Pos Komando

**STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA TSUNAMI PROVINSI JAWA TENGAH**



Gambar 5.2. Struktur Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

3) Pos Lapangan



Gambar 5.3. Struktur Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

c. Kegiatan Pos Komando

Kegiatan yang dilaksanakan pada pos komando penanganan darurat bencana Tsunami, seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.1. Kegiatan Pos Komando

No	Jenis Kegiatan	Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (instansi/ Lembaga)	Waktu Pelaksanaan		Durasi
				Waktu dimulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kaji cepat serta pembentukan Tim	BPBD,TNI, POLRI, Kesbangpol, Satpol PP Damkar, Bappeda, Dinas Sosial PPPA, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Dinas PUPR, PMI, PDAM, PLN, Relawan kebencanaan, 4 Kabupaten, Kepala Desa	BPBD Prov.Jateng	H+3	H+4	
2	Pendirian Pos Komando	BPBD,TNI, POLRI, Satpol PP Damkar, Dinas Sosial PPPA, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Dinas PUPR, PMI, PDAM, PLN, relawan kebencanaan	BPBD Prov. Jateng	Maksimum 2x24 jam setelah pos komando kabupaten menyatakan ketidakanggupan	Pada saat masa penanganan darurat berakhir	30 hari
3	Memfalisitasi penyusunan rencana operasi dan menyiapkan tenaga operasional	1. BAPPEDA 2. BPBD 3. BPPKAD 4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNBP) 5. Dinkes	BPBD Prov. Jateng	Maksimum 2x24 jam setelah terjadi bencana	Pada saat masa penanganan darurat berakhir	2 hari

No	Jenis Kegiatan	Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (instansi/ Lembaga)	Waktu Pelaksanaan		Durasi
				Waktu dimulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
	termasuk menerima, menampung/mendata relawan kebencanaan	6. Dinsos PPPA 7. Disperkimtan 8. DINAS PU BMCK 9. Polri 10. Dindikpora				
4	Penggerakan dan mobilisasi sumber daya	BPBD,TNI, POLRI, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Humas, DINAS PU BMCK, PMI, PDAM, PLN, Relawan kebencanaan, Kesbangpol	BPBD Prov. Jateng	segera setelah rencana operasi ditetapkan	Pada saat masa penanganan darurat berakhir	30 hari
5	Mengkoordinasi-nasikan kegiatan masing-masing bidang operasi	BPBD,TNI, POLRI, Satpol PP, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Humas, Dinas PU, PMI, PDAM, PLN	BPBD Prov. Jateng	segera setelah rencana operasi ditetapkan setiap pukul 08.00 WIB dan 20.00 WIB	Pada saat masa penanganan darurat berakhir	30 hari
6	Memberikan rekomendasi kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana mengenai perubahan strategi dan rencana operasi	BPBD	BPBD Prov. Jateng	1x24 jam setelah operasi dilaksanakan/ berjalan	Pada saat masa penanganan darurat berakhir berakhir	30 hari
7	Membuat laporan	BPBD,TNI, POLRI, Satpol PP,	BPBD Prov. Jateng	1x24 jam setelah	Pada saat masa	30 hari

No	Jenis Kegiatan	Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (instansi/ Lembaga)	Waktu Pelaksanaan		Durasi
				Waktu dimulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
	pelaksanaan penanganan darurat bencana secara menyeluruh dan periodik	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Humas, DINAS PU BMCK, PMI, PDAM, PLN, Kecamatan		operasi dilaksanakan/ berjalan Laporan berjenjang setiap pukul 10.00 WIB dan 22.00 WIB	penanganan darurat berakhir	
8	Menerima, menyimpan dan mendistribusikan bantuan logistik sesuai SOP	Satpol PP, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Humas, DINAS PU BMCK, PMI, PDAM, PLN, Kecamatan	BPBD Prov. Jateng	1x24 jam	Pada saat masa penanganan darurat berakhir	30 hari
9	Pelaporan	Seluruh koordinator bidang operasi dan pos lapangan	BPBD Prov. Jateng	Hari pertama PDB	Pada saat masa penanganan darurat berakhir	30 hari

d. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan Pos Komando

Proyeksi kebutuhan dan analisis kesenjangan dalam pos komando penanganan darurat bencana sebagai berikut:

Tabel 5.2. Proyeksi Kebutuhan Pos Komando

No	Kebutuhan	Standar		Vol Kebutuhan	Jangka Waktu	Jml Kebutuhan
1	2	3		4	5	6
1	Kursi	100	buah	100	30 hari	100
2	Komputer	4	set	4	30 hari	4
3	Printer	4	set	4	30 hari	4
4	Papan data	10	Buah	10	30 hari	10
5	Kertas Milimeter	10	Rol	10	30 hari	10
6	Kertas HVS	8	rim	8	30 hari	8
7	Peta	6	Lemb ar	6	30 hari	6
8	Televisi	4	Buah	4	30 hari	4
9	Kamera Digital	4	Buah	4	30 hari	4
10	Handy Cam	4	Buah	4	30 hari	4
11	Mobil operasional	6	Buah	6	30 hari	6
12	BBM Mobil operasional	60	Liter / hari	60	30 hari	10.800
13	Sepeda Motor operasional	6	Buah	6	30 hari	6
14	BBM sepeda motor operasional	24	Liter/ hari	24	30 hari	4.320
15	Mesin fax	1	Buah	1	30 hari	1
16	Laptop	4	Buah	4	30 hari	4
17	Akses internet	1	Set	1	30 hari	1
18	Plastik data	20	meter	20	30 hari	20
19	Air mineral (galon)	12	Buah /hari	12	30 hari	360
20	Kertas Plano	600	Lemb ar	600	30 hari	600
21	Spidol	90	Buah	90	30 hari	90
22	Ruang Pers Conference	1	Temp at	1	30 hari	1
23	Sound Sederhana	1	Set	1	30 hari	1

Tabel 5.3. Analisis Kesenjangan Pos Komando

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan
1	2	3	4	5	6
1	Tenda Posko Utama	15	15	5	0
2	Tenda Pleton	53	26	27	0
3	Kursi	352	344	100	0
4	Komputer	16	16	4	0
5	Printer	25	19	6	0
6	Sound System	15	15	3	0
7	Handy Talky	120	80	40	0
8	Papan data	44	44	10	0
9	GPS	15	10	5	0
10	Kertas Milimeter	160	20	130	0
11	Kertas HVS	24	24	8	0
12	Peta	72	72	6	0
13	Alat Penerangan	72	72	3	0
14	Televisi	19	17	4	0
15	Kamera Digital	16	12	4	0
16	Handy Cam	12	4	4	4
17	Sepatu Bot	115	55	60	0
18	Dispenser	16	10	6	0
19	Mobile Genset	25	13	12	0
20	BBM Genset	185	80	105	0
21	Mobil operasional	30	17	13	0
22	BBM Mobil operasional	280	120	160	0
23	Sepeda Motor operasional	36	32	10	0
24	BBM sepeda motor operasional	88	48	40	0
25	Telepon Genggam	129	120	9	0
26	Pulsa	300	200	100	0
27	Telepon satelit	20	8	12	0
28	Mesin fax	6	6	5	0
29	Laptop	27	19	8	0
30	Akses	12	11	1	0

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan
1	2	3	4	5	6
	internet				
31	Tikar	380	90	290	0
32	Ponco	120	80	40	0
33	Field bed	44	44	0	0
34	Kipas Angin	19	19	0	0
35	Sarung tangan	120	40	80	0
36	Masker	38	38	0	0
37	Head Lamp	60	50	10	0
38	Senter	95	53	42	0
39	Tangki air bersih	13	9	4	0
40	MCK	15	0	15	0
41	Megaphone	23	8	15	0
42	RIG	26	12	14	0
43	Plastik data	80	0	80	0
44	Galon Aqua	28	12	16	0
45	Kertas plano	0	0	0	0
46	Ruang rapat	9	9	0	0
47	Kendaraan roda 4 distribusi logistik (Pick Up)	8	1	7	0
48	Meja	12	4	8	0
49	Velbed	50	9	41	0
50	Sketsel	9	9	0	0
51	Whiteboard	8	0	8	0

2. Penentuan Jalur Evakuasi, Titik Kumpul dan Tempat Pengungsian

Berikut ini jalur evakuasi, titik kumpul dan tempat pengungsian masing-masing kabupaten

1) Kabupaten Cilacap

1. SEKTOR A (KEC. CILACAP SELATAN)	
1.	SMPN 1 CILACAP
2.	POLITEKNIK CILACAP
3.	RITA
4.	DISPERMADES
5.	AKBID CILACAP
6.	SD ALIRSYAD 01 CILACAP
7.	DPRD CILACAP
8.	Fave Hotel
9	SMA YOS SUDARSO
10	SD PIUS
2. SEKTOR B (KEC. CILACAP TENGAH)	
1.	ASRAMA PUTRI AL-IRSYAD CILACAP
2.	AMN CILACAP
3.	SMA AL-IRSYAD CILACAP
4.	SMPN2 CILACAP
5.	SMA SRI MUKTI CILACAP
6.	SMP N 4 CILACAP
7.	SMP PURNAMA 2 CILACAP
8.	SMP N 6 CILACAP
9.	GEDUNG GOLKAR CILACAP
10	HOTEL ATRIUM
11	APARTEMEN PERTAMINA
3. SEKTOR C (KEC. CILACAP UTARA)	
1.	SMK MAKMUR
2.	SMP MUHAMMADIYAH 2
3.	SMP PGRI 1 CILACAP
4	@HOME HOTEL
5.	MARKAS PMI
6.	BPC GAPENSI
7.	SMP N 5 CILACAP

8.	MASJID AL-JIHAD CILACAP
9.	KEL.MERTASINGA CILACAP
10	STADION WIJAYAKUSUMA (TRIBUN)
4.SEKTOR D (KEC.KESUGIHAN)	
1	LAP.DESA KURIPAN
2	LAP.DESA KELENG
3	LAP.DESA DONDONG
4	LAP.DESA PLANJAN
5	MAN KESUGIHAN
6.	UNUGHA IAIIG
5.SEKTOR E (KEC.KAMPUNG LAUT)	
1	NUSAKAMBANGAN SISI BARAT KAWUNGANTEN BANTARSARI
2	
3	
6.SEKTOR F (KEC.ADIPALA)	
1	PASAR ADIPALA
2	GUNUNG SELOK
3	LAP. DESA KARANGSARI
4	LAP. DESA DOPLANG
5	LAP. DESA KALIKUDI
6	GUNUNG SRANDIL
7.SEKTOR G (KEC. BINANGUN)	
1	LAP.BOLA DESA ALANG AMBA
2	BALAI DESA JEPARA KULON
3	PENDOPO KEC. BINANGUN
4	LAP. KEC. KROYA
5	LAP. DESA JEPARA KULON
6	LAP.DESA PASURUAN
7	BALAI DESA PESAWAHAN
8	LAP.DESA PUCUNGKIDUL
8.SEKTOR H (KEC. NUSAWUNGU)	
1	PENDOPO KEC. NUSAWUNGU
2	LAP. DESA DANASRI LOR
3	LAP.NUSAWANGKAL
9.SEKTOR I (KEC. PATIMUAN)	
1	LAP. KEC PATIMUAN
2	BALAI DESA PATIMUAN

10.SEKTOR J (KEC. JERUKLEGI)	
1	LAP. GOLF TRITIH
2	BANDARA TUNGGUL WULUNG
11.SEKTOR K (KEC. KAWUNGANTEN)	
1	Lap.Deso Bojong

2) Kabupaten Kebumen



Gambar 5.4. Peta Evakuasi Tsunami Kabupaten Kebumen

Tabel 5.4. Titik Kumpul dan Lokasi Pengungsian

No	Kecamatan	Jalur Evakuasi	Titik kumpul Sementara	Titik Kumpul Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A	Kec. Ayah				
	Ds.Candirenggo	Semua jalan	Teba Panjatan Karang Gondang	Lapanngan parkir Obwis Goa Petruk	Fasilitas MCK 1000 jiwa
	Ds.Ayah	Semua jalan	Bukit Panjer Bukit Kali Sat	sda	
3	Ds.Argopeni	Semua jalan	-	KUD Mino	Fasilitas MCK

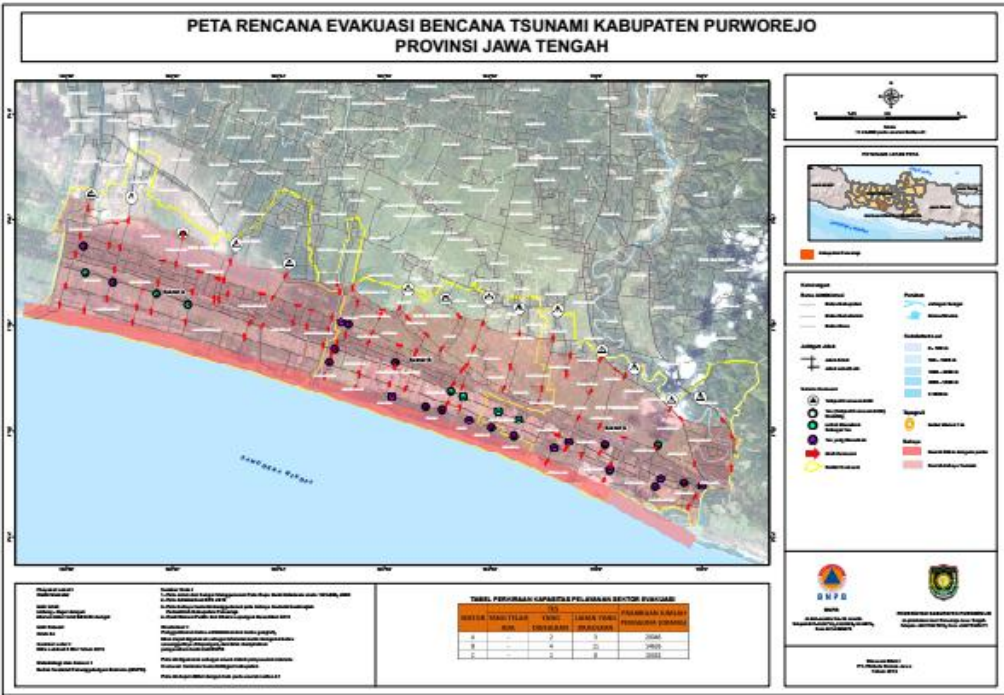
No	Kecamatan	Jalur Evakuasi	Titik kumpul Sementara	Titik Kumpul Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					200 jiwa
4	Ds.Kr Duwur	Semua jalan	Lap.Pakir Obwis Menganti	-	200 jiwa
5	Ds. Sрати	Semua jalan	Jalan raya	-	-
6	Ds.Pasir	Semua jalan	TPI Lama Jalur TPI	Dukuh Ndilem Balai Desa	Fas. MCK 250 jiwa
2	Kec. Buayan Ds.Karangbolong	Semua jalan	-	Balai Desa Pendopo Karangbolong	Fasilitas MCK 150 jiwa
	Ds.Jladri	Semua jalan	Jalur pertigaan Jladri	Balai Desa SDN Jladri	Fasilitas MCK 600 jiwa
3	Kec.Puring Ds.Tambakmulyo	Semua jalan	Jalur Pansela Masjid Wetonwetan SDN2 Tambakmulyo	SMK Kelautan SDN Banjarejo	Fasum MCK 1400 jiwa
	Ds. Banjarejo	Semua jalan	Jalur Pansela	Lapanngan Banjarejo Masjid Banjarejo	Fasum MCK 950 jiwa
	Ds.Waluyorejo	Semua jalan	Jalaur Pansela	Jalur Dadeules Masjid Puliharjo	Fasum MCK 800 jiwa
	Ds.Sidoharjo	Semua jalan	Jalur Pansela	Jalur Dandeules Masjid Pulehanjo SDN Meles	Fasum MCK 700 jiwa
4	Kec.Petanahan Ds.Karangreja	Semua jalan	Jalur Pansela	Jalur Dandeules	Fasum MCK 1500. jiwa

No	Kecamatan	Jalur Evakuasi	Titik kumpul Sementara	Titik Kumpul Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Masjid Masjid	Masjid Gunung Madi	
	Ds.Karanggadung	Smua jalan	Jalur Pansela Lapangan desa	Jalur Dadeules Balaidesa Munggu	Fasum MCK 1500 jiwa
	Ds.Tegalretno	Semua jalur	Jalur Pansela	Jalur Dadeules Lapangan Jogosimo Pasar Bodo Jogosimo	Fasum MCK 1500 jiwa
5	Kec.Klirong Ds.Jogosimo	Semua jalur	PPEJalur Pansela	Jalur Dandeules Balai desa Lapangan desa Pasar desa	Fasum MCK 2500 jiwa
	Ds.Tanggulangun	Semua jalur	Jalur Pansela	Jalur Dandeus SDN Tanggulangun	Fasum MCK 1300 jiwa
6	Kec. Buluspesantren Ds.Ayamputih	Semua jalur	Jalur Pansela	Balai Desa Lapangan desa Jalur Dandeules	Fasum MCK 1600 jiwa
	Ds.Setrojenar	Semua jalur	Jalur Pansela	Pasar desa Lapangan OR desa Jalur Dandeules Balai desa	Fasum MCK 2000 jiwa
	Ds.Brecong	Semua	Jalur	Lapangan OR	Fasum MCK

No	Kecamatan	Jalur Evakuasi	Titik kumpul Sementara	Titik Kumpul Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		jalur	Pansela	desa SDN1 Brecong Balai desa Jalur Dandeules	2100 jiwa
7	Kec. Ambal Ds. Entak	Semua jalur	Jalur Pansela	Balai desa/SDN Masjid Al-Falah Jalur Dandeules	Fasum MCK 950 jiwa
	Ds.Kenoyojayan	Semua jalur	Jalur Pansela	Balai desa/SDN Masjid Darul Shuhada Jalur Dandeules	Fasum MCK 750 jiwa
	Ds.Ambalresmi	Semua jalur	Jalur Pansela	Masjid Al-Mustofa Balai desa Kampung jawa Pasar hewan	Fasum MCK 2500 jiwa
	Ds.Kaibor Petangkuran	Semua jalur	Jalur Pansela	Jalur Dandeules Masjid Al-Bisri Masjid Darul Mutaqin	Fasum MCK 1000 jiwa
	Ds.Kaibon	Semua jalur	Jalur Pabsela	Jalur Dandeules SDN Kaibon Komlek Balai desa	Fasum MCK 750 jiwa
	Ds.Sumberjati	Semua jalur	Jalur Pansela	Jalur Dadeules	Fasum MCK 800 jiwa

No	Kecamatan	Jalur Evakuasi	Titik kumpul Sementara	Titik Kumpul Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Masjid Darunnawa Masjid At-Taqwa	
8	Kec. Mirit Ds.Mirit Petikusan	Semua jalur	Jalur Pansela	Balai desa SDN Masjid JALUR dandeules	Fasum MCK 650 jiwa
	Ds.Tlogodepok	Semua jalur	Jalur Pansela	Balai desa SDN Masjid Jalur Dandeules	Fasum MCK 1 100 jiwa
	Ds.Mirit	Semua jalur	-	Balai desa SDN Masjid Jalur Dandeules	Fasum MCK 750 jiwa
	Ds.Tlogopragoto	Semua jalur	-	Balai desa Masjid SDN Jalur Dandeules	Fasum MCK 800 jiwa
.	Ds.Lembupurwo	Semua jalur	Jalur Dandeules	Balai desa Masjid SDN Lapangan OR	Fasum MCK 900 jiwa
	Ds.Wiromartan	Semua jalur	-	Balai desa Masjid SDN	Fasum MCK 500 Jiwa
	Ds.Rowo	Semua jalur	-	Balai desa Masjid SDN	Fasum MCK 600 jiwa

3) Kabupaten Purworejo



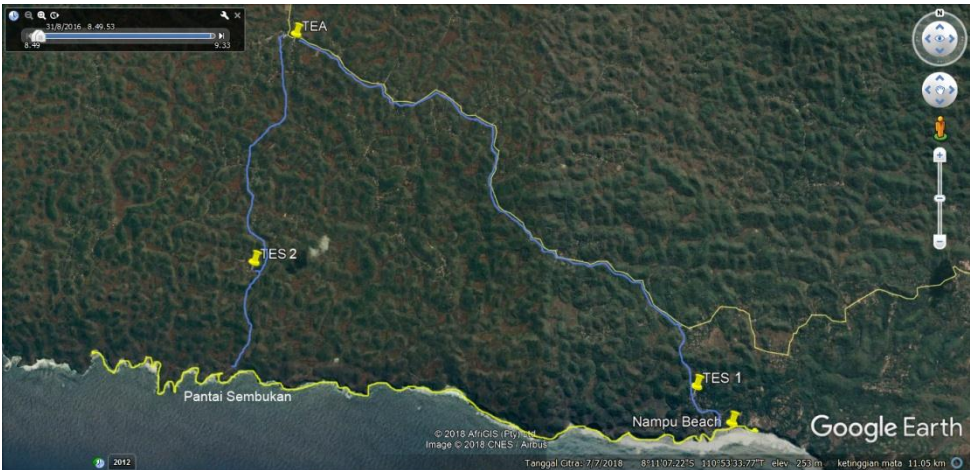
Gambar. 5.5. Peta Jalur Evakuasi dan Titik KumpulBencana Tsunami Kab. Purworejo

Tabel 5.5. Titik PengungsianBencana Tsunami Kab. Purworejo

Sektor		Pengungsi
1		2
1. SEKTOR A (KEC. GRABAG)		
A	Lokasi Balai Desa Kedungmulyo	Warga Desa Ukirsari, Nambangan Dan Sumberagung
B	Lokasi Balai Desa Bendungan	Warga Desa Kertojayan Dan Bakurejo
C	Lokasi Balai Desa Dudukulon	Warga Desa Munggangsari, Pasaranom, Rejosari Dan Dudukulon
D	Lokasi Balai Desa Banyuyoso	Warga Desa Ketawangrejo,
E	Lokasi Balai Desa Aglik	Warga Desa Patutreja Dan Harjobinangun
2. SEKTOR B (KEC. NGOMBOL)		
A	Lokasi Balai Desa Susuk	Warga Desa Keburuhan
B	Lokasi Balai Desa Briyan	Warga Desa Malang
C	Lokasi Balai Desa Ngombol	Warga Desa Pagak Dan Wero.

Sektor		Pengungsi
1		2
D	Lokasi Balai Desa Candi	Warga Desa Girirejo Dan Ngentak.
3. SEKTOR C (KEC. PURWODADI)		
A	Lokasi Balai Desa Bongkot	Warga Desa Nampu, Gesing, Tegalaren, Blendung Dan Sokomanah.
B	Lokasi Balai Desa Guyangan	Warga Desa Bubutan, Jati Malang, Jati Kontal, Jogoresan Dan Gedangan
C	Lokasi Balai Desa Sidoharjo	Warga Desa Jogoboyo Dan Watukuro
D	Lokasi Balai Desa Banjarsari	Warga Desa Karang Anyar
E	Lokasi Balai Desa Dadirejo	Warga Desa Dadirejo.

4) Kabupaten Wonogiri



Gambar 5.6. Peta Jalur Evakuasi Tsunami Kab. Wonogiri

Tabel 5.6. Titik Pengungsian Bencana Tsunami Kab. Wonogiri

Sektor		Pengungsi
1		2
1. SEKTOR A (KEC. PARANGGUPITO)		
	Lapangan Kec.Paranggupito	Warga Desa Paranggupito,Gunturharjo
2. SEKTOR B (KEC. GIRITONTRO)		
	Lapangan Kec.Giritontro	Warga Kec.Giritontro
3. SEKTOR C (KEC. GIRIWOYO)		

	Lapangan Kec.Giriwoyo	Warga Kec.Giriwoyo
4. SEKTOR D (KEC. PRACIMANTORO)		
	Lapangan Kec.Pracimantoro	Warga Kec.Pracimantoro
5. SEKTOR E (KEC. BATURETNO)		
	Lapangan Kec.Baturetno	Warga Kec.Baturetno
6. SEKTOR F (KEC. EROMOKO)		
	Lapangan Kec.Eromoko	Warga Kec.Eromoko
7. SEKTOR G (KEC. MANYARAN)		
	Lapangan Kec.Manyaran	Warga Kec.Manyaran

B. Perencanaan Bidang Operasi

Dalam memberikan pelayanan, pos komando membawahi beberapa bidang operasi, penentuan jumlah dan nama bidang operasi disesuaikan dengan jenis, besarnya dampak bencana, kapasitas serta karakteristik daerah. Bidang operasi yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
2. Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial
3. Bidang Operasi Dapur Umum dan Logistik
4. Bidang Operasi Hunian, Air dan Sanitasi
5. Bidang Operasi Pemulihan Sarana dan Prasarana
6. Bidang Operasi Pengamanan
7. Bidang Operasi Pendidikan

Berikut ini penjabaran perencanaan masing-masing bidang operasi.

1. Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi (PPE)

a. Situasi

Terjadi Gempa Bumi dengan kekuatan M 8.8 di kedalaman 17 km di Pantai Selatan jawa Tengah. Gempa tersebut memicu gelombang Tsunami dengan rentang ketinggian antara 8,5 – 31,03 meter. Gelombang akan sampai di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah dalam 24 menit, dimulai dari Pantai Selatan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan dan korban.

b. Sasaran Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

Sasaran dibentuknya bidang operasi search and rescue (pencarian, pertolongan dan evakuasi) antara lain:

- 1) Terlaksananya proses pencarian, pemberian pertolongan dan evakuasi terhadap korban selamat, luka, hilang termasuk

- penyelenggaraan jenazah.
- 2) Identifikasi korban.

c. Pelaksana Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi.

Pelaksana bidang operasi PPE pada saat penanganan darurat bencana, terdiri dari unsur BPBD, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, TNI, POLRI, PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PU-SDA TARU, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas PERAKIM, Pramuka serta organisasi relawan lainnya. Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat berperan dalam Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi, dengan persetujuan Kepala BNPB dan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, setelah berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan dalam operasinya berada di bawah komando Posko Penanganan Darurat Bencana.

d. Kegiatan Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

Tabel 5.7. Kegiatan Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi.

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab Instansi/ Lembaga	Waktu dimulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mobilisasi Potensi PPE dan mengaktifkan Tim Kaji Cepat.	BNPP, BPBD,	BPBD	Hari H	H +3	3 hari
2.	Membentuk dan mengaktifkan Tim Pencari, Pertolongan dan Evakuasi korban luka dan dan selamat.	BNPP, BPBD, TNI Ops KODAM, POLRI, PMI, Pramuka, Forum Relawan Indonesia	BPBD	Hari H	H +14	14 hari
3.	Membentuk dan mengaktifkanTeam Pencari korban hilang	BNPP, BPBD, TNI Ops - KODAM, POLRI,	SAR/TNI	Hari H	H +14	14 hari

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab Instansi/ Lembaga	Waktu dimulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
		PMI, Pramuka, Forum relawan lainnya				
4.	Membentuk dan mengaktifkan Tim Identifikasi korban.	BPBD, SAR, TNI Ops KODAM, POLRI, PMI, Pramuka, serta relawan lainnya	BPBD	Hari H	H +14	14 hari
5.	Membentuk dan mengaktifkan Tim Pemulasaran Jenazah	BPBD, BNPP, TNI, POLRI, PMI, Pramuka, serta relawan lainnya	BPBD	Hari H	H +14	

e. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

Tabel 5.8. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan
Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

No	Jenis Sumber Daya	Kebu- tuhan Kab	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	SAR	1432	270	1000	162	
2	TNI :	0	0		0	
	a. 412 Raider	100	60	40	0	
	b. Kodim 0708	490	490		0	
	c. Pos AL	100	60	40	0	
3	POLRI	390	390	500	0	
4	PMI	278	238	40	0	
5	BANSER	300	300	100	0	
6	CBP IPNU	190	90	100	0	
7	SENKOM	150	90	60	0	
8	UBALOKA	130	40	90	0	
9	Medis	150	150	170	0	
10	Relawan lainnya	290	290	290	0	
11	Pramuka	18	18	18	0	
12	Tagana	7	7	7	0	
II	SARPRAS	0	0		0	
1	Peralatan Pencarian dan Evakuasi	0	0		0	
	a.Truk	63	30	39	0	
	b. Ambulan (sektor A : 2, sektor B : 3, sektor C : 3)	77	61	16	0	
	c. Pick Up/4 WD	84	24	60	0	
	d.Tandu	195	135	60	60	
	e.Kantung Mayat	54467	40	54427	0	
	f. LCR	24	10		14	
	g. Perahu Fiber	27	27	0	0	
	h.Mesin temple	28	6	22	0	BPBD, BNPP
	i. Binocular	16	0	16	0	BNPP
	j.Alat Ektrikasi	30	0	20	10	BNPP
	k. Chain saw	4	4	30	0	BNPP, BPBD
	l. Jangka mayat	3	3	0	0	

No	Jenis Sumber Daya	Kebu- tuhan Kab	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	m. Tali Jiwa	25	25	0	0	
	n. Snepling	25	25	0	0	
	o. Tambang luncur	2	2	0	0	
	p. Sabit/golok/ kudi	10	10	50	0	BNPP
2	Alat Pelindung Diri	0	0	0	0	
	a. Sarung tangan latex	26240	200	26040	0	Dinkes
	b. Masker	26040	0	26040	0	Dinkes, BPBD
	c. Kacamata	24780	300	24480	0	Dinkes, BNPP
	d. Helm	24780	300	3000	21480	Dinkes, BPBD, BNPP, Masyar akat
	e. Pelampung	190	85	100	0	BNPP, BPBD
	f. Jas Hujan	100	100	100	0	BPBD
	g. Sepatu Bot	36	36	100	0	BPBD
3	First Aid Kit	138	22	116	0	Dinkes
4	Senter spot	88	78	10	0	BNPP
5	Senter air	36	36	50	0	BNPP
6	Cangkul	300	300	100	0	BPBD
7	Kain kafan	77475	0	77475	0	BPBD
8	Alkom (HT)	84	72	12	0	BPBD
9	Kartu Triage	51653	0	51653	0	BNNP
10	BBM	0	0	0	0	Masing- masing OPD/In tansi/L embaga
11	Konsumsi	102564	0	102564	0	Pemda Jateng dan Masyar akat
III	KEBUTUHAN POSKO	0	0		0	
1	Generator	0	0	5	0	BPBD, Kodam, Polda
2	Kendaraan roda 4 distribusi logistic	10	10	10	0	BPBD, Kodam, Polda, OPD Prov

No	Jenis Sumber Daya	Kebu- tuhan Kab	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
3	Megaphone	0	0	15	0	Seluruh OPD Prov
4	Lampu Halogen	4	4	15	0	Seluruh OPD Prov
5	Tikar	7	7	25	0	BPBD, Kodam, Polda
6	Tenda	7	7	5	0	BPBD, Kodam, Polda

2. Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial

a. Situasi

Terjadi Gempa Bumi dengan kekuatan 8.8 M di kedalaman 17 km di Pantai Selatan Jawa Tengah. Gempa tersebut memicu gelombang Tsunami dengan rentang ketinggian antara 8,5 – 31,03 meter. Gelombang akan sampai di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah dalam 24 menit, dimulai dari Pantai Selatan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan dan korban.

b. Pelaksana Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial

Pelaksana pelayanan kesehatan saat penanganan darurat bencana terdiri dari Dinas Kesehatan (Puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta), MDMC, KESDAMTNI, Bidokes, Dokpol, PMI, Pramuka dan organisasi kesehatan lainnya.

c. Kegiatan Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial

Tabel 5.9. Kegiatan Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/Lembaga	Penanggung jawab (Instansi/Lembaga)	Waktu mulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Klinik Kesehatan	Dinas Kesehatan, MDMC, PMI, KESDAM TNI, BIDOKES, DOKPOL	Dinas Kesehatan	H+1	Akhir masa penanganan darurat	30 Hari
2	Assessment kebutuhan psikososial	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	Dinas Kesehatan	H+1	Akhir masa penanganan darurat	30 Hari
3	Pelayanan Psikososial	Dinas Sosial, Dinas	Dinas Sosial	H+1	Akhir masa penanga	30 Hari

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (Instansi/Lembaga)	Waktu mulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
		Kesehatan, PMI, Universitas/PT, Pramuka, MDMC, YAKKUM			nan darurat	
4	Bimbingan dan Konsultasi	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Universitas/PT	Dinas Kesehatan	H+1	Akhir masa penangan darurat	30 Hari
5.	Konseling	Dinas Kesehatan, PMI, Unirsitas/PT, PMI, YAKKUM	Dinas Kesehatan	H+1	Akhir masa penangan darurat	30 Hari
6.	Pendampingan	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Universitas/PT, Pramuka, MDMC, YAKKUM	Dinas Kesehatan	H+1	Akhir masa penangan darurat	30 Hari
7.	Rujukan	Tim Medis (Dinas Sosial, Dinas	Dinas Kesehatan	H+1	Akhir masa penangan	30 Hari

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (Instansi/L embaga)	Waktu mulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
		Kesehatan, PMI, Universita s/PT, Pramuka, MDMC, YAKKUM)			darurat	
8.	Promosi Kesehatan	Dinas kesehatan, PMI	Dinas kesehatan		Pasca PDB	
9.	Survelians	Dinas kesehatan	Dinas kesehatan		Pasca PDB	
10.	Pemenuhan logistik obat/ perbekalan kesehatan	Dinas kesehatan, BPBD	Dinas kesehatan		Akhir masa penangan an darurat	30 Hari
11	Verifikasi bantuan dari luar	Dinas kesehatan	Dinas kesehatan		Akhir masa penangan an darurat	30 Hari
12	Pemantauan kesehatan lingkungan	Dinas kesehatan, DLHK	Dinas kesehatan		Akhir masa penangan an darurat	30 Hari
13	Pelayanan rujukan kasus korban bencana ke RS pemerintah dan swasta	Dinas Kesehatan, MDMC, PMI, KESDAM TNI, BIDOKES,	Dinas kesehatan		Akhir masa penangan an darurat	30 Hari

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (Instansi/L embaga)	Waktu mulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
		DOKPOL				
14	Pengujian bahan mutu lingkungan (tanah, air, dan udara)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)	DLHK		Akhir masa penangan darurat	30 Hari
15	Pencatatan dan pelaporan	Dinas kesehatan	Dinas kesehatan		Akhir masa penangan darurat	30 Hari

Tabel 5.10. Analisis Kesenjangan Bidang Operasi Kesehatan

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	
1	Dokter umum	116	40	98	0	MDMC, Dinkes, Kodam, Dokpol, Bidokes , dll.
2	Dokter IGD	12	6	12	0	
3	Dokter Bedah	30	12	22	0	
4	Dokter ortopedi	15	9	8	0	
5	Dokter anestesi	15	6	12	0	
6	Dokter penyakit dalam	15	12	5	0	
7	Psikiater	9	4	5	0	
8	Ahli Gizi	21	21	5	0	
9	Surveilans	6	3		0	
10	Perawat	221	83	169	0	
11	Bidan	53	44	9	0	
12	Ambulans pasien	95	83	21	0	

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	
13	Kantong mayat	3150	120	4030	0	
14	Obat dan bahan habis pakai	311	141	380	0	
15	Tabung O2	120	120	40	0	
16	Tempat tidur lipat	900	39	1061	0	
17	Tenda utk medis	53	13	10	30	
18	Genset	53	12	40	1	BPBD Jateng, Dinkes
19	Meja	84	84	0	0	
20	Kursi	168	168	0	0	
21	Lampu pemeriksaan / tindakan	42	42	0	0	
22	HT	42	12	40	0	
23	Lapotop & printer	42	42	0	0	
24	Relawan Psikososial	84	84	0	0	
25	Peralatan PSP / KIE	42	0	42		
26	Susu formula	45.312	0	45.312		
27	Darah berbagai golongan (A, B, O, AB)	90	90	0	0	
28	Air bersih	42	6	36	0	
29	Hygien kit	6.000	50	8.000	0	
30	Alat fogging	12	12	0	0	
31	Kendaraan operasional	45	23	14	8	
32	BBM operasional	13.500	0	13.500	0	
33	Pamflet	3.000	600	2.400	0	MDMC,

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	
	Promosi Hygien					Dinkes, Kodam, Dokpol, Bidokes , dll.
34	Kit Pertolongan Pertama	0	200	0	0	
35	Vitamin	300	300	0	0	
36	Terpal	11	0	11	0	
37	Tandu	11	2	9	0	
38	Alat Komunikasi + operator	11	3	8	0	
39	Relawan	0	0	0	0	
40	Papan	11	0	11	0	
	Informasi nama pasien					
41	Buku register	11	0	11	0	
42	Emergency Set	22	0	22	0	
43	Bed Pasien	22	0	22	0	
44	Stand Infus	22	0	22	0	
45	Relawan Penyuluh kesling Tenaga Kesehatan Lingkungan	11	2	9	0	
46	Relawan dan pekerja sosial, Petugas Binroh	62	12	50	0	MDMC, Dinkes, Kodam, Dokpol, Bidokes , dll.
47	Petugas referral (1 driver, 1 pendamping)	22	0	22	0	
48	TensiMeter	10	5	5	0	Dinkes
49	Stetoskop	10	5	5	0	
50	Senter	10	5	5	0	

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	
51	Kassa Pembalut & Kasa Gulung	1.000	500	500	0	
52	Kapas 500 Gr	10	10	0	0	
53	Infus set	25	10	15	0	
54	Larutan NaCL	25	25	0	0	
55	Larutan RL	25	25	0	0	
56	Larutan Dextrose	25	25	0	0	
57	Surgical set	5	2	3	0	
58	Oxygen set	10	5	5	0	
59	Respiratory set	5	2	3	0	
60	Plester	15	5	10	0	
61	Antiseptic	25	5	20	0	
62	Alkohol	25	5	20	0	
63	Antipiretic	15	5	10	0	
64	Analgesik	15	5	10	0	
65	Diazepam	5	1	4	0	
66	antacid	10	4	6	0	
67	Anti Tetanus	25	0	25	0	
68	Anti Bisa Ular	25	0	25	0	
69	Amoxillin	150	100	50	0	
70	Cotrimoxazol	5	2	3	0	
71	Antirespiratori	5	2	3	0	
72	Neurotropik	25	5	20	0	

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	
73	Vit. C	5	1	4	0	
74	Vit. B Complek	5	2	3	0	
75	Psikolog	9	0	9	0	MDMC, Dinkes, Kodam, Dokpol, Bidokes, dll.

3. Bidang Operasi Dapur Umum dan Logistik

- a. Situasi

Terjadi Gempa Bumi dengan kekuatan 8.8 M di kedalaman 17 km di Pantai Selatan jawa Tengah. Gempa 8,5 – 31,03 meter. Gelombang akan sampai di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah dalam 24 menit, dimulai dari Pantai Selatan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan dan korban.
- b. Sasaran Bidang Operasi Dapur Umum dan Logistik
 - 1) Terpenuhinya kebutuhan pangan untuk semua pengungsi (2X sehari)
 - 2) Terpenuhinya kebutuhan non-pangan untuk semua pengungsi
 - 3) Tersedianya dapur umum di lokasi pengungsian
 - 4) Tercukupinya bahan logistik untuk semua pengungsi
- c. Kegiatan Bidang Operasi Dapur Umum
 - 1) Rapat koordinasi dan konsultasi terpadu
 - 2) Membuat/mendirikan dapur umum
 - 3) Pendirian gudang logistik
 - 4) Pendataan bantuan logistik
 - 5) Distribusi logistik dan dapur umum

d. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan

Tabel 5.11. Analisis Kesenjangan Bidang Operasi Dapur Umum dan Logistik

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Tim Dapur Umum	210	118	30	12	Dinsos, PMI, Kodam, Pramuka, Masyarakat
2	Tim Distribusi Bahan Makan	210	72	50	88	
4	Tim Pendataan	84	30	54	0	
5	Tenda Dapur Umum	84	34	0	50	Dinsos, PMI, Kodam, Pramuka, Masyarakat
6	Dapur Set	84	34	30	50	
7	Gas 12 kg	2.520	846	1.674	0	Dinsos, PMI, TNI, Pramuka, Masyarakat
8	BBM	13.200	0	13.200	0	Seluruh OPD Prov/Pe laku
9	Kendaraan Distribusi	42	16	26	0	Dinsos, Kodam
10	Beras Terdampak Tsunami	1.156.736	639.412	517.324	0	Dinsos, Bulog, BPBD, Masyarakat
11	Beras Terdampak Gempa Bumi	2.460.006	820.002	1.640.004	0	Dinsos, Bulog, BPBD, Masyarakat
12	Lauk pauk	2.228.220	2.002	2.226.218	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
13	Lauk pauk Terdampak Gempa Bumi	741.132	247.044	494.088	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
14	Bumbu dapur	2,228.220	742.740	1.485.480	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
15	Bumbu dapur Terdampak Gempa Bumi	741.132	247.044	494.088	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
16	Minyak goreng	165.739	1.452	164.287	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
17	Minyak goreng Terdampak Gempa Bumi	615	205	410	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
18	Mie Instan	371.888	126.209	245.679	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
19	Mie Instan Terdampak Gempa Bumi	3.075.009	25	3.074.984	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
20	Air mineral /air minum (terdampak Tsunami)	6.204.600	100	6.204.500	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
21	Air mineral /air minum (terdampak gempa)	15.375.045	4.080.000	11.295.045	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
22	Susu bayi (0-6 bln)	7.857	500	7.357	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
23	Susu bayi (6-11 bln)	1.497	499	998	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
24	MP Asi bayi (6-11 bln)	0	0	0	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
25	Botol susu (dot)	10.392	2.464	7.928	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
26	Meja Kursi	84	28	56	0	Dinsos, Kodam, Polda, Pramuk

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
						a, PMI
27	velt bed	210	70	616	0	Dinsos, BPBD, Kodam, Polda
28	Serbet	336	112	224	0	Dinsos, BPBD, Kodam, Polda
29	Kertas Nasi (terdampak Tsunami)	4.963.680	1.654.560	3.309.120	0	Dinsos, BPBD
30	Kertas Nasi (terdampak gempa)	12.300.036	4.100.012	8.200.024	0	Dinsos, BPBD
31	Karet Gelang (terdampak Tsunami)	4.963.680	1.654.560	3.309.120	0	Dinsos, BPBD
32	Karet Gelang (terdampak gempa)	12.300.036	4.100.012	8.200.024	0	Dinsos, BPBD
33	Kantong sampah 100 ltr	6.300	2.100	4.200	0	Dinsos, BPBD
34	Blender	84	28	56	0	Masyarakat
35	Sabun Cuci	2.520	840	1.680	0	Dinsos, Masyarakat
36	Selang	4.200	1.400	2.800	0	Dinsos, BPBD Masyarakat
37	White Board	42	14	28	0	Dinsos, BPBD
38	Alat Tulis Lapangan	42	14	28	0	Dinsos, BPBD
39	Gayung	210	70	140	0	Dinsos, BPBD
40	Ember besar	210	70	140	0	Dinsos, Kodam, Polda, BPBD
41	Thermos	126	42	84	0	Dinsos, Kodam, Polda, BPBD
42	Alat Makan	289.800	96.600	193.200	0	Dinsos, Kodam,

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
						Polda, BPBD
43	Alat Komunikasi	60	20	40	0	Kodam, Polda
44	Senter	60	20	40	0	Kodam, Polda, BPBD
45	Wireless Sound System	42	14	28	0	Kodam, Polda
46	Bantuan Transport Petugas	18.900	1.000	17.900	0	Seluruh OPD/Stakeholder
47	Kantong Kresek	80.838	26.946	53.892	0	DLHK, BPBD
48	Sarden	3.000	875	2.125	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
49	Kecap	400	190	210	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
50	Gula Pasir	350	203	147	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
51	Air Mineral	1.000	150	850	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
52	Teh	100	31	69	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
53	Sayuran	500	0	500	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
54	Tahu	300	0	300	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
55	Tempe	300	0	300	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
56	Ikan asin	500	0	500	0	Dinsos, BPBD, Masyarakat
57	Bumbu dapur	200	0	200	0	Dinsos, BPBD,

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan n Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
						Masyara kat
58	Telur	500	0	500	0	Dinsos, BPBD, Masyara kat
59	Tenda Pengungsi / Pleton	104	16	88	0	Dinsos, BPBD, Masyara kat
60	Matras	100	100	0	0	Dinsos, BPBD, Kodam, Polda, Masyara kat
61	Jas Hujan	100	15	85	0	Dinsos, BPBD, Masyara kat
62	HT	15	9	6	0	Dinsos, BPBD, Kodam, Polda
63	Dinsos	10	8	2	0	Dinsos
64	Tagana	100	45	939	0	Tagana
65	Pekerja sosial masyarakat	460	300	160	0	Dinsos
66	TKSK	25	12	13	0	Dinsos
67	Tenaga psikososial	15	10	5	0	Dinsos, Dinkes
68	BPBD	40	10	30	0	BPBD
69	Pramuka	15	10	5	0	Pramuk a
70	PDAM	15	10	5	0	PDAM
71	Karang taruna	26	26	0	0	Pemkab Sekitar
72	PU	130	130	0	0	
73	KODIM	5	5	0	0	
74	Dinas kesehatan	18	18	0	0	
75	Forum PRB	35	35	0	0	
76	PMI	25	25	0	0	
77	Tenda Regu	28	28	0	0	
78	Tenda Keluarga	5	5	0	0	
79	Tenda Gulung	138	60	78	0	
80	Velbed	28	0	28	0	

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan Kabupaten	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan n Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
81	Chainsaw	1	1	0	0	
82	Mobil Tangki Air	3	3	0	0	
83	Mobil Rescue	4	4	0	0	
84	Sepeda Mobil Trail	2	2	0	0	
85	Kompor Gas	4	4	0	0	
86	Handy Cam	1	1	0	0	
87	Kamera	1	1	0	0	
88	Chainsaw Beton	1	1	0	0	
89	Mini Komposer	1	1	0	0	
90	Mobil dapur umum lapangan	1	1	0	0	
91	Seragam sd	200	200	0	0	
92	Kain panjang	100	100	0	0	
93	Daster	100	100	0	0	
94	Famili kit	50	50	0	0	
95	Food ware	50	50	0	0	
96	Kid ware	50	50	0	0	
97	Teko	48	48	0	0	
98	Panci	48	48	0	0	
99	Tempat nasi	48	48	0	0	
100	Centong	48	48	0	0	
101	Wajan	48	48	0	0	
102	Sodet	48	48	0	0	
103	Rantang 2 susun	48	48	0	0	

4. Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

a. Situasi

Terjadi Gempa Bumi dengan kekuatan 8.8 M di kedalaman 17 km di Pantai Selatan Jawa Tengah. Gempa tersebut memicu gelombang Tsunami dengan rentang ketinggian antara 8,5 – 31,03 meter. Gelombang akan sampai di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah dalam 24 menit, dimulai dari Pantai Selatan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan dan korban.

b. Sasaran Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

Sasaran dibentuknya bidang operasi hunian air dan sanitasi antara lain:

- 1) Tersedianya tempat pengungsian sementara baik dalam tenda-tenda maupun di bangunan-bangunan umum, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti dapur umum, mck, dll.
- 2) Terpenuhinya dukungan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana, serta terkoordinasinya semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi terkait.
- 3) Terlaksananya manajemen logistik yang baik

c. Kegiatan Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

Tabel 5.12. Kegiatan Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (Instansi/ Lembaga)	Waktu mulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menyediakan tempat pengungsian	BPBD, Dinsos, PMI, LH, PDAM, DINAS PU BMCK, TNI – Zeni	DINAS SOSIAL	Segera (1 Hari)	30 hari	
2	Menyediakan air bersih dan penampungan nya	BPBD, Dinsos, PMI, LH, PDAM, TNI Zeni, PU SDA TARU, Dinas Perakim,	PDAM	Segera (1 Hari)	30 hari	
3	Menyediakan fasilitas MCK	BPBD, Dinsos, PMI, LH,	DINAS LH	Segera (1 Hari)	30 hari	

		PDAM, PU SDA TARU				
4	Menyediakan tempat sampah	BPBD, Dinsos, PMI, LH, PDAM	DINAS LH	Segera (1 Hari)	30 hari	
5	Membuat Saluran Limbah	DINAS PU BMCK, BPBD, LH	DINAS PU BMCK	Segera (1 Hari)	30 hari	
6	Distribusi Air Bersih	DPU SDA TARU, PDAM, BPBD	PDAM	Segera (1 Hari)	30 hari	
7	Membuat Tempat Ibadah	DINAS PU BMCK, BPBD, TNI-Zeni	DINAS PU BMCK	Segera (1 Hari)	30 hari	

d. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan

Tabel 5.13. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

NO	JENIS SUMBER DAYA	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN KABUPATEN	KETERSEDIAAN PROVINSI	KESENJANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Balai Desa	30	30	0	0	
2	Gedung SD	30	30	0	0	
3	Tempai Ibadah	28	28	0	0	
4	Mendirikan tenda darurat	40	0	0	40	
5	Pembuatan MCK	17,964	0	500	17,464	PU BMCK
6	Mobil WC/ DPU	83,900	2	10	83,896	BPBD, Kodam
7	Genset	1,678	0	500	1,678	BPBD, PU BMCK
8	Solar	7,840	0	7,840	0	Seluruh OPD/Pe laku
9	Air bersih	71,932,150	0	71,932,150	0	PU BMCK, BPBD
10	Tandon air	5,034	0	5,034	0	BPBD, Dinsos, PDAM
11	Tenda/Ti kar	12,675	109	919	11,647	Dinsos, BPBD

NO	JENIS SUMBER DAYA	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN KABUPATEN	KETERSEDIAAN PROVINSI	KESENJANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
12	Truk tenki air	34	0	34	0	PU BMCK, BPBD, Polda, Kodam, BPBD Kab/Ko ta Tetangg a
13	Truk	0	0	0	0	
14	Colt Pick up	0	0	0	0	
15	Sopir/ke nek truk tenki air	68	10	58		PU BMCK, BPBD, Polda, Kodaam , BPBD Kab/Ko ta Tetangg a
16	Tukang tenda	68	32	36	0	TNI, POLDA, BPBD
17	Tukang kayu/kayu	200	200	0	0	
18	Relawan	400	400	0	0	
19	Velbad	28	0	28		Kodam, Polda, BPBD
20	Chainsow	1	1	0	0	Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
21	Jas Hujan	100	15	85	0	Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
22	HT	15	9	6		Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
23	Mobil Rescue	4	4	0	0	Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
24	Sepeda Motor	2	2	0	0	Kodam, Polda,

NO	JENIS SUMBER DAYA	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN KABUPATEN	KETERSEDIAAN PROVINSI	KESENJANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
	Trail					BPBD, PU BMCK
25	Handy Cham	1	1	0	0	PU BMCK
26	Kamera	1	1	0	0	PU BMCK
27	Selimut	1678000	0	1678000	0	BPBD, Dinsos
28	WTP	1678	0	50	1628	Kodam, Polda, BPBD, Dinsos
29	Tong Sampah	16780	0	16780	0	PU BMCK
30	SDM					
	BPBD	80	0	80	0	
31	DINAS PU BMCK	220	0	220	0	
32	PDAM	175	0	175	0	
33	DINKES	3500	0	3500	0	
34	PERKIM LH	175	0	175	0	
35	TNI ZENI	455	0	455	0	
36	POLRI	455	0	455	0	
37	RELAWAN	10000	0	10000	0	
38	PLN	175	0	175	0	

5. Bidang Operasi Pemulihan Fungsi Sarana Prasarana

- a. Situasi

Terjadi Gempa Bumi dengan kekuatan M 8.8 di kedalaman 17 km di Pantai Selatan jawa Tengah. Gempa tersebut memicu gelombang Tsunami dengan rentang ketinggian antara 8,5 – 31,03 meter. Gelombang akan sampai di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah dalam 24 menit, dimulai dari Pantai Selatan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap.Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan dan korban.
- b. Sasaran
 - 1) Jalan lancar untuk jalur evakuasi
 - 2) Sarana komunikasi dan penerangan berfungsi dengan baik
 - 3) Lingkungan bersih dan nyaman
 - 4) Fasilitas umum dapat berfungsi

c. Kegiatan

Tabel 5.14. Kegiatan Bidang Operasi Pemulihan Fungsi Sarana Prasarana

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (Instansi/ Lembaga)	Waktu mulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidang Transportasi dan komunikasi - Pembenahan infrastruktur Telkom - Pengerahan kendaraan/alat angkut/alat berat	DINAS PU BMCK, Diskominfo, Telkom, Pertamina, Dinas Perhubungan, TNI – Zeni	Dinas Perhubungan	Segera (1 Hari)	30 hari	
2	Bidang Listrik dan Penerangan - Pemulihan jaringan listrik - Penyediaan genset mobile	PLN, TNI Zeni, Pertamina,	PLN	Segera (1 Hari)	30 hari	
3	Bidang Perumahan dan Pemukiman - Penyiapan huntera - Perbaikan/pe mbangunan rumah terdampak	Dinas Perakim, TNI Zeni, PLN	Dinas Perakim	Segera (1 Hari)	30 hari	
4	Bidang infrastruktur air bersih - Perbaikan jalan dan jembatan - Perbaikan jaringan air bersih	PU SDA TARU, DINAS PU BMCK, TNI Zeni,	DINAS PU BMCK	Segera (1 Hari)	30 hari	

d. Analisis Kebutuhan dan Kesenjangan

Tabel 5.15. Proyeksi Kebutuhan Bidang Operasi Pemulihan Fungsi SaranaPrasarana

NO	JENIS SUMBER DAYA	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN KABUPATEN	KETERSEDIAAN PROVINSI	KESENJANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat Berat Loader/ Bego	23	13	22	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
2	Machine Saw	29	18	11	0	PLN, BPBD, TNI Zeni
3	Truk pengakut alat berat	11	9	9	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
4	Pick up pengangkutan	11	9	2	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
5	tali dadung	27	7	27	0	BPBD, TNI Zeni
6	Genzet	34	21	23	0	PLN/ PSDA, TNI Zeni
7	Alat Komunikasi (HT)	64	47	17	0	Orari/ Rapi. TNI Zeni, POLRI
8	Repeater	7	5	3	0	Orari/ Rapi, BPBD, TNI Hub, POLRI
9	RIG	10	10	7	0	Orari/ Rapi
10	BTS Mobile	2	2	7	0	Kominfo, Telkom/ Telkomsel
11	Paralon+kran+lem+isolatip+knee+sok	0	0	7	0	PDAM, CK
12	Truk pengakut sampah	27	17	10	0	Dinperkimt an LH
13	Alat pembersih	0	0	0	0	
14	Motor Trail	27	17	10	0	BPBD, Komunitas offroad
15	Excavator	7	2	5	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
16	Dump Truck	48	10	38	0	Binamarga, CK
17	Pompa Air	12	8	4	0	PDAM, Dinas Pertanian

NO	JENIS SUMBER DAYA	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN KABUPATEN	KETERSEDIAAN PROVINSI	KESEN-JANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
18	Lampu mercury	14	0	14	0	BPBD
19	Karung Plastik	18,000	35,000	0	0	
20	Urugan	1,800	0	1,800	0	BPBD
21	Gedeg	60	0	60	0	MDMC
22	Bambu Ampel	500	0	500	0	BPBD
23	Operator Excavator	7	2	5	0	Binamarga, CK, PSDA
24	Helper	7	2	3	2	Binamarga, CK, PSDA
25	Teknisi	7	4	3	0	Binamarga, CK, PSDA
26	Sopir	40	10	30	0	Binamarga, CK, PSDA
27	Tenaga Kerja	190	190	0	0	
28	Dozer	3	1	2	0	Binamarga, CK, PSDA
29	Chainswa	6	6	0	0	
30	Operator Loader	3	1	2	0	Binamarga, CK, PSDA
31	Operator Dozer	3	1	1	1	Binamarga, CK, PSDA
32	Helper	3	2	1	0	Binamarga, CK, PSDA
33	Teknisi	3	4	0	0	
34	Sopir	8	10	0	0	
35	Solar	7,440	7,440	0	0	
36	Bensin	60	60	0	0	

6. Bidang Operasi Pengamanan

a. Situasi

Gempa Bumi dengan kekuatan 8.8M di kedalaman 17 km di Pantai Selatan Jawa Tengah. Gempa tersebut memicu gelombang Tsunami dengan rentang ketinggian antara 8,5 – 31,03 meter. Gelombang akan sampai di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah dalam 24 menit, dimulai dari Pantai Selatan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan dan korban.

- b. Sasaran Bidang Operasi Pengamanan
- 1) Pemahaman dan peningkatan keamanan lingkungan (Pam Swakarsa).
 - 2) Adanya pengawalan Tim penolong sesuai dengan ketrampilan dan kualifikasinya (safety wajib lengkap)
 - 3) Pengalihan jalur alternatif yang aman dan lancar
 - 4) Proses pemindahan tempat pelayanan publik aman (terkawal)
 - 5) Pengamanan di tempat penampungan pengungsi.
 - 6) Pengamanan Pengungsi, obyek vital, Wilayah bencana, Gudang logistik dan Penyaluran logistik
- c. Kegiatan Bidang Operasi Pengamanan

Tabel 5.16. Kegiatan Bidang Operasi Pengamanan

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Durasi/Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Pengamanan dan peningkatan keamanan lingkungan.	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari
2	Adanya pengawalan Tim penolong sesuai dengan ketrampilan dan kualifikasinya (safety wajib lengkap)	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari
3	Pengalihan jalur alternatif yang aman dan lancar	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas, Dishub	30 hari
4	Proses pemindahan tempat pelayanan publik aman	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	10 hari
5	Pengamanan di tempat penampungan pengungsi.	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari
6	Pengamanan Pengungsi, obyek vital, Wilayah bencana, Gudang logistik dan Penyaluran logistik.	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari
7	Pemahaman dan peningkatan keamanan lingkungan	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari

d. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan

Tabel 5.17. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan Bidang Operasi
Pengamanan

NO	JENIS SUMBER DAYA	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN KABUPATEN	KETERSEDIAAN PROVINSI	KESENJANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Mobil Pick Up	17	17	0	0	Pemda Setempat, Donatur
2	Mobil Truck	18	18	0	0	Pemda Setempat, Donatur
3	Sepeda Motor	37	37	0	0	Pemda Setempat, Donatur
4	Generator Set	14	4	10	0	Pemda Setempat, Donatur
5	Tenda Regu	14	13	0	1	Pemda Setempat, Donatur
6	Velbed	30	20	10	0	Pemda Setempat, Donatur
7	Senter	34	24	10	0	Pemda Setempat, Donatur
8	BBM	9,324	0	0	9324	Pemda Setempat, Donatur
9	HT Motorola GM 2000	58	58	0	0	Pemda Setempat, Donatur
10	Radio Rigg	13	13	0	0	Pemda Setempat, Donatur
11	Konsumsi	5,508,243	0	0	5508243	Pemda Setempat, Donatur
12	Meja	25	25	0	0	Pemda Setempat, Donatur
13	Kursi	88	88	0	0	Pemda Setempat, Donatur
14	Kertas karton	190	0	190	0	Pemda Setempat, Donatur
15	Spidol Besar	51	0	51	0	Pemda Setempat, Donatur

NO	JENIS SUMBER DAYA	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN KABUPATEN	KETERSEDIAAN PROVINSI	KESEN-JANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
16	Papan/ Triplek	32	0	32	0	Pemda Setempat, Donatur
17	Peta	8	8	0	0	Pemda Setempat, Donatur
18	Laptop	1	0	1	0	Pemda Setempat, Donatur
19	Pengeras Suara	1	0	1	0	Pemda Setempat, Donatur
20	Perahu Karet	1	1	0	0	Pemda Setempat, Donatur
21	Megaphone	15	3	12	0	Pemda Setempat, Donatur
22	Jas Hujan	30	5	25	0	Pemda Setempat, Donatur
23	Kendaraan Pengawal an	5	5	0	0	Pemda Setempat, Donatur
24	Sepatu Boat	30	10	20	0	Pemda Setempat, Donatur

e. Sasaran Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

Sasaran dibentuknya bidang operasi hunian air dan sanitasi antara lain:

- 1) Tersedianya tempat pengungsian sementara baik dalam tenda-tenda maupun di bangunan-bangunan umum, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti dapur umum, mck, dll.
- 2) Terpenuhinya dukungan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana, serta terkoordinasinya semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi terkait.
- 3) Terlaksananya manajemen logistik yang baik

f. Kegiatan Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

Tabel 5.12. Kegiatan Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (Instansi/ Lembaga)	Waktu mulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menyediakan tempat pengungsian	BPBD, Dinsos, PMI, LH, PDAM, DINAS PU BMCK, TNI – Zeni	DINAS SOSIAL	Segera (1 Hari)	30 hari	
2	Menyediakan air bersih dan penampungannya	BPBD, Dinsos, PMI, LH, PDAM, TNI Zeni, PU SDA TARU, Dinas Perakim,	PDAM	Segera (1 Hari)	30 hari	
3	Menyediakan fasilitas MCK	BPBD, Dinsos, PMI, LH, PDAM, PU SDA TARU	DINAS LH	Segera (1 Hari)	30 hari	
4	Menyediakan tempat sampah	BPBD, Dinsos, PMI, LH, PDAM	DINAS LH	Segera (1 Hari)	30 hari	
5	Membuat Saluran Limbah	DINAS PU BMCK, BPBD, LH	DINAS PU BMCK	Segera (1 Hari)	30 hari	
6	Distribusi Air Bersih	DPU SDA TARU, PDAM, BPBD	PDAM	Segera (1 Hari)	30 hari	
7	Membuat Tempat Ibadah	DINAS PU BMCK, BPBD, TNI-Zeni	DINAS PU BMCK	Segera (1 Hari)	30 hari	

g. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan

Tabel 5.13. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Balai Desa	30	30	0	0	
2	Gedung SD	30	30	0	0	
3	Tempai Ibadah	28	28	0	0	
4	Mendirikan tenda darurat	40	0	0	40	
5	Pembuatan MCK	17,964	0	500	17,464	PU BMCK
6	Mobil WC/ DPU	83,900	2	10	83,896	BPBD, Kodam
7	Genset	1,678	0	500	1,678	BPBD, PU BMCK
8	Solar	7,840	0	7,840	0	Seluruh OPD/Pe laku
9	Air bersih	71,932,150	0	71,932,150	0	PU BMCK, BPBD
10	Tandon air	5,034	0	5,034	0	BPBD, Dinsos, PDAM
11	Tenda/Ti kar	12,675	109	919	11,647	Dinsos, BPBD
12	Truk tenki air	34	0	34	0	PU BMCK, BPBD, Polda, Kodam, BPBD Kab/Ko ta Tetangg a
13	Truk	0	0	0	0	
14	Colt Pick up	0	0	0	0	
15	Sopir/ke nek truk tenki air	68	10	58		PU BMCK, BPBD, Polda, Kodaam , BPBD Kab/Ko ta Tetangg a
16	Tukang tenda	68	32	36	0	TNI, POLDA, BPBD
17	Tukang kayu/kay	200	200	0	0	

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	u					
18	Relawan	400	400	0	0	
19	Velbad	28	0	28		Kodam, Polda, BPBD
20	Chainsow	1	1	0	0	Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
21	Jas Hujan	100	15	85	0	Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
22	HT	15	9	6		Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
23	Mobil Rescue	4	4	0	0	Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
24	Sepeda Motor Trail	2	2	0	0	Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
25	Handy Cham	1	1	0	0	PU BMCK
26	Kamera	1	1	0	0	PU BMCK
27	Selimut	1678000	0	1678000	0	BPBD, Dinsos
28	WTP	1678	0	50	1628	Kodam, Polda, BPBD, Dinsos
29	Tong Sampah	16780	0	16780	0	PU BMCK
30	SDM					
	BPBD	80	0	80	0	
31	DINAS PU BMCK	220	0	220	0	
32	PDAM	175	0	175	0	
33	DINKES	3500	0	3500	0	
34	PERKIM LH	175	0	175	0	
35	TNI ZENI	455	0	455	0	
36	POLRI	455	0	455	0	

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
37	RELAWAN	10000	0	10000	0	
38	PLN	175	0	175	0	

7. Bidang Operasi Pemulihan Fungsi Sarana Prasarana

- a. Situasi
- Terjadi Gempa Bumi dengan kekuatan M 8.8 di kedalaman 17 km di Pantai Selatan jawa Tengah. Gempa tersebut memicu gelombang Tsunami dengan rentang ketinggian antara 17.1 – 31,03 meter. Gelombang akan sampai di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah dalam 24 menit, dimulai dari Pantai Selatan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan dan korban.
- b. Sasaran
- 1) Jalan lancar untuk jalur evakuasi

2) Sarana komunikasi dan penerangan berfungsi dengan baik

3) Lingkungan bersih dan nyaman

4) Fasilitas umum dapat berfungsi
- c. Kegiatan

Tabel 5.14. Kegiatan Bidang Operasi Pemulihan Fungsi Sarana Prasarana

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (Instansi/ Lembaga)	Waktu mulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidang Transportasi dan komunikasi - Pembenahan infrastruktur Telkom - Pengerahan kendaraan/ alat angkut/ alat berat	DINAS PU BMCK, Diskominfo, Telkom, Pertamina , Dinas Perhubungan, TNI – Zeni	Dinas Perhubungan	Segera (1 Hari)	30 hari	
2	Bidang Listrik dan Penerangan - Pemulihan jaringan listrik	PLN, TNI Zeni, Pertamina	PLN	Segera (1 Hari)	30 hari	

	- Penyediaan genset mobile	a,				
3	Bidang Perumahan dan Pemukiman - Penyiapan huntara - Perbaikan/ pembangunan rumah terdampak	Dinas Perakim, TNI Zeni, PLN	Dinas Perakim	Segera (1 Hari)	30 hari	
4	Bidang infrastruktur air bersih - Perbaikan jalan dan jembatan - Perbaikan jaringan air bersih	PU SDA TARU, DINAS PU BMCK , TNI Zeni,	DINAS PU BMCK	Segera (1 Hari)	30 hari	

d. Analisis Kebutuhan dan Kesenjangan

Tabel 5.15. Proyeksi Kebutuhan Bidang Operasi Pemulihan Fungsi Sarana Prasarana

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaa n Provinsi	Kesen- Jangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat Berat Loader/ Bego	23	13	22	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
2	Machine Saw	29	18	11	0	PLN, BPBD, TNI Zeni
3	Truk pengakut alat berat	11	9	9	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
4	Pick up pengangku t	11	9	2	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
5	tali dadung	27	7	27	0	BPBD, TNI Zeni
6	Genzet	34	21	23	0	PLN/ PSDA, TNI Zeni
7	Alat Komunika si (HT)	64	47	17	0	Orari/ Rapi. TNI Zeni, POLRI

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
8	Repeater	7	5	3	0	Orari/ Rapi, BPBD, TNI Hub, POLRI
9	RIG	10	10	7	0	Orari/ Rapi
10	BTS Mobile	2	2	7	0	Kominfo, Telkom/ Telkomsel
11	Paralon+kr an+lem+isolatip+knee+sok	0	0	7	0	PDAM, CK
12	Truk pengakut sampah	27	17	10	0	Dinperkimt an LH
13	Alat pembersih	0	0	0	0	
14	Motor Trail	27	17	10	0	BPBD, Komunitas offroad
15	Excavator	7	2	5	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
16	Dump Truck	48	10	38	0	Binamarga, CK
17	Pompa Air	12	8	4	0	PDAM, Dinas Pertanian
18	Lampu mercury	14	0	14	0	BPBD
19	Karung Plastik	18,000	35,000	0	0	
20	Urugan	1,800	0	1,800	0	BPBD
21	Gedeg	60	0	60	0	MDMC
22	Bambu Ampel	500	0	500	0	BPBD
23	Operator Excavator	7	2	5	0	Binamarga, CK, PSDA
24	Helper	7	2	3	2	Binamarga, CK, PSDA
25	Teknisi	7	4	3	0	Binamarga, CK, PSDA
26	Sopir	40	10	30	0	Binamarga, CK, PSDA
27	Tenaga Kerja	190	190	0	0	
28	Dozer	3	1	2	0	Binamarga, CK, PSDA
29	Chainswa	6	6	0	0	

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
30	Operator Loader	3	1	2	0	Binamarga, CK, PSDA
31	Operator Dozer	3	1	1	1	Binamarga, CK, PSDA
32	Helper	3	2	1	0	Binamarga, CK, PSDA
33	Teknisi	3	4	0	0	
34	Sopir	8	10	0	0	
35	Solar	7,440	7,440	0	0	
36	Bensin	60	60	0	0	

8. Bidang Operasi Pengamanan

- a. Situasi

Gempa Bumi dengan kekuatan 8.8 M di kedalaman 17 km di Pantai Selatan jawa Tengah. Gempa tersebut memicu gelombang Tsunami dengan rentang ketinggian antara 17.1 – 31,03 meter. Gelombang akan sampai di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah dalam 24 menit, dimulai dari Pantai Selatan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan dan korban.
- b. Sasaran Bidang Operasi Pengamanan
 - 1) Pemahaman dan peningkatan keamanan lingkungan (Pam Swakarsa).
 - 2) Adanya pengawalan Tim penolong sesuai dengan ketrampilan dan kualifikasinya (safety wajib lengkap)
 - 3) Pengalihan jalur alternatif yang aman dan lancar
 - 4) Proses pemindahan tempat pelayanan publik aman (terkawal)
 - 5) Pengamanan di tempat penampungan pengungsi.
 - 6) Pengamanan Pengungsi, obyek vital, Wilayah bencana, Gudang logistik dan Penyaluran logistik
- c. Kegiatan Bidang Operasi Pengamanan

Tabel 5.16. Kegiatan Bidang Operasi Pengamanan

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Durasi/Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Durasi/Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Pengamanan dan peningkatan keamanan lingkungan.	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari
2	Adanya pengawalan Tim penolong sesuai dengan ketrampilan dan kualifikasinya (safety wajib lengkap)	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari
3	Pengalihan jalur alternatif yang aman dan lancar	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas, Dishub	30 hari
4	Proses pemindahan tempat pelayanan publik aman	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	10 hari
5	Pengamanan di tempat penampungan pengungsi.	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari
6	Pengamanan Pengungsi, obyek vital, Wilayah bencana, Gudang logistik dan Penyaluran logistik.	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari
7	Pemahaman dan peningkatan keamanan lingkungan	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari

d. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan

Tabel 5.17. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan Bidang Operasi Pengamanan

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Mobil Pick Up	17	17	0	0	Pemda Setempat, Donatur
2	Mobil Truck	18	18	0	0	Pemda Setempat, Donatur
3	Sepeda Motor	37	37	0	0	Pemda Setempat, Donatur
4	Generator Set	14	4	10	0	Pemda Setempat, Donatur

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesen- Jangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5	Tenda Regu	14	13	0	1	Pemda Setempat, Donatur
6	Velbed	30	20	10	0	Pemda Setempat, Donatur
7	Senter	34	24	10	0	Pemda Setempat, Donatur
8	BBM	9,324	0	0	9324	Pemda Setempat, Donatur
9	HT Motorola GM 2000	58	58	0	0	Pemda Setempat, Donatur
10	Radio Rigg	13	13	0	0	Pemda Setempat, Donatur
11	Konsumsi	5,508,243	0	0	5508243	Pemda Setempat, Donatur
12	Meja	25	25	0	0	Pemda Setempat, Donatur
13	Kursi	88	88	0	0	Pemda Setempat, Donatur
14	Kertas karton	190	0	190	0	Pemda Setempat, Donatur
15	Spidol Besar	51	0	51	0	Pemda Setempat, Donatur
16	Papan/ Triplek	32	0	32	0	Pemda Setempat, Donatur
17	Peta	8	8	0	0	Pemda Setempat, Donatur
18	Laptop	1	0	1	0	Pemda Setempat, Donatur
19	Pengeras Suara	1	0	1	0	Pemda Setempat, Donatur
20	Perahu Karet	1	1	0	0	Pemda Setempat, Donatur

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
21	Megaphone	15	3	12	0	Pemda Setempat, Donatur
22	Jas Hujan	30	5	25	0	Pemda Setempat, Donatur
23	Kendaraan Pengawal	5	5	0	0	Pemda Setempat, Donatur
24	Sepatu Boat	30	10	20	0	Pemda Setempat, Donatur

b. Sasaran Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

Sasaran dibentuknya bidang operasi hunian air dan sanitasi antara lain:

- 1) Tersedianya tempat pengungsian sementara baik dalam tenda-tenda maupun di bangunan-bangunan umum, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti dapur umum, mck, dll.
- 2) Terpenuhinya dukungan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana, serta terkoordinasinya semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi terkait.
- 3) Terlaksananya manajemen logistik yang baik

c. Kegiatan Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

Tabel 5.12. Kegiatan Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (Instansi/ Lembaga)	Waktu mulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menyediakan tempat pengungsian	BPBD, Dinsos, PMI, LH, PDAM, DINAS PU BMCK, TNI – Zeni	DINAS SOSIAL	Segera (1 Hari)	30 hari	

2	Menyediakan air bersih dan penampungannya	BPBD, Dinsos, PMI, LH, PDAM, TNI Zeni, PU SDA TARU, Dinas Perakim,	PDAM	Segera (1 Hari)	30 hari	
3	Menyediakan fasilitas MCK	BPBD, Dinsos, PMI, LH, PDAM, PU SDA TARU	DINAS LH	Segera (1 Hari)	30 hari	
4	Menyediakan tempat sampah	BPBD, Dinsos, PMI, LH, PDAM	DINAS LH	Segera (1 Hari)	30 hari	
5	Membuat Saluran Limbah	DINAS PU BMCK, BPBD, LH	DINAS PU BMCK	Segera (1 Hari)	30 hari	
6	Distibusi Air Bersih	DPU SDA TARU, PDAM, BPBD	PDAM	Segera (1 Hari)	30 hari	
7	Membuat Tempat Ibadah	DINAS PU BMCK, BPBD, TNI-Zeni	DINAS PU BMCK	Segera (1 Hari)	30 hari	

d. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan

Tabel 5.13. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan Bidang Operasi Hunian, Air Bersih dan Sanitasi

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Balai Desa	30	30	0	0	
2	Gedung SD	30	30	0	0	
3	Tempai Ibadah	28	28	0	0	
4	Mendirikan tenda darurat	40	0	0	40	
5	Pembuatan MCK	17.964	0	500	17.464	PU BMCK
6	Mobil WC/ DPU	83.900	2	10	83.896	BPBD, Kodam
7	Genset	1.678	0	500	1.678	BPBD, PU BMCK

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
8	Solar	7.840	0	7.840	0	Seluruh OPD/Pe laku
9	Air bersih	71.932.150	0	71.932.150	0	PU BMCK, BPBD
10	Tandon air	5.034	0	5.034	0	BPBD, Dinsos, PDAM
11	Tenda/Ti kar	12.675	109	919	11.647	Dinsos, BPBD
12	Truk tenki air	34	0	34	0	PU BMCK, BPBD, Polda, Kodam, BPBD Kab/Ko ta Tetangg a
13	Truk	0	0	0	0	
14	Colt Pick up	0	0	0	0	
15	Sopir/ke nek truk tenki air	68	10	58		PU BMCK, BPBD, Polda, Kodaam , BPBD Kab/Ko ta Tetangg a
16	Tukang tenda	68	32	36	0	TNI, POLDA, BPBD
17	Tukang kayu/kayu	200	200	0	0	
18	Relawan	400	400	0	0	
19	Velbad	28	0	28		Kodam, Polda, BPBD
20	Chainsow	1	1	0	0	Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
21	Jas Hujan	100	15	85	0	Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
22	HT	15	9	6		Kodam,

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
						Polda, BPBD, PU BMCK
23	Mobil Rescue	4	4	0	0	Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
24	Sepeda Motor Trail	2	2	0	0	Kodam, Polda, BPBD, PU BMCK
25	Handy Cham	1	1	0	0	PU BMCK
26	Kamera	1	1	0	0	PU BMCK
27	Selimut	1.678.000	0	1.678.000	0	BPBD, Dinsos
28	WTP	1.678	0	50	1.628	Kodam, Polda, BPBD, Dinsos
29	Tong Sampah	16.780	0	16.780	0	PU BMCK
30	SDM					
	BPBD	80	0	80	0	
31	DINAS PU BMCK	220	0	220	0	
32	PDAM	175	0	175	0	
33	DINKES	3.500	0	3.500	0	
34	PERKIM LH	175	0	175	0	
35	TNI ZENI	455	0	455	0	
36	POLRI	455	0	455	0	
37	RELAWAN	10.000	0	10.000	0	
38	PLN	175	0	175	0	

5. Bidang Operasi Pemulihan Fungsi Sarana Prasarana

- a. Situasi

Terjadi Gempa Bumi dengan kekuatan M 8.8 di kedalaman 17 km di Pantai Selatan jawa Tengah. Gempa tersebut memicu gelombang Tsunami dengan rentang ketinggian antara 8,5 – 31,03 meter. Gelombang akan sampai di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah dalam 24 menit, dimulai dari Pantai Selatan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo,

Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan dan korban.

- b. Sasaran
- 1) Jalan lancar untuk jalur evakuasi

2) Sarana komunikasi dan penerangan berfungsi dengan baik

3) Lingkungan bersih dan nyaman

4) Fasilitas umum dapat berfungsi
- c. Kegiatan

Tabel 5.14. Kegiatan Bidang Operasi Pemulihan Fungsi Sarana Prasarana

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab (Instansi/ Lembaga)	Waktu mulai	Waktu berakhir	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidang Transportasi dan komunikasi - Pembenahan infrastruktur Telkom - Pengerahan kendaraan/ alat angkut/ alat berat	DINAS PU BMCK, Diskominfo, Telkom, Pertamina, Dinas Perhubungan , TNI – Zeni	Dinas Perhubungan	Segera (1 Hari)	30 hari	
2	Bidang Listrik dan Penerangan - Pemulihan jaringan listrik - Penyediaan genset mobile	PLN, TNI Zeni, Pertamina,	PLN	Segera (1 Hari)	30 hari	
3	Bidang Perumahan dan Pemukiman - Penyiapan huntara - Perbaikan/ pembangunan rumah terdampak	Dinas Perakim, TNI Zeni, PLN	Dinas Perakim	Segera (1 Hari)	30 hari	
4	Bidang infrastruktur air bersih - Perbaikan	PU SDA TARU, DINAS PU BMCK , TNI	DINAS PU BMCK	Segera (1 Hari)	30 hari	

	jalan dan jembatan - Perbaikan jaringan air bersih	Zeni,				
--	---	-------	--	--	--	--

d. Analisis Kebutuhan dan Kesenjangan

Tabel 5.15. Proyeksi Kebutuhan Bidang Operasi Pemulihan Fungsi Sarana Prasarana

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat Berat Loader/ Bego	23	13	22	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
2	Machine Saw	29	18	11	0	PLN, BPBD, TNI Zeni
3	Truk pengakut alat berat	11	9	9	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
4	Pick up pengangkut	11	9	2	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
5	tali dadung	27	7	27	0	BPBD, TNI Zeni
6	Genzet	34	21	23	0	PLN/ PSDA, TNI Zeni
7	Alat Komunikasi (HT)	64	47	17	0	Orari/ Rapi. TNI Zeni, POLRI
8	Repeater	7	5	3	0	Orari/ Rapi, BPBD, TNI Hub, POLRI
9	RIG	10	10	7	0	Orari/ Rapi
10	BTS Mobile	2	2	7	0	Kominfo, Telkom/ Telkomsel
11	Paralon+kr an+lem+isolatip+knee+sok	0	0	7	0	PDAM, CK
12	Truk pengakut sampah	27	17	10	0	Dinperkimt an LH
13	Alat pembersih	0	0	0	0	

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesen- Jangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
14	Motor Trail	27	17	10	0	BPBD, Komunitas offroad
15	Excavator	7	2	5	0	Binamarga, CK, TNI Zeni
16	Dump Truck	48	10	38	0	Binamarga, CK
17	Pompa Air	12	8	4	0	PDAM, Dinas Pertanian
18	Lampu mercury	14	0	14	0	BPBD
19	Karung Plastik	18.000	35.000	0	0	
20	Urugan	1.800	0	1.800	0	BPBD
21	Gedeg	60	0	60	0	MDMC
22	Bambu Ampel	500	0	500	0	BPBD
23	Operator Excavator	7	2	5	0	Binamarga, CK, PSDA
24	Helper	7	2	3	2	Binamarga, CK, PSDA
25	Teknisi	7	4	3	0	Binamarga, CK, PSDA
26	Sopir	40	10	30	0	Binamarga, CK, PSDA
27	Tenaga Kerja	190	190	0	0	
28	Dozer	3	1	2	0	Binamarga, CK, PSDA
29	Chainswa	6	6	0	0	
30	Operator Loader	3	1	2	0	Binamarga, CK, PSDA
31	Operator Dozer	3	1	1	1	Binamarga, CK, PSDA
32	Helper	3	2	1	0	Binamarga, CK, PSDA
33	Teknisi	3	4	0	0	
34	Sopir	8	10	0	0	
35	Solar	7.440	7.440	0	0	
36	Bensin	60	60	0	0	

6. Bidang Operasi Pengamanan

a. Situasi

Gempa Bumi dengan kekuatan 8.8 M di kedalaman 17 km di Pantai Selatan Jawa Tengah. Gempa tersebut memicu gelombang Tsunami dengan rentang ketinggian antara 17.1 – 31,03 meter. Gelombang akan sampai di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah dalam 24 menit, dimulai dari Pantai Selatan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan dan korban.

- b. Sasaran Bidang Operasi Pengamanan
- 1) Pemahaman dan peningkatan keamanan lingkungan (Pam Swakarsa).
 - 2) Adanya pengawalan Tim penolong sesuai dengan ketrampilan dan kualifikasinya (safety wajib lengkap)
 - 3) Pengalihan jalur alternatif yang aman dan lancar
 - 4) Proses pemindahan tempat pelayanan publik aman (terkawal)
 - 5) Pengamanan di tempat penampungan pengungsi.
 - 6) Pengamanan Pengungsi, obyek vital, Wilayah bencana, Gudang logistik dan Penyaluran logistik
- c. Kegiatan Bidang Operasi Pengamanan

Tabel 5.16. Kegiatan Bidang Operasi Pengamanan

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Durasi/Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Pengamanan dan peningkatan keamanan lingkungan.	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari
2	Adanya pengawalan Tim penolong sesuai dengan ketrampilan dan kualifikasinya (safety wajib lengkap)	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari
3	Pengalihan jalur alternatif yang aman dan lancar	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas, Dishub	30 hari
4	Proses pemindahan tempat pelayanan publik aman	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	10 hari
5	Pengamanan di tempat penampungan pengungsi.	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Durasi/Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
6	Pengamanan Pengungsi, obyek vital, Wilayah bencana, Gudang logistik dan Penyaluran logistik.	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari
7	Pemahaman dan peningkatan keamanan lingkungan	SATPOL PP, POLRI, TNI Teritorial, Linmas	30 hari

d. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan

Tabel 5.17. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan Bidang Operasi Pengamanan

NO	JENIS SUMBER DAYA	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN KABUPATEN	KETERSEDIAAN PROVINSI	KESENJANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Mobil Pick Up	17	17	0	0	Pemda Setempat, Donatur
2	Mobil Truck	18	18	0	0	Pemda Setempat, Donatur
3	Sepeda Motor	37	37	0	0	Pemda Setempat, Donatur
4	Generator Set	14	4	10	0	Pemda Setempat, Donatur
5	Tenda Regu	14	13	0	1	Pemda Setempat, Donatur
6	Velbed	30	20	10	0	Pemda Setempat, Donatur
7	Senter	34	24	10	0	Pemda Setempat, Donatur
8	BBM	9.324	0	0	9.324	Pemda Setempat, Donatur
9	HT Motorola GM 2000	58	58	0	0	Pemda Setempat, Donatur

NO	JENIS SUMBER DAYA	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN KABUPATEN	KETERSEDIAAN PROVINSI	KESEN-JANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
10	Radio Rigg	13	13	0	0	Pemda Setempat, Donatur
11	Konsumsi	5.508.243	0	0	5.508.243	Pemda Setempat, Donatur
12	Meja	25	25	0	0	Pemda Setempat, Donatur
13	Kursi	88	88	0	0	Pemda Setempat, Donatur
14	Kertas karton	190	0	190	0	Pemda Setempat, Donatur
15	Spidol Besar	51	0	51	0	Pemda Setempat, Donatur
16	Papan/ Triplek	32	0	32	0	Pemda Setempat, Donatur
17	Peta	8	8	0	0	Pemda Setempat, Donatur
18	Laptop	1	0	1	0	Pemda Setempat, Donatur
19	Pengeras Suara	1	0	1	0	Pemda Setempat, Donatur
20	Perahu Karet	1	1	0	0	Pemda Setempat, Donatur
21	Megaphone	15	3	12	0	Pemda Setempat, Donatur
22	Jas Hujan	30	5	25	0	Pemda Setempat, Donatur
23	Kendaraan Pengawal an	5	5	0	0	Pemda Setempat, Donatur
24	Sepatu Boat	30	10	20	0	Pemda Setempat, Donatur

7. Bidang Operasi Pendidikan

- a. Situasi
- Gempa Bumi dengan kekuatan 8.8M di kedalaman 17 km di Pantai Selatan Jawa Tengah. Gempa tersebut memicu gelombang Tsunami dengan rentang ketinggian antara 8,5 – 31,03 meter. Gelombang akan sampai di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah dalam 24 menit, dimulai dari Pantai Selatan Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan dan korban.
- b. Sasaran
- Sasaran dibentuknya bidang operasi pendidikan antara lain:
- 1) Terselenggaranya pelayanan proses belajar mengajar untuk siswa didik baik dalam tenda-tenda maupun di bangunan-bangunan umum, lengkap dengan fasilitas pendukung.
 - 2) Terpenuhi sarana prasarana pendukung proses belajar mengajar pada saat tanggap darurat bencana, serta terkoordinasinya semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi terkait.
 - 3) Tersedianya tenaga pengajar untuk mendukung proses belajar mengajar selama masa tanggap darurat.
- c. Kegiatan

Tabel 5.18. Kegiatan Bidang Operasi Pendidikan

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Durasi/Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Identifikasi sekolah, madrasah, perguruan tinggi terdampak	Dinas Pendidikan, DINAS PU BMCK	Maks. 2 hari
2	Identifikasi guru dan murid terdampak	Dinas Pendidikan	Maks.3 hari
3	Identifikasi mahasiswa, santri terdampak	Dinas Pendidikan	Maks. 3 hari
4	Mendirikan sekolah darurat/ Titip di lokasi lain	DINAS PU BMCK	Maks 7 hari
5	Kebutuhan penyediaan sarana prasarana pendukung proses belajar mengajar	Dinas Pendidikan	Maks. 7 hari

d. Analisis Kebutuhan dan Kesenjangan

Tabel 5.19. Analisis Kebutuhan dan Kesenjangan Bidang Operasi Pendidikan

No	Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Ketersediaan Kabupaten	Ketersediaan Provinsi	Kesenjangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Tenaga Pendidik	546	60	486	0	Dinas Pendidikan, Kemenag, PT, Psikolog, Tagana, Pramuka, MDMC
2	Motor trail	12	6	0	6	
3	Komputer	1	1	0	0	
4	ATK	6	0	0	6	
5	BBM	700	0	0	700	
6	Kamera	3	1	0	2	
7	Mobil 4 WD	4	2	0	2	
8	Konsumsi	420	0	0	420	
9	Perlengkapan dan alat belajar	182	0	60	122	Dinsos, Dinas Pendidikan, Kemenag, Dunia Usaha, NGO
10	Gedung/ Tenda	182	0	10	172	BPBD, Dinsos, Kodam, Polda, PLN, Dunia Usaha
11	Sarana Hiburan, Bermain dan Olahraga	182	0	70	112	Dinsos, Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas Pariwisata, Dunia Usaha, NGO, DKD
12	Perpustakaan Keliling	3	0	1	2	Perpustakaan Daerah, Dunia Usaha, LSM

BAB VI

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana kontinjensi ini disusun bersama oleh berbagai instansi/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dalam rangka penanganan bencana Gempa Bumi dan Tsunami Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022, beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:

1. Setelah selesai penyusunan rencana kontinjensi ini, dokumen ini akan ditandatangani oleh setiap pimpinan instansi/organisasi yang terlibat dan dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam sebuah Peraturan Gubernur.
2. Untuk menindaklanjuti rencana kontinjensi ini perlu dilakukan pertemuan/koordinasi secara berkala maupun sesuai kebutuhan untuk pemutakhiran data dan validasi data lainnya, serta dilakukan persiapan pengadaan barang yang belum tersedia di masing-masing bidang operasi.
3. Rencana kontinjensi ini diujicobakan dan dipraktekkan dengan *Table Top Exercise (TTX)*, *Command Post Exercise (CPX)* dan *Field Training Exercise (FTX)* dengan menggunakan skenario kejadian yang termuat dalam dokumen rencana kontinjensi. Diharapkan semua pihak yang terlibat dalam rencana kontinjensi berkomitmen untuk melaksanakan rencana kontinjensi sesuai peran masing-masing.
4. Apabila terjadi bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Jawa Tengah, segera rencana kontinjensi ini ditransformasi menjadi rencana operasi tanggap darurat yang disesuaikan dengan kejadian yang sebenarnya.
5. Apabila tidak terjadi bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Jawa Tengah, rencana kontinjensi ini akan ditinjau kembali secara berkala dengan catatan akan disesuaikan proyeksi kebutuhannya melalui rapat koordinasi pada bidang terkait.
6. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran rencana kontinjensi ini dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah.
7. Rencana kontinjensi bencana gempa bumi dan tsunami ini adalah melengkapi kesiapsiagaan masyarakat yang semestinya juga dibangun. Karena itu tugas para pemangku kepentingan dalam rencana kontinjensi ini adalah juga memastikan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami.
8. Dokumen Rencana Kontinjensi ini berlaku sejak disahkan oleh Gubernur.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami ini dibuat sebagai bahan masukan bagi Provinsi Jawa Tengah umumnya dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana khususnya, sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

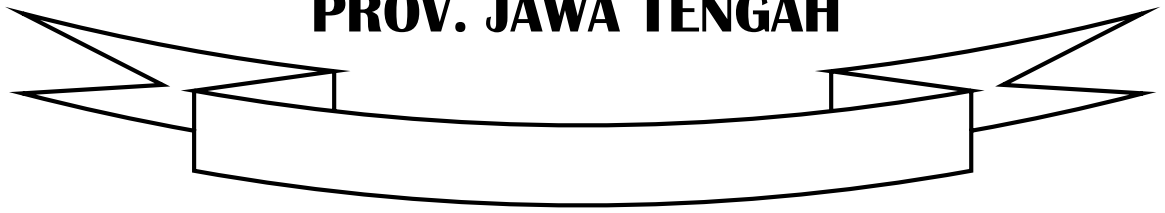
Jumlah anggaran biaya yang ditimbulkan dari beberapa bidang operasi dalam tanggap darurat bukanlah sebagai daftar isian kegiatan tetapi merupakan proyeksi kebutuhan apabila terjadi bencana. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga, bahkan Pemerintah Pusat secara Nasional dan instansi-instansi vertikal, lembaga-lembaga swasta, masyarakat, relawan dan lain-lain. Kami menyadari bahwa rencana kontinjensi ini masih perlu penyempurnaan dan review secara berkala untuk mengaktualkan data yang ada.

• GUBERNUR JAWA TENGAH,



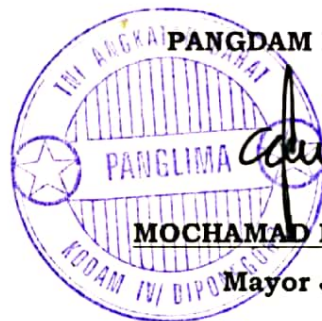
GANJAR PRANOWO

**LEMBAR KOMITMEN
PELAKSANAAN RENCANA KONTINJENSI
BENCANA TSUNAMI
PROV. JAWA TENGAH**



LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINJENSI TSUNAMI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana kontinjensi menghadapi ancaman bahaya Tsunami di Provinsi Jawa Tengah

**PANGDAM IV DIPONEGORO**
MOCHAMAD EFFENDI, S.E, M.M
Mayor Jenderal TNI

LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINJENSI TSUNAMI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana kontinjensi menghadapi ancaman bahaya Tsunami di Provinsi Jawa Tengah


KAPOLDA JAWA TENGAH
Dr. H. RYCKO AMELZA DAHNIEL, M.Si
Inspektur Jenderal Polisi

LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINJENSI TSUNAMI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana kontinjensi menghadapi ancaman bahaya Tsunami di Provinsi Jawa Tengah

**BUPATI WONOGIRI**
JOJO SUTOPO

LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINJENSI TSUNAMI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

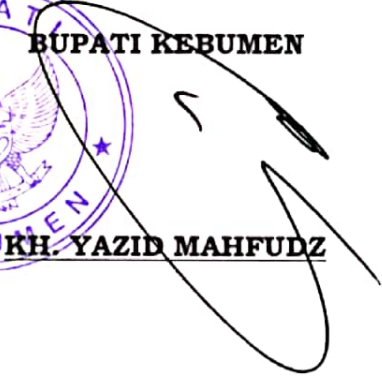
Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana kontinjensi menghadapi ancaman bahaya Tsunami di Provinsi Jawa Tengah

 **BUPATI PURWOREJO**

AGUS BASTIAN, SE, MM

LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINJENSI TSUNAMI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana kontinjensi menghadapi ancaman bahaya Tsunami di Provinsi Jawa Tengah


BUPATI KEBUMEN

KH. YAZID MAHFUDZ

LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINJENSI TSUNAMI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana kontinjensi menghadapi ancaman bahaya Tsunami di Provinsi Jawa Tengah


WAKIL BUPATI CILACAP

SYAMSUL AULIYA RACHMAN, S.STP, M.Si

1

KEPALA PELAKSANA
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Sarwa Pramana, SH, M.H.
NIP. 19610211 198903 1003

2

KEPALA BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH



Dr. Pradipto Ambowo, SH, M.Soc. Sc
NIP. 19611115 198603 1010

3

KEPALA DINAS
KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH



Dr. Yulianto Prabowo, M.Kes
NIP. 19620720 198805 1010

4

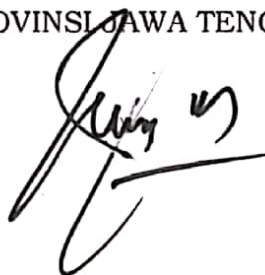
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI
JAWA TENGAH



Sudharto, SPd, MM
NIP. 19650812 198403 1015

5

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Nur Hadi Amiyanto, A.Ed
NIP. 1959 0222 198603 1009

6

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. Teguh Puri Paryono, MT
NIP. 1962 1222 199003 1005

7

KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. Saifuddin Indrayat
NIP. 1960 1219 198703 1005

8

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PROVINSI
JAWA TENGAH



Dachang Samantri
NIP. 19650622 198703 1007

9

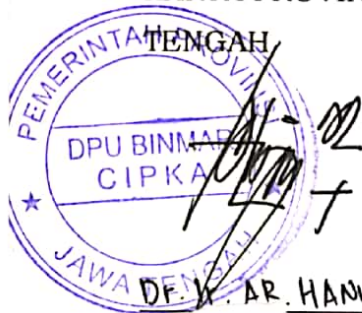
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR &
PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. Lukman, SP. I
NIP. 19610111 199010 1001

10

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA
KARYA PROVINSI JAWA



Dr. H. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
NIP. 19661129 199203 1005

11

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN PROVINSI
JAWA TENGAH



Ir. Suryo Samudro, M.P.
NIP. 19610908 198905 1006

12

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI
JAWA TENGAH



Ariy Friyoga, CES
NIP. 19630615 199203 1009

13

KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI
JAWA TENGAH



Ir. Fendriawan Istikomoro, M.Si
NIP. 19650117 199010 1001

14

KEPALA KANTOR
PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN
SEMARANG



Artis Sofingti, S.E

NIP. 1972-0410 199703 1002

15

GENERAL MANAGER PT
PLN (PERSERO) UNIT
INDUK DISTRIBUSI JAWA
TENGAH DAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA



Agung Nugraha

16

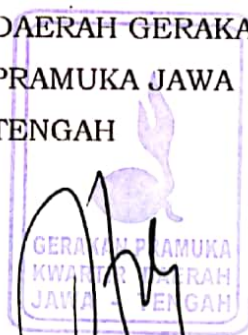
EVP TELKOM REGIONAL
IV JAWA TENGAH DAN
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



DIAJ Miko
NIP. 680359

17

KETUA KWARTIR
DAERAH GERAKAN
PRAMUKA JAWA
TENGAH



H. Anthon Supriatni

18

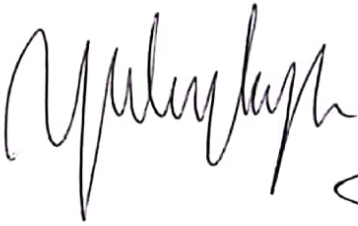
KETUA PALANG MERAH
INDONESIA PROVINSI
JAWA TENGAH



Dr. H. Imam Triyanto

19

KETUA FORUM
PENGURANGAN RISIKO
BENCANA PROVINSI
JAWA TENGAH



JULIE E. NUGROHO

20

KETUA MUHAMMADIYAH
DISASTER
MANAGEMENT CENTER
PROVINSI JAWA TENGAH



NAIBUL UMAM.

21

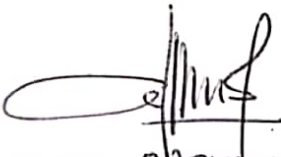
KETUA LEMBAGA
PENANGGULANGAN
BENCANA DAN
PERUBAHAN IKLIM
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH



WINARTI

22

KETUA UNIT LAYANAN
INKLUSI DISABILITAS
(LIDi)
PENANGGULANGAN
BENCANA PROVINSI
JAWA TENGAH



EDY SUPRIYANTO

South of Java M.8.8

SKENARIO EASYWAVE

: 10:00:00 WIB

Lokasi : 10.23 S-110.39 E

ked : 17 Km

229.36 km dari Wonogiri

269.79 km dari Purworejo

289.46 km dari Kebumen

311.60 km dari Cilacap

Fault

Slip: 272.5⁰ Dip: 15⁰ Rake:
90⁰

Length: 483 km

Width: 99.5 km



The TATTs Consortium

Mercy Corps Indonesia



Mercy Corps Indonesia
A/D Premier 3rd Floor Suite 01-03, Jl. TB. Simatupang No. 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550



@bpbdjateng



bpbdjateng



bpbd.jatengprov.go.id